



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN**

**(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 22 Juni 2020
Waktu	: 10.20 WIB s.d. 15.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK.IV)/Rumah Masing-masing (Secara Virtual)
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: Membahas: <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019;2. Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2019;3. RKA-KL dan RKP-K/L Tahun 2021; dan4. Isu-isu Aktual
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 46 orang dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI, dengan rincian: <ol style="list-style-type: none">1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 9 dari 12 orang Anggota<ol style="list-style-type: none">1. Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)2. Ir. Effendi Sianipar3. Ono Surono, S.T.4. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.5. Vita Ervina, S.E., M.B.A.6. H. Yadi Srimulyadi7. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.8. Maria Lestari, S.Pd.

9. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

7 dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua)
2. H.M Salim Fakhry, S.E., M.H.
3. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
4. Ir. Ichsan Firdaus
5. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
6. Ir. Panggah Susanto, M.M.
7. Alien Mus

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

6 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua)
2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari DESS., M.Sc.
5. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
6. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

6 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua)
2. H. Sulaeman L. Hamzah
3. Ahmad HI M. Ali, S.E.
4. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
5. H. Charles Meikyansah
6. Julie Sutrisno

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan, S.E.
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Drs. H. Ibnu Multazam
4. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
5. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

5 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Muslim, S.HI., M.M.
4. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

3 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

4 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
3. Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E.
4. Slamet Riyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul, S.Sy.
2. Ema Umiiyatul Chusnah

B. Sekretariat Jenderal

C. Pemerintah:

1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian);
2. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto, M.S., DAA. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian)
4. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
5. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
6. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
7. Dr. drh. I Ketut Diarmita, M.P. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
8. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);
9. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
10. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);

11. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
12. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian).

D. Undangan Lain:

1. Aas Asikin Idat, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*;
2. Karyawan Gunarso, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
3. Harry Warganegara, Direktur Utama PT Berdikari (Persero);
4. Maryono, Direktur Utama PT Pertani (Persero).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bisa kita mulai?

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Saya minta satu Anggota dampingi saya ya sebagai Pimpinan di depan, kamu pun Anggota sama dengan yang lain duduk sini. Sudah siap duduk di depan?

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Menteri Pertanian beserta jajarannya,
Yang terhormat PT Pupuk Indonesia, PT Berdikari, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri beserta jajaran,
Serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat. Walaupun masih ada virus corona di mana-mana.

Sesuai dengan jadwal acara-acara rapat Dewan Perwakilan Republik Indonesia, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 30 April 2020, dan

keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 17 Juni 2020 pada hari ini, Senin tanggal 22 Juni 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2019, hasil pemeriksaan BPK semester II tahun anggaran 2019, Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021, serta isu-isu lainnya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib Rapat Kerja hari ini kami buka dan dibuka secara umum.

Setuju?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Rapat Kerja hari ini kita mulai pukul 10.20 WIB dan akan diakhiri pada pukul 15.30 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan dengan Pasal 254 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Pertanian terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Pertanian;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan Komisi dalam bidang anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib antara lain mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Dalam ruang lingkup tugas Komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah. Saya tegaskan disini, jadi Anggota Dewan pun punya hak untuk mengusulkan program untuk daerah pemilihannya. Dulu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja pada hari ini adalah sesuai dengan surat Badan Anggaran Nomor 098PD/026PD/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020 mengenai penyampaian rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan APBN 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 sesuai dengan acuan dalam rangka pembahasan pembicaraan

pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2021 dan RKP tahun 2021 antara Komisi dengan mitra kerjanya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sebelum rapat ini dimulai Komisi IV DPR RI mengapresiasi realisasi kegiatan pengembangan sapi melalui inseminasi buatan upaya khusus sapi indukan wajib bunting atau dengan dikenal Utus Siwab serta kelahiran anak sapi melalui Siwab yang pencapaiannya di atas 100%. Saya bingung ini pencapaiannya 110%, 10% dari mana ini. Komisi IV DPR RI menilai hal ini sangat positif dalam rangka peningkatan jumlah populasi ternak sapi di Indonesia. Namun dengan demikian, perlu dikaji ulang lebih lanjut sejauhmana program tersebut memberikan kontribusi yang nyata dalam peningkatan produksi daging kita, sehingga cita-cita kita untuk mencapai swasembada daging semakin dekat atau paling tidak mengurangi ketergantungan terhadap daging impor. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian untuk memperhatikan hal dengan serius dan menjadi salah satu dasar untuk memilih Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang prosesnya saat ini sedang dilaksanakan.

Mencermati pelaksanaan kegiatan pertanian tahun 2019, realisasi mencapai anggaran sebesar 88,9% dari pagu sebesar Rp21,83 triliun. Bila dilihat kinerja penyerapan Eselon I terdapat dua Eselon I yang realisasinya di bawah 90%, yaitu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sehubungan dengan hal itu, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan dari saudara Menteri Pertanian terkait penyerapan anggaran kedua Direktorat Jenderal tersebut. Termasuk kendala yang dihadapi sehingga penyerapan anggaran tidak mencapai 90%.

Selanjutnya beberapa kondisi menjadi perhatian kita semua, diantaranya mengenai keterlambatan penyerahan pupuk bersubsidi dan penggunaan jagung, bibit yang tidak sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan. Jadi Rapat Kerja yang lalu kita sudah memutuskan menggunakan bibit jagung yang paling baik. Karena saat ini saya lihat di beberapa daerah masih banyak bibit jagung yang tidak jelas asal usulnya, namanya bagus sekali, ada yang nama pertiwi, ada yang merk kapal terbang dan lain-lain tetapi hal itu tidak jaminan menjadi bibit yang baik. Oleh karena itu, harus menjadi perhatian kita bersama agar hal-hal seperti itu tidak terulang lagi pada tahun 2021.

Selain itu, berkaitan dengan sumbangan Kementerian Pertanian dalam penerimaan devisa negara dan effort hasil pertanian, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar mengevaluasi target 30% yang sudah ditetapkan. Kemudian dihitung kembali target yang rasional lalu dilakukan langkah-langkah operasional yang mendukung pencapaian ekspor tersebut. Komisi IV DPR RI akan menggunakan data-data kinerja penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebagai salah satu pertimbangan penetapan RKP dan RKKL tahun 2021. Komisi IV DPR RI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam rangka

pemantapan ketahanan pangan Indonesia terutama dalam meningkatkan produksi beras. Namun demikian, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar berlaku cepat dan tepat dalam merumuskan kebijakan.

Perlu digarisbawahi bahwa upaya peningkatan produksi jangan selalu dilaksanakan sesuai dengan aliran yang pada akhirnya melakukan kegiatan pencetakan sawah baru. Hal ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pencetakan sawah baru dan meminta Kementerian Pertanian tidak melakukan kesalahan yang sama seperti tahun yang lalu.

Hadirin yang kami hormati.

Dalam rangka penyusunan RKP dan RKKL tahun 2021 tema yang diusung oleh Kementerian adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, Komisi IV DPR RI menilai ini tepat berkenaan dengan pandemic COVID-19 yang masih kita alami saat ini. Dengan mengacu kepada tema tersebut, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar menetapkan kegiatan-kegiatan untuk tahun 2021 yang benar-benar mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, kegiatan yang bersentuhan langsung dengan hal tersebut direncanakan perbanyaklah kegiatan-kegiatan memberi sentuhan langsung. Tadi saya sempat Rapat Konsultasi Bapak, Ibu Anggota Dewan dengan Pak Menteri dan Bapak Irjen, saat ini waktunya sudah sangat pendek sekali. Saya minta program padat karya segera dibuat embung-embung penampungan air, karena diperkirakan Juli atau Agustus paling lambat kita sudah mengalami kemarau cukup panjang. Kadi kalau ada embung-embung Insya Allah petani tetap bisa menanam.

Komisi IV DPR RI akan sangat hati-hati dalam memberikan persetujuan anggaran tahun 2021 dan ikut mengawal penyusunan RKKL tahun 201. Untuk itu, Komisi IV DPR RI minta kepada Kementerian Pertanian agar dalam menetapkan pagu anggaran 2021 setiap Eselon dilakukan berdasarkan evaluasi yang terarah. Satu hal lagi yang paling penting adalah tolong jangan ada antar Eselon I tumpang tindih. Ini masih terjadi di periode yang lalu, saya tidak mau terjadi juga di 2020-2021. Salah satu contoh, Litbang mengadakan pengadaan ayam bekerja. Jujur saya sangat kecewa dan sudah ada temuannya. Saya minta jangan terulang lagi untuk Litbang, biarkan fokus yang mengurus peternakan itu Dirjen Peternakan, jangan ada badan-badan atau Eselon lainnya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas.

Kami persilahkan Bapak Menteri.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Interupsi Bapak Pimpinan, Haerudin sebelah kanan sebelum Bapak Menteri sebentar, dari konteks pemotongan anggaran.

KETUA RAPAT:

Apa yang mau ditanyakan?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Ketua, Anggota Bapak Menteri beserta para pejabat yang saya hormati.

Saya ingin sampaikan tentu kita di Komisi IV DPR RI berjuang bagaimana anggaran pertanian kita naik. Dan ingin saya sampaikan kepada Bapak Menteri, bahwa kita menghadapi musim yang berat, mudah-mudahan kita selamat dari kepaparan. Kita juga ingin tekankan dan sampaikan dan mungkin juga kita semua mohon Bapak Menteri juga berjuang bagaimana di Rapat Terbatas tidak ada terlalu besar pemotongan anggaran pangan. Pangan ini hidup dan mati bangsa kita.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Cuma gitu saja Bapak Haerudin?

Bapak Haerudin ternyata pagi-pagi cuman ingin disorot TV, jadi langsung ambil posisi.

Silakan Bapak Menteri.

MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati dan muliakan Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI,
Sekjen dan segenap pejabat Eselon I dan II jajaran Kementerian Pertanian, Pimpinan BUMN,
Hadirin sekalian yang kami sangat muliakan.

Walahaula walaquwwata illabillah robbisrohli sodri wayassirli amri wahlul uqdata millisani yafqohu qouli.

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat. Sehubungan masih dalam suasana akhir bulan Syawal kami segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan Minal Aidzin Wal'faizin, mohon maaf lahir dan batin segala khilaf selama berlangsungnya komunikasi dengan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat, mungkin ada yang salah kami mengharapkan dapat dimaafkan.

Mengawali Rapat Kerja pada hari ini, perkenankan saya beserta segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan Rapat Kerja pagi ini, 22 Juni 2020 dengan agenda pembahasan yang pertama evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II tahun 2019 dan Rencana Kerja Program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021 dan yang keempat isu-isu aktual.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Upaya Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam penyediaan pangan yang cukup bagi penduduknya melalui peningkatan produksi dalam negeri telah menyebabkan harga pangan stabil, termasuk ketersediaan pada bulan suci Ramadhan menuju big session, big kebutuhan pada saat Idul Fitri kemarin. Dalam memperkuat ketersediaan dan stabilisasi harga pangan selain mengembangkan berbagai upaya-upaya lain, Pasar Tani, Toko Tani untuk memangkas rantai pasok, Kementerian Pertanian juga mendorong masyarakat untuk tidak hanya tergantung pada pangan beras. Sebaliknya memperluas pilihannya melalui diversifikasi pangan lokal non beras, serta pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber peningkatan ketersediaan pangan.

Membaiknya kinerja sektor pertanian juga terlihat di tengah-tengah lesunya ekspor Indonesia. Justru ekspor pertanian menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Ini data BPS pada akhir April 2020, ekspor pertanian tumbuh sebesar 12,66% sementara sektor lainnya turun dan bahkan secara total ekspor Indonesia turun sebesar 7,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau 2019. Capaian lainnya adalah kinerja produksi beras selama MP1 Tahun 2020 mengenai mencapai 16,65 juta ton. Dan sampai akhir Juni 2020 diperkirakan ada stock kita yang masih tersisa adalah 7,49 juta ton. Untuk mempertahankan kecukupan stock beras sampai Desember 2020 Kementerian Pertanian telah melakukan akselerasi tanam MP2 sebesar 5,6 juta hektar dengan menggerakkan seluruh komponen sumber daya yang didukung oleh ketersediaan air yang cukup di sentra produksi di wilayah lainnya.

Walaupun anggarannya menurun tahun 2020, Kementerian Pertanian tetap optimis akan mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan dengan cara menggerakkan semua potensi sumber daya yang ada untuk menutupi kekurangan anggaran dari APBN, seperti mendorong

partisipasi petani memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat yang sampai saat ini sudah mencapai Rp19,58 triliun. Dan melakukan rekayasa sosial melalui penggalangan kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mendukung program pembangunan pertanian. Menggerakkan seluruh komponen dan pelaku usaha untuk mendorong pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian, serta mendorong keterlibatan swasta, BUMN dalam mengamankan ketersediaan dan distribusi pangan strategis yang ada ke seluruh Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Sebagai agenda pertama, kami akan menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019, realisasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp19,42 triliun lebih atau 88,97% dari pagu sebesar Rp21,83 triliun. Realisasi anggaran tertinggi adalah Badan Karantina Pertanian mencapai 99,8% kemudian diikuti Sekretaris Jenderal 98,37% dan Badan Ketahanan Pangan mencapai 97,05%. Dari sisi capaian terlihat bahwa kinerja pengembangan komoditas pangan khususnya padi cukup bagus sesuai angka BPS produksi padi sampai Desember 2019 sebesar 54,6 juta ton gabah kering giling atau setara 31,31 juta ton beras dan ada surplus sebesar 1,53 juta ton serta stock beras akhir tahun 2019 sebesar 5,90 juta ton.

Lebih lanjut BPS juga memperkirakan bahwa produksi beras Januari-Agustus 2020 sebesar 23,05 juta ton sehingga diprediksi stock beras pada akhir Agustus 2020 sebesar 8,84 juta ton. Produksi jagung pada tahun 2020 juga bagus, yaitu sebesar 22,58 juta ton. Capaian pada sektor lain juga menggembirakan, pengembangan komoditas perkebunan hampir semua sesuai target. Pengembangan komoditas tebu mencapai 15,10 ribu hektar atau 99,04% dari target. Kelapa 14,13 ribu hektar atau capaiannya 100% dari target dan pala 27,64 ribu hektar sama dengan 100% dari target. Demikian juga pada pengembangan hortikultura, pengembangan komunitas cabai mencapai 10,05 ribu hektar atau 99,5% dari target. Dan Bawang Merah mencapai 5,14 ribu hektar atau 98,87% dari target. Hal yang sama juga terjadi pada pencapaian pengembangan komoditas peternakan.

Kegiatan lain yang mendukung peningkatan produksi komoditas utama di atas, yaitu perbaikan irigasi, pembangunan sumber air, bantuan Alsintan, penumbuhan koperasi, pengembangan Toko Tani Indonesia atau TTI, kawasan rumah pangan lestari atau KRPL dan lainnya. Realisasi telah mencapai di atas 95%, kecuali kegiatan pendukung optimasi lahan rawa yang baru mencapai 80,82%.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Sebagai agenda kedua, kami akan melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sampai dengan semester II tahun 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2004 sampai dengan

2019 terdapat sebanyak 775 temuan dari 1.469 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Kementerian Pertanian telah melakukan upaya untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan dari BPK. Posisi tindak lanjut sampai dengan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Yang pertama, dari 1.469 rekomendasi Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti sebanyak 1.413 atau 96,19% di mana sebanyak 992 atau 67,53% masuk kategori sesuai rekomendasi dan sebanyak 421 atau 28,53% masuk dalam kategori belum sesuai rekomendasi atau masih dalam proses tindak lanjut. Dan kedua, sebanyak 14 atau 0,95% rekomendasi hasil pemeriksaan belum ditindaklanjuti.

Terkait dengan upaya Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, perlu kami sampaikan penjelasan hasil rekomendasi pemeriksaan yang masuk kategori belum ditindaklanjuti sampai dengan saat ini. Hal ini dikarenakan yang pertama, rekomendasi ditujukan kepada kementerian lain selain Kementerian Pertanian. Yang kedua, unit kerja menerima rekomendasi atau BPK telah inaktif sejak tahun 2010. Yang ketiga, rekomendasi ditujukan pada kegiatan yang tidak berlanjut pada tahun berikutnya, ada tiga hal.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi BPK sampai dengan Juni tahun 2020 ini, perlu kami laporkan pula bahwa Kementerian Pertanian melalui upaya yang sungguh-sungguh telah mengakselerasi penyelesaian hasil pemeriksaan BPK. Kementerian Pertanian telah menyelesaikan tindak lanjut bantuan Pemerintah atau MAK 526 Tahun Anggaran 2019 sebanyak 98,58%. Dengan harapan prediksi peringkat pengolahan laporan keuangan Kementerian Pertanian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang telah diperoleh selama ini akan tetap dapat dipertahankan untuk tahun 2020 ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Sebagai agenda ketiga, kami akan menyampaikan Rencana Kerja program atau RKP dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2021. Landasan yang digunakan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan pertanian 2021 adalah Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dengan tema mempercepat pemulihan ekonomi dan Reformasi Sosial. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 tersebut berisi 7 prioritas nasional. Pembangunan pertanian 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian berkontribusi pada prioritas nasional 1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Dari prioritas nasional I seperti yang telah disebutkan di atas, selanjutnya dilakukan penjabaran menjadi 8 program prioritas Kementerian Pertanian terkait dengan prioritas 2, yaitu peningkatan kuantitas ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan prioritas 3 tentang peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi

pangan. Dan program prioritas 6 tentang peningkatan nilai tambah 8 kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

Agar pembangunan pertanian tahun 2021 berjalan lebih optimal Kementerian Pertanian telah merumuskan program yang disesuaikan dengan nomenklatur surat bersama pagu indikatif atau SPPI Nomor S376/MK.02/2020 dan Nomor B.310/M.PPN/D.8 dan PP.0402/05/2020 meliputi, yang pertama program dukungan manajemen, yang kedua program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas atau program yang spesifik, yang ketiga program nilai tambah dan daya saing industry, yang keempat program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kelima program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program di atas Kementerian Pertanian telah mendapatkan pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp18,43 triliun. Alokasi terbesar diarahkan pada program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp10,53 triliun. Sesuai surat bersama pagu indikatif atau SBPI, Kementerian Pertanian dengan target untuk memenuhi sasaran produksi beberapa komoditas strategis pada tahun 2021 diantaranya padi sebesar 63,50 juta ton, jagung sebesar 26 juta ton kedelai 0,48 juta ton dan daging sapi kerbau sebesar 0,463 juta ton. Kementerian Pertanian juga yang tugas utamanya menyediakan pangan penduduk pada tahun 2021 juga merancang target produksi beberapa komoditas pangan utama lainnya, yaitu produksi bawang merah sebesar 1,74 juta ton, cabai sebesar 1,45 juta ton, serta komoditas strategis lainnya yang ditargetkan meningkat dibandingkan tahun 2020.

Kementerian Pertanian juga mendapatkan dukungan Dana Alokasi Khusus atau DAK Pertanian. Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian tahun 2021 sebesar Rp1,4 triliun yang diarahkan guna mendukung pembangunan perbaikan infrastruktur dasar pertanian dan sarana pendukungnya di daerah. Dalam rangka pemulihan ekonomi yang akan banyak bertumpu pada sektor pertanian, pagu indikatif sebesar Rp18,4 triliun yang dialokasikan Kementerian Pertanian pada tahun 2021 tampak masih jauh dari memadai Ketua. Jadi pagu yang Rp18,4 triliun ini jauh dari harapan kita dari target. Tentu ini menjadi catatan khusus...

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, saya potong sedikit. Jadi kalau bicara Rp14 triliun Pak Menteri, masih katakan tidak memadai harusnya Eselon I semua mengevaluasi target pencapaiannya. 2020 saya lihat masih 54 juta ton untuk gabah kering giling. Dengan Rp14 triliun itu kok malah meningkat produksi, itu yang harus dievaluasi. Karena kan sebelumnya dari 21 menjadi 14 ya 52 juta kilo gabah kering giling, tetapi pada saat Rp14 triliun pencapaian targetnya masih segitu, maka ini yang menjadi bahan tertawaan semua pengamat pertanian, kok dikurangi malah produksinya meningkat, itu bahan Rapat Kerja terakhir seperti itu. Ini kita sama-sama

koreksi Pak Menteri supaya pencapaian targetnya jangan setinggi langit akan tetapi target pencapaiannya sebaik mungkin.

Silakan.

MENTERI PERTANIAN:

Siap, saya kira Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI saya sependapat. Jadi target kami tidak turunkan, karena itu menjadi kebutuhan nasional Pak, kalau itu turun besok akan bersoal kita dengan makanan rakyat yang 260 juta. Oleh karena itu, apapun dayanya dipotong apapun anggarannya, menurut saya selaku Menteri Pertanian target itu tidak boleh turun. Kita harus lakukan dengan segala upaya dan daya, salah satunya memanfaatkan KUR itu. KUR yang biasanya tahun lalu hanya Rp2,9 triliun sekarang kami sudah pakai Rp19,8 triliun. Memang ini tidak terlalu bagus Bapak Pimpinan, tapi kita tidak boleh mundur Bapak Pimpinan. Saya butuh suara DPR RI, memang tidak etis kalau saya melakukan perlawanan terbuka, izinkan saya ini off the record. Tetapi ke depan masalah pertanian adalah masalah utama, kalau besok pelemahan ekonomi secara dunia terjadi yang berpotensi pada pelemahan seluruh akses-akses ekonomi yang ada termasuk industry, termasuk PHK yang ada Pimpinan, maka besok itu akan bersoal. Landasannya adalah ke pertanian, makan rakyat tidak boleh berkurang sedikitpun dan itu kami jamin Pak, kalau tidak mundurkan saja, maafkan saya, maafkan saya. Ini baru saya ungkapkan, tidak boleh.

Oleh karena itu, di beberapa Ratas saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya punya JB1 sampai JB4 dengan peringatan FAO sebenarnya sudah harus menjadi warning yang sangat tegas kepada negara ini. FAO mengatakan akan terjadi kekeringan yang luar biasa, dengan siklus seratus tahunan akan terjadi serangan hama, 5 tahunan hama weran yang sudah terjadi di beberapa negara dan menghancurkan pertanian bahkan akan terjadi krisis pangan dunia yang akan menghancurkan 167 juta orang kelaparan. Di Indonesia tidak boleh terjadi seperti itu, maafkan saya harus saya kemukakan. Demi Allah.

Oleh karena itu Pimpinan, kedepan itu anggaran tidak boleh sedikit. Dan saya lihat perlahan-lahan memang Bapak Presiden memahami ini. Saya dipanggil saya sampaikan kalau kekeringan yang semakin dasyat kita butuh kurang lebih 400 ribu hektar rawa, karena cuman di rawa ada air dan kita punya data untuk itu. Kalau kita mencetak rawa, bukan mencetak tapi menanam rawa dengan optimasi lahan yang ada dengan menggunakan bibit khusus Himpara, Himpara itu bibit rawa kedalaman 1 meter ke bawah sampai setengah meter masih bisa, maka akan terjadi 1,2 juta ton tambahan baru disana itu setara dengan beras 500.000 ton.

CB2 adalah memperkuat diversifikasi panganan lokal harus dilakukan, antara lain sagu dimana, jagung dimana, umbi-umbian dimana. Dan ini satu wilayah, satu provinsi, satu daerah konsentrasi, tidak perlu banyak-banyak, sehingga konsentrasi kita. CB3 kita akan masuk kepada

perluasan cadangan, cadangan yang ada, antara lain dengan memperkuat lumbung pangan yang ada. Jadi provinsi harus ada lumbung, itu gunanya anggaran DAK ada disana itu, kita harus eksistensi mereka. Di kabupaten harus ada lumbung sehingga selesai 6 bulan ini. Di kecamatan ada lumbung-lumbung dan di desa harus punya minimal 30 ton beras dari satu ton cadangan dari ketegangan yang ada.

CB4 adalah melakukan pertanian modern melalui green house dan ... yang ada sehingga tanaman dan kelembaban bisa kita jaga. Mudah-mudahan Ketua, saya kira ini hari adalah maafkan saya kalau saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya apa yang ada dipikirkannya Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI itu juga yang ada pada kami. Kami butuh Rp10 triliun tambah dari apa yang ada, bukan Rp23 triliun agar kita bisa jamin besok di saat orang tidak bisa lagi, kan daya tahan petani dan daya tahan hanya 4 bulan, 5 bulan mereka sudah terseok-seok. Bukan membagikan BLT tapi memberikan kerja yang bisa produktif untuk mereka bisa makan. Dan kami masukan, mohon Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI dengan teriakan yang ada saya kira ini pasti bisa kita lakukan bersama. Ini kepentingan negeri, ini kepentingan bangsa, bukan program, bukan hanya proyek, bukan hanya aktivitas kebutuhan negara dan harapan negara.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Saya akan jawab terkait dengan refocusing, saya akan jawab dengan kerja sama swasta, BUMN.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua, boleh interupsi Ketua?

KETUA RAPAT:

Pak Hermanto, saran saya setelah selesai Bapak Menteri baru interupsi, supaya Bapak Menterinya focus.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Mumpung ingat dalam ingatan saya Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ditulis saja.

MENTERI PERTANIAN:

Saya yang salah kali jawabnya, maafkan kalau saya salah Ketua. Saya harus ngiomong barangkali off the record-lah.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Sebagai agenda keempat, kami akan menyampaikan beberapa isu aktual terkait penyediaan pangan penduduk saat ini. Tantangan pembangunan pertanian di masa mendatang semakin berat termasuk dalam penyediaan pangan. Pembangunan pangan Indonesia dan global menghadapi berbagai permasalahan sampai saat ini, di antaranya pertama pandemi COVID 19 secara langsung maupun tidak langsung telah mengancam ketersediaan pangan karena terganggunya distribusi pangan dan kapasitas produksi. Selain itu, menjauhkan tren ekspor pangan global meningkat, karena setiap negara akan memikirkan pangan untuk negaranya sendiri. Yang kedua, FAO juga mengingatkan kemungkinan kekeringan panjang, diperkirakan masih akan melanda beberapa negara Afrika dan Asia, diantaranya Vietnam dan Thailand dan bahkan akan melanda Indonesia. Untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak tersebut, Kementerian Pertanian pada tahun 2020 telah mengeluarkan stimulus kebijakan di sektor pangan maupun khusus program baru sebagai berikut:

1. Program stimulus melalui refocusing kegiatan dan anggaran APBN tahun 2020, meliputi:
 - a. Penyiapan buffer stock 11 bahan pangan utama di setiap provinsi.
 - b. Mengakselerasi program padat karya.
 - c. Menyelenggarakan pasar murah dan Toko Tani Indonesia serta usaha kemitraan dengan pertanian maupun startup di 24 provinsi.
2. Program usulan baru, meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas produksi, yaitu percepatan tanam pada musim kemarau bulan Mei-September 2020 pada lahan seluas 5,6 juta hektar. Pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah, perluasan areal tanam baru dan peningkatan produktivitas gula, daging sapi dan bawang putih untuk mengurangi impor.
 - b. Diversifikasi pangan lokal.
 - c. Penguatan cadangan dan logistik pangan.
 - d. Pengembangan pertanian modern.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga berupaya memperlancar distribusi pangan melalui fasilitasi bantuan biaya distribusi untuk menyalurkan pangan di provinsi surplus ke provinsi defisit dengan pengembangan pasar mitra tani.

Pimpinan, Anggota Dewan yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan Rapat Kerja pada hari, apabila masih penjelasan lebih rinci saya perkenan Pimpinan, agar pejabat eselon I lingkup Kementerian yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan untuk menambahkan penjelasan yang dibutuhkan. Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Saya setuju dengan Bapak Menteri, target jangan diturunkan, tetapi kalau anggarannya hanya sedikit bagaimana akan tercapai target tersebut. Jadi yang saya maksudkan dengan Rp21 triliun menghasilkan 52 juta gabah kering giling dengan Rp14 triliun malah bertambah. Jadi saya pikir dengan Rp14 triliun sudah cukup menghasilkan 54 juta ton gabah kering giling. Ini bertambah 2 juta ton anggarannya dipotong Rp7 triliun. Saya pun salah satu yang paling ngotot untuk anggaran tidak dipotong, karena ini menyangkut perut rakyat.

Terima kasih Bapak Menteri.

Sebelum kita lanjutkan disini ada pergantian Anggota, yang pertama Bapak Ahmad Ali, S.E., A-395 dari Fraksi Partai Nasdem, daerah pemilihan Sulawesi Tengah, selamat datang Bapak Ketua Fraksi. Semoga Bapak betah di Komisi IV DPR RI. Saya sudah 10 tahun Pak, *alhamdulillah* masih betah Pak. Selamat datang Bapak Ketua Fraksi, semoga menjadi angin segar untuk kita semua. Dan dapat bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan ketahanan pangan di negara kita.

Bapak Hermanto mau interupsi atau mau nulis dulu.

Silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua dan Bapak Ibnu Multazam, beliau ini adalah Pimpinan Baleg, Bapak Menteri yang kami hormati bersama jajaran Anggota Komisi IV DPR RI semuanya.

Saya singkat saja Bapak Menteri, kami ini Komisi IV DPR RI pada saat kita akan melakukan refocusing dan relokasi itu Komisi IV DPR RI ini kompak Pak, untuk Bapak Menteri supaya tidak dipotong anggarannya. Dan kemudian kita minta juga supaya Bapak Menteri bicara dengan Presiden supaya ditambah. Tapi Bapak Menteri sudah bicara dengan Presiden, kemudian sudah bicara di Ratas kembali ke Komisi IV DPR RI kan Bapak Menteri tidak memberikan suatu jawaban yang apakah Bapak Menteri bicara disana atau tidak tapi yang kita terima disini angkanya malah dipotong Rp7 triliun sebagaimana yang Bapak Ketua katakan tadi.

Nah, kalau kita membaca logika Bapak Menteri ketika anggaran itu turun ternyata produktifitas naik lalu apakah ada jawaban bahwa anggaran kita naik produktifitas ikut naik apa tidak. Jadi inikan kita bicara fakta dan kebijakan kita Bapak Menteri. Saya sebenarnya satu semangat dengan Bapak Menteri, kami merasakan kesedihan Bapak Menteri karena anggaran dipotong berapa kali. Kami Komisi IV DPR RI pun kami juga sedih.

Oleh karena itu, Bapak Ketua saya minta juga kesamaan rasa kita di Komisi IV DPR RI, ini adalah bagian kita untuk memperjuangkan kembali anggaran Komisi IV DPR RI. Angka Rp18,4 triliun untuk 2021 saya pikir ini juga perlu dikonfirmasi dengan KEM kita. Karena saya melihat dan membaca di KEM itu sangat minim relasi antara KEM anggaran dengan agenda-agenda yang ada di Komisi IV DPR RI. Saya pikir Bapak Menteri, nanti ini harus diperjuangkan disana. Saya sudah berusaha bicara disana supaya anggaran Komisi IV DPR RI pertanian dan pangan itu harus bertambah tidak boleh berkurang, karena ini adalah bagian daripada kita untuk menghadapi COVID-19. Karena ini adalah bagian imunitas social kita menghadapi COVID.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Cukup Bapak Hermanto?

Jadi disini Anggota Banggar kalau tidak bisa memperjuangkan untuk kepentingan rakyat di Komisi IV DPR RI ya silakan pindah, tapi sesuai perintah Fraksi masing-masing bukan perintah Ketua Komisi.

Terima kasih Bapak Menteri atas penjelasannya, selanjutnya kami silakan Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan tapi tolong waktunya karena singkat harus padat dan jelas. Yang pertama Bapak Dirjen Kanjeng silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri dan Bapak Dirjen, Bapak Ketua.

Jadi setelah kami membaca laporan daripada Kementerian soal pemeriksaan BPK, *alhamdulillah* ini periode tahun 2019 itu cukup bagus. Tapi kami ingatkan ini masih ada yang belum sesuai dengan dalam proses tindaklanjut itu masih utuh 39 dan yang belum ditindaklanjuti juga masih ada. Ini tolong Pak, mungkin Irjen sama Sekjen ini segera tindaklanjuti, karena aturan main saya kira masih belum berubah. Kalau temuan BPK tidak ditindaklanjuti dalam waktu 2-3 bulan itu dilempar pada penegak hukum. Walaupun itu Bapak belum bisa menjawab minimal jawabannya sedang dalam proses tindaklanjut itu sudah jawaban Pak. Ini saya diajarin sama BPK,

jadi kalau Bapak nol itu dianggap membangkang. Ini tolong bahwa temuan sedang kami pelajari dan proses waktu dan akan kami tindaklanjuti dalam waktu sesingkat-singkatnya kira-kira gitu. Itu sudah proses Pak, tapi kalau nol ya itu dilepar ke Polisi, Jaksa, maupun KPK. Ini saya ingatkan pengalaman yang pernah kami lakukan.

Terus yang kedua, ini ada temuan BPK yang terkait dengan instansi lain, terutama kehutanan Pak. Ini soal kebun Pak, ini saya waktu masih disana permintaan Bapak Sudin sama Bapak Ibnu itu suruh inventarisasi kebun-kebun yang tidak prosedur dikawasan Pak. Kita dapatkan Pak, walaupun susah payah dengan menggunakan tangan-tangan penegak hukum, tapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti Pak. Sebetulnya Komisi IV DPR RI punya konsep Pak, DPR RI bisa menerima, Pemerintah bisa menerima, pengusaha bisa menerima. Ini Bapak Sudin punya konsepnya, saya membantu saja. Karena kerugian kayu saja Rp400 triliun Pak, ini tolong Menteri yang lalu sudah saya kasih datanya nampaknya tidak tahu. Melalui inisiatif Bapak tolong ini disampaikan. Karena di Riau saja menurut laporan Bapak Dirjen BUN itu ada 1 juta kebun rakyat yang belum ada sertifikatnya. Nah, ini kemana kalau dikawasan hutan ada 3 juta Pak, itu sudah panen sebagian. Ini tolong segera ditindaklanjuti, kalau memang perlu Bapak Ketua mengkoordinasikan mengundang pertanian, kehutanan kita ketemu apa yang harus dilakukan. Ini rekomendasi.

Terus yang kedua, di laporan Bapak Menteri mengenai pagu sebelum pagu ada saya sampaikan data Pak. Data ini saya agak ragu Pak, ragunya apa? Kalau menurut BPS tahun 2019 kita impornya besar, 2018 Pak, tapi menurut laporan dari Kementan surplus Pak, ini tolong apakah kami membaca salah atau bagaimana ini yang perlu kita sampaikan itu. Terus yang kedua Pak, tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, Juli-Agustus itu kemarau Pak, saya harapkan Bapak Menteri punya terobosan bahwa sejak orde baru sampai sekarang ini masing-masing kementerian itu jalan sendiri. Bapak butuh air yang punya air itu yang menghasilkan hutan Pak. Nah, di bawah hutan itu apa? PU tapi sekarang Pak, hutan nanam dimana, PU bangun bendungan dimana, Bapak bikin irigasi dimana, sehingga kemarau tetap tidak ada air. Contohnya Pak, di kampungnya Bapak Ketua, di Batu Teki itu bendungannya diresmikan oleh Ibu Mega saya ikut menghadiri sekarang dua turbin Pak, karena hulunya gundul, pertanian tidak jalan. Di kampung Bapak itu, saya pernah mendampingi Bapak Wapres waktu itu pulang kampung saya disuruh ikut. Kenapa banjir di Ujung Panjang Pak, karena di hulunya di Bili-Bili itu gundul Pak.

Cobalah kita sama-sama kalau itu dalam Kawasan itu kehutanan yang nanam di luar Kawasan Dirjen BUN memberikan bibit produktif Pak, kalau coklat kasih coklat hingga bibitnya tidak ditebang, pohonnya menghasilkan buah, konservasinya ada. Di kampung saya juga begitu Pak, waduk Sempor itu hulunya gundul, waduknya sudah dangkal, tapi pembangunan irigasinya jalan terus. Jadi kalau kemarau ya seperti tadi Pak, jadi surplus pangan itu kalau musim hujan. Ini yang perlu kami sampaikan.

Selanjutnya juga kesediaan air ini sudah. Mengenai daging Pak, saya tidak tahu dari dulu kesannya daging itu diambil 90% itu dilakukan oleh petani gurem, petani kecil. Petani kecil artinya rakyat yang hanya memelihara 3-4 ekor paling banyak. Dia tidak punya teknologi, tidak punya modal. Dan selama ini pengusaha besar lebih suka impor itu. Sebetulnya gampang hitungnya kalau kebutuhan daging satu orang itu satu tahun 2,5 kg kali penduduk itu ketemu potensi kita berapa, kurangnya itu belum pernah selama ini impor. Contohnya tahun 2019 kita impor 223 ribu ton ini tolong mungkin ada terobosan Pak, petani kita bagaimana ditingkatkan, petani ternak ini betul-betul bisa melaksanakan swasembada daging. Tadi Bapak Ketua mengatakan seperti itu.

Yang terakhir Pak, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Pak. Di Pertanian ada 8 Undang-Undang yang akan dirubah. Sampai sekarang saya belum mungkin karena situasi mohon kiranya dikordinasikan dengan Komisi IV DPR RI untuk dibahas mana-mana yang memang harus dilakukan. Jangan sampai nanti sudah diputuskan kementerian teriak, karena kementerian yang lain sudah Pak. Contohnya misalkan hortikultura impor itu akan dihapus Pak, itu tidak benar.

KETUA RAPAT:

Kanjeng cukup?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Iya, saya kira itu Pak.

Terima kasih dan mohon ijin Bapak Ketua, saya ada di Panja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Kanjeng.

Jadi apa yang dikatakan oleh beliau ini sampai hari ini belum ada satupun pejabat Kementerian Pertanian kordinai dengan Komisi IV DPR RI perihal omnibus law. Kalau Kementerian Kehutanan begitu menerima bahan langsung konsultasi sama kami, tapi *alhamdulillah* pertanian belum ada.

Selanjutnya Bapak Slamet Sukabumi.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Ketua, serta Pimpinan yang lain,

Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat,
Bapak Menteri yang saya hormati,
Bapak Sekjen beserta seluruh jajarannya yang saya hormati.

Tidak lupa juga baru ketemu menyampaikan minal aidzin walfa'idzin mohon maaf lahir bathin yang selama ini mungkin selama berhubungan ada hal-hal yang kurang berkenan.

Beberapa hal yang ingin kami dalam, yang pertama terkait juga dengan pernyataan Bapak Menteri tadi bahwa ekspor pertanian kita meningkat sekitar 12,66% di saat memang ekspor nasional turun. Cuman permasalahannya Bapak Menteri, saya ingin dikonfirmasi data-data lapangan kan baik akademis maupun yang lain mengatakan bahwa apakah pernyataan ini valid, sekedar kemudian sayur saja data yang beredar kan kita impor sekitar 11,5 triliun artinya produk yang sangat murah dan mudah saja di produksi di kita yang terjadi itu impor. Nah, korelasinya dimana sehingga yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi ada kenaikan sebesar 12,66% itu mungkin kita perlu penjelasan.

Dan juga terkait dengan anggaran tadi saya juga sependapat bahwa berbagai upaya seluruh jajaran Bapak Menteri harus bisa meyakinkan Bapak Presiden bahwa anggaran yang dibutuhkan itu segitu itu kurang sehingga kita secara komisi akan memberikan dukungan penuh terkait karena ini masalah perut ya kalau sudah masalah perut urusan yang lain-lain sekunder mungkin masyarakat bisa menahan diri, tapi kalau sudah urusan perut ini akan membahayakan sehingga Presiden juga dalam hal ini juga harus focus bagaimana kemudian ketercukupan pangan yang sudah di-warning oleh FAO ini menjadi perhatian terkait dengan anggaran kita.

Yang berikutnya, juga terkait dengan masalah kebijakan dimana terkait dengan subsidi pupuk, apakah di tahun 2021 kemudian ini akan juga dilakukan. Saran saya apakah tidak perlu dikaji kemudian menjadi subsidi pasca panen, karena ketika kemudian ini sudah dilakukan bertahun-tahun terkait dengan permasalahan yang ada juga selalu mengikuti subsidi ini di saat yang sama juga tidak ada korelasi positif terkait dengan peningkatan produksi dan kesejahteraan dari para petani kita. Saya mendengarkan langsung bagi petani itu tidak penting kemudian dia disubsidi atau tidak tetapi bagaimana kemudian ada jaminan terkait dengan produk kita ketika sedang panen. Ini tentunya saya pikir pertanian untuk kemudian Kementan dalam hal ini perlu memberikan kajian sejauhmana ketika kemudian mengalihkan subsidi yang sifatnya pupuk kemudian menjadi subsidi pasca panen.

Yang berikutnya terkait saya ingin menanyakan di halaman 18 di slide yang disajikan di ini. Ada terkait dengan bawang putih, bawang putih disitu disampaikan kebutuhan kira-kira 377 ribu ton. Sementara estimasi akan impor sebanyak 642 ribu ton. Nah, tentunya kita masih ingat kejadian kemarin-kemarin disaat kemudian petani bawang kita menjerit karena masalah harga dan tidak terserap oleh pasar tetapi di sisi yang lain Pemerintah membuka lebar-lebar terkait dengan impor bawang putih ini, sehingga data ini mungkin perlu dijelaskan juga apakah akan terjadi kejadian yang sama kemudian kita

menelantarkan kepada para petani bawang kita yang pada akhirnya nanti petani kita akan habis karena tidak ada kebanggaan dari sisi itu. Nah, ini mungkin perlu juga penjelasan.

Dan yang terakhir mohon izin Bapak Ketua, terkait dengan tindaklanjut dari BPK. Di buku yang sudah disampaikan di kita kepada Anggota di semester II ada temuan terkait dengan kegiatan perluasan sawah dimana disitu ada kelebihan bayar 68,7 miliar serta kekurangan volume luasan sekitar 9,7 miliar senilai itu. Itu ada di buku pemeriksaan hasil pemeriksaan BPK yang diberikan kepada seluruh Anggota, sehingga kita ingin mendapatkan penjelasan sudah. Kalau yang dijelaskan tadi disampaikan oleh yang terhormat Bapak Darori itu sifatnya khusus global saya ingin mendalami terkait dengan perluasan. Kenapa saya focus kesini? Karena ini menyangkut dengan program 2021 ketika kemudian ada perluasan sawah lagi atau kalau kemarin di refocusing sudah tidak ada. Kita akan melihat karena tingkat produksi juga tidak begitu signifikan penambahannya apalagi tadi disampaikan dengan anggaran pas-pasan saja produksi meningkat, manfaatnya apa kita menambahkan perluasan siapa kalau kemudian harus membuang-buang anggaran.

Itu saja Bapak Menteri dan Bapak Ketua yang saya hormati, beberapa hal mungkin nanti bisa ditambahkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih Bapak Slamet.

Selanjutnya Bapak Ibnu Multazam, setelah ini Bapak Haerudin.

F-PKB (Drs. IBNU MULTAZAM):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri dan segenap jajaran yang saya hormati,
Bapak Ketua yang berurusan dengan sesuatu yang tidak bisa diwakilkan yang saya banggakan,
Bapak dan Ibu yang saya cintai.

Terima kasih.

Pertama saya ingin menyampaikan bahwa di dalam evaluasi setiap tahun anggaran itu tidak mencantumkan PNBK. Saya mengusulkan mulai

tahun yang akan datang ketika evaluasi tahun anggaran yang sudah berlalu karena PNBP itu merupakan bagian dari anggaran juga dan kinerja kementerian itu bagaimana nanti kalau disepakati itu untuk mencantumkan PNBP, walaupun nanti di Banggar akan dibahas. Tapi setidaknya-tidaknya di dalam laporan itu di cantumkan masalah PNBP.

Yang kedua, Bapak Menteri perilaku petani ini akhir-akhir ini sudah berubah. Bukan karena akibat COVID-19 tetapi sudah berubah mulai mekanisasi sudah berjalan. Dimana-mana di daerah-daerah sumber pangan itu sudah pakai mekanisasi misalnya combain, tractor besar. Tetapi saya kira yang perlu dan belum dilakukan adalah konsolidasi lahan karena tanah sawahnya itu petaknya masih kecil-kecil. Nah, ini bagaimana tahun 2021 ini dilakukan sosialisasi program konsolidasi lahan. Supaya nanti mesin-mesin yang besar, tractor besar, combain yang besar itu bisa berjalan secara maksimal, bisa berfungsi secara maksimal. Kalau petaknya kecil-kecil di beberapa wilayah itu tidak bisa berjalan secara maksimal.

Yang ketiga untuk wajib tanam importir bawang saya kira ini perlu ditinjau kembali bawang putih dalam hal ini karena tidak adalah importir itu menanam, yang menanam itu pasti petani. Untuk itu, saya kira perlu ditinjau kembali bagaimana kewajiban importir yang wajib tanam itu diatur sedemikian rupa supaya kontribusinya itu diberikan kepada petani. Jadi diatur misalnya per kilo berapa itu langsung diberikan kepada petani. Jadi yang wajib tanam itu petani sedangkan importirnya membantu dalam bentuk apakah itu kepada petani, supaya betul-betul itu tertanam, sebab disinyalir wajib tanam itu di beberapa daerah tidak berjalan maksimal artinya tumpang tindih overlap dengan beberapa anggaran kementerian.

Yang terakhir, pagu anggaran indikatif 2021 Rp18,4 triliun ini memang memprihatinkan tetapi Kementerian Pertanian agar focus kepada tugas pokok dan fungsinya. Tadi disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa ada tugas atau kalau tidak salah dengar saya ada tugas Kementerian Pertanian untuk mengisi daerah-daerah yang deficit beras. Kalau menurut saya itu bukan tugas Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian itu adalah produksi gabah. Kalau sudah berubah menjadi beras itu adalah komoditasnya kementerian lain. Tidak ada petani itu atau sedikit sekali petani yang menjual beras, mereka menjual gabah. Sama yang disampaikan Bapak Darori, saya juga kurang sependapat kalau daging itu komoditas produksi pertanian, bukan. Daging itu sudah menjadi komoditas Kementerian Perdagangan. Apa komoditas pertanian? Ya sapi, kerbau, kambing. Kalau sudah berubah menjadi daging ini sudah bukan. Ini focus bagaimana untuk memperbanyak beras, memperbanyak jagung, memperbanyak sapi, memperbanyak kambing dan lain sebagainya bukan memperbanyak daging bawah ada impor itu iya, tapi kalau produksinya banyak impor berhenti sendiri.

Saya kira itu Bapak Ketua, Bapak Sudin, saya nanti ijin untuk ikut beralih ke tempat lain.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih senior.

Beliau ini hamper 10 tahun Pak, di Komisi IV DPR RI.

F-PKB (Drs. IBNU MULTAZAM):

15 Tahun.

KETUA RAPAT:

Oh, 15 tahun.

Selanjutnya Bapak Haerudin tolong singkat dan jelas karena waktunya juga kita terbatas.

Terima kasih.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua, Pimpinan, Anggota yang terhormat,
Bapak Menteri beserta seluruh jajaran para pejabat Kementerian Pertanian dan seluruh mitra yang hadir dari BUMN, mitra Pertanian yang saya hormati, saya muliakan.

Ingin kami sampaikan berapa hal Bapak Menteri, pertama perluasan lahan. Saya paham apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi dengan anggaran sedikit ingin hasil yang maksimal, mendorong beberapa lembaga agar sama-sama aktif bagaimana pangan ini terwujud sesuai dengan kebutuhan dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Artinya, mitra-mitra kerja kita yang punya lahan bagaimana mereka produktif didorong oleh KUR. Contohnya PTPN itu kan banyak lahan yang nganggur, rakyat digerakkan, KUR-nya disiapkan baik jadi kebun, tanaman pangan ataupun horti itu bisa didorong. Tapi sejauhmana efektifitas nanti kostra tani yang disiapkan bisa bekerja di lapangan. Saya kira itu terobosan kedepan mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik.

Yang kedua Bapak Menteri, masalah impor kita berharap bahwa kita ini ideologis urusan pangan kita itu. Impor itu adalah penanggulangan sementara bukan sebagai ketergantungan hidup. Kita ingin bahwa kitalah eksportir nanti kedepan itu. Maka untuk beberapa hal tentu kita ingin mendorong bagaimana kebun dan tanaman kita menjadi pertahanan basis pangan kita. Ada yang masa 3 bulan, 6 bulan, ada 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun kita punya pertahanan pangan. Contoh, di salah satu bidang sawit kita hanya ada

replanting tapi itupun tidak masuk program kita. Bagaimana kita pengembangan ke depan itu masuk, karena sawit rakyat kita itu jarang yang punya dari yang sudah ada, sudah bukan existing tapi mereka harus memulai dari awal. Maka wajin ada program yang masuk penyiapan perkebuna sawit walaupun bukan peremajaan.

Yang ketiga Bapak Menteri, ingin kami sampaikan bahwa dengan anggaran Rp18 triliun apa bisa kita memungkinkan mapping perluasan beberapa hal yang strategis diversifikasi pangan kita, sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Jangan dipaksakan Papua dengan beras, jangan dipaksakan Jawa Barat dengan sagu, biarkan sagu di Maluku, biarkanlah sagu di Papua, biarkan beras di Jawa. Nah, kira-kira itu potensi daerah dan ini melibatkan mitra-mitra kerja kita, ada contoh Pertani kita belum berdaya, Sang Hyang Sri kita belum berdaya. Kita bagaimana bisa bekerja sama merata dan sinergis agar terwujud cita-cita kita. Jangankah kedaulatan pangan, minimal swasambada panganlah kita miliki.

Terima kasih Ketua, terima kasih Bapak Menteri dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Haerudin.

Selanjutnya Bapak Andi Akmal silakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASALUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Kom IV DPR RI, Bapak Menteri beserta dengan jajaran,
Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia.

Yang pertama Bapak Menteri, saya mendukung tadi sebenarnya kita tidak puas dengan pagu indikatif hanya Rp18 triliun. 2014 kami dulu masuk kesini Pak Menteri Rp30 triliun bahkan pernah Rp31 triliun. Saya kira perlu kita dorong ini baru pagu indikatif masih bisa berubah dan saya kira DPR RI terutama kami akan menyuarakan agar ini bisa ditambah. Karena kalau tidak ditambah tentu agak berat untuk pencapaian target. Saya setuju tadi Bapak Menteri bahwa kita harus kolaborasi dan sinergi. Jadi kita berharap bahwa ekstensifikasi lahan ini dikerjakan oleh BUMN ataupun BUMN yang lainnya atau sinergi dengan BUMN, karena anggaran dari Kementan tidak ada. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa saya berharap betul-betul kordinasi antar kementerian dan BUMN ini diperkuat.

Kemudian yang kedua, saya kira bahwa pertanian ini bukan hanya produksi Bapak Ibu tapi proteksi Pak. Contohnya, di masalah daging kita tahu bahwa selama ini kita impor daging sapi dan kerbau. Bahkan kerbau ini Pak Ketua dari India ada 170 ribu ton, inikan jumlah yang sangat besar. Dan yang mengagetkan kita ternyata ada hasil yudisial review dari MK bahwa Undang-Undang Peternakan ini di review Pak, bahwa selama ini kita harus mengimpor dari negara yang bebas PMK (Penyakit Mulut dan Kuku). India ini ada 3 negara bagian yang kena PMK sebenarnya. Cuma mungkin nanti perlu penjelasan dari Kementan apakah betul-betul sudah ada ahli dari ahli kesehatan yang memastikan bahwa daging yang masuk ke kita ini betul-betul bebas PMK.

Nah, efeknya bagi dalam negeri harga daging peternak lokal anjlok. Saya kemarin ikut seminar ini para peternak sapi dan kerbau menyampaikan aspirasi agar Bapak Menteri Pertanian yang baru ini betul-betul mempelajari. Sekarang banyak RPH (Rumah Pemotongan Hewan) tidak ada sapinya Pak, karena digerus oleh impor tadi harga kerbau inikan murah. Dan dulu sebenarnya impor kerbau hanya berlaku di Jabodetabek, sekarang sudah merambah keseluruh Indonesia. Ini efeknya kan akan memukul daripada para peternak kita atau peternak sapi lokal kita. Mereka nanti tidak akan mau lagi menjadi peternak sapi. Jadi saya kira semangat Bapak Menteri kita dukung kemarin di Lampung bahwa kita kekurangan 300 ribu ton daging sapi. Saya kira ini perlu kita perkuat kembali lagi peternak sapi kita dengan mengurangi impor dan daging kerbau dari India diteliti dan jangan hanya berlaku untuk daerah-daerah minus daging. Ini saya kira catatan saja Bapak Ketua untuk dicatat ke depannya, karena aspirasi dari asosiasi ini sangat kuat mengenai masalah ini.

Yang ketiga yang terakhir Bapak Menteri, saya kira kemarin kita mendengar pemaparan dari Wakil Menteri Pertahanan saya juga heran darimana datanya Wakil Menteri Pertahanan mengatakan bahwa ketahanan beras kita hanya 69 hari. Sementara Bapak Mentan mengatakan 1 tahun sampai Desember kita cukup aman, kalau saya sih percaya datanya Mentan karena mitra kita dari BPS. Saya kira ini perlu kita dijelaskan kepada kami Bapak Menteri karena ini ada media yang meliput bahwa kita yakinkan bahwa kita punya cukup ada berapa sebenarnya data beras dan kira-kira bisa sampai Desember aman tidak. Nah, ini bisa menjadi point kita Bapak Menteri untuk meyakinkan Presiden bahwa dana Kementerian harus kita naikkan. Kalau tidak ini akan bahaya untuk 2021 gitu.

Demikian Bapak Ketua, beberapa catatan dan beberapa masukan dari saya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Bapak Andi, ada kamus yang berlaku di umum tanyakan kepada ahlinya, ya ahlinya itu Bapak Menteri Pertanian bukan Wamen, itu yang penting. Kemudian kalau masalah daging sapi itu yang baru masuk PT. Berdikari. Itupun saya dengar bukan sapi jatah untuk Indonesia tetapi jatah untuk Malaysia, karena Malaysia lockdown kemudian dibelokkan ke Indonesia. Ini kalau tidak salah, karena kebetulan teman-teman saya di Malaysia pemain daging dan pemain ayam.

Selanjutnya Mbak Alien Mus silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang.

Yang saya hormati Ketua Komisi IV DPR RI dan Wakil Ketua bayangan,
Dan juga seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Bapak Menteri beserta jajarannya.

Insy Allah kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan sehat wal'afiat.

Tadi sudah disinggung oleh beberapa pertanyaan sebelumnya tapi memang dari awal saya ingin mempertegas sekali bahwa ini di halaman 18 tentang bawang putih. Memang bawang putih kemarin sudah disinggung oleh RIPH, soal ijin RIPH yang sangat bermasalah. Yang mengakibatkan bahwa para importir ini yang sebelumnya belum melakukan importir telah diberikan ijin dan dampaknya sangat besar sekali bagi para petani yang seharusnya standarisasi bagi para importir bawang putih itu sebelumnya mendapatkan RIPH melakukan atau mengadakan wajib tanam untuk bawang putih. Ini dipermasalahan Bapak Ketua, mohon ini menjadi acuan dari Komisi IV DPR RI karena dari beberapa bulan yang lalu kita juga sudah mempertanyakan soal perusahaan yang mendapatkan ijin importir atau RIPH bawang putih, tapi kita melihat disini ada data dari Kementan bahwa bawang putih ini memang jadi masalah Ketua, tolong ini menjadi acuan dari Komisi IV DPR RI.

Kemudian karena kita memang harus focus juga dalam tema rapat kita pada hari ini mengevaluasi hasil audit BPK tahun 2019. Saya ingin focus kepada hasil pemeriksaan BPK semester II ini tentang perijinan kepala sawit. Sebanyak 194 perusahaan perkebunan kepala sawit pada 15 kabupaten kota, yang diuji petik belum memiliki hak atas tanah atau hak guna usaha seluas kurang lebih dari 1,2 juta hektar, akibatnya tidak adanya legalitas tanah terhadap usaha perkebunan kelapa sawit.

Kemudian sebanyak 181 perusahaan perkebunan kelapa sawit mengenakan kawasan hutan seluas kurang lebih dari 349,63 hektar serta 110 perusahaan perkebunan kepala sawit menggunakan kawasan gambut seluas kurang 345,23 ribu hektar belum melengkapi dokumen persyaratan perijinan. Hal ini mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan

peruntukan serta potensi kebakaran hutan yang kerusakan kawasan hidrologis gambut dan juga lemahnya monitoring di dalam Kementan akan permasalahan tersebut. Ini juga pernah disinggung beberapa bulan yang lalu, ternyata juga menjadi hasil audit dari BPK.

Terus kita juga memiliki laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri seperti pendanaan melalui program Retsi didanai pinjaman internasional fund for agriculture development (FAD) dengan perjanjian pinjaman nomor 2000001960 program apa saja yang dilakukan oleh Kementan. Kami meminta laporannya juga untuk bisa kita ketahui penggunaan pendanaan tersebut. Kami juga melihat pembagian Alsintan di mana sangat lemah untuk pengawasan mulai dari pra atau sebelum mendapatkan hingga control setelah mendapatkan paling tidak selama 2 tahun, hal ini untuk mencegah alat tersebut berpindah tangan dengan cara dijual kembali. Ini juga menjadi atensi kita untuk bahwa bantuan tersebut memang sampai kepada masyarakat dan dipergunakan untuk para petani tapi tidak digunakan sebagai bisnis-bisnis gelap.

Kemudian turunnya nilai tukar petani NTP karena dampak COVID-19 NTP pertanian dalam arti sempit dalam 5 bulan terakhir terus mengalami penurunan menyentuh angka 99,49% menurun dengan tajam yang pada bulan Januari masih berada di angka 104,27% penurunan di dalam dialami oleh sub sector peternakan yang pada bulan Mei 2020 menyentuh angka 96,66% dan diikuti oleh sub sector perkebunan di angka 98,51%. Terhadap kondisi tersebut apa saja yang menjadikan upaya jangka pendek yang dilakukan oleh Kementan untuk menghadapi hal tersebut.

Saya ingin sekali menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI dalam refocusing anggaran sangat berharap tidak ada terjadinya pemotongan anggaran di Kementan. Tapi memang terjadi lagi pemotongan anggaran dan pada saat ini kita melihat betul bahwa anggaran untuk Kementan harusnya bertambah, tapi dengan laporan yang disampaikan oleh Kementan bahwa dengan anggaran yang begitu pas-pasan tapi juga hasil produksi bisa meningkat ini yang perlu juga kita pertanyakan.

Kami berharap juga dengan penyampaian Bapak Menteri bahwa memberikan komoditi andalan per provinsi kabupaten kota ini juga harus menjadi acuan dari sekarang Pak. Kalau tidak memang kita tidak memiliki satu tujuan Pak, menghasilkan hasil dari petani harus melihat strategi-strategi apa yang harus dilakukan sekarang karena memang tadi disampaikan kita akan mengalami musim panas kemarau panjang. Dan kita tahu persis hasil petani sangat melimpah ruah kemarin bulan empat itu tapi daya beli orang pun semakin menurun yang hasilnya adalah hasil petani dijual sangat rendah tidak sesuai dengan apa yang mereka keluarkan. Ini sangat miris Pak.

Terus soal beras memang ini terjadi simpang siur soal informasi yang ada dan saya percaya dan saya yakin betul betul bahwa Bapak Menteri Kementan ini memberikan data-data yang betul-betul valid sehingga di tahun 2020 kita tidak mengalami penurunan atau stock beras yang berkurang. Ini sangat menjadi atensi juga bagi para Eselon I tolonglah berikan advice yang

baik dan betul-betul sesuai dengan realisasi anggaran itu memang betul-betul sesuai penempatannya dan focus betul-betul.

KETUA RAPAT:

Cukup Mbak Alien?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Satu menit saja, Pak Menteri, saya kemarin reses dan saya juga melakukan rapat bersama para petani kopra di seluruh Indonesia. Mereka mengharapkan bahwa Bapak Menteri bisa juga memberikan atensi yang besar bagi para petani kopra. Karena memang rata-rata di Indonesia Kopra ini menjadi apalagi di Indonesia bagian timur khususnya menjadi daya hidup untuk mempertahankan hidup dan untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan kopra. Apa yang menjadi atensi dari Bapak Menteri ini sangat menjadi harapan yang besar bagi para petani kopra.

Itu saja Bapak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Alien.

Selanjutnya Bapak Abdullah Tuasikal.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Yang saya hormati Bapak Ketua, rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ini ada empat sasaran strategis, salah satunya padi, jagung, kedelai, daging sapi. Saya kira jelas untuk mempertahankan produksi dan kita tahu bahwa surplus beras ini sudah ada dan saya kira saya harapkan untuk dari Kementerian itu ada hal-hal yang terkait dengan pertanian. Seperti irigasi harus menjadi perhatian, alat-alat seperti Alsintan juga harus menjadi perhatian dan juga harus disesuaikan dengan daerah-daerah setempat.

Kemarin waktu di Dapil memang juga agak sulit untuk membagikan Alsintan yang sudah ada. Pertama, merk-nya harus jelas kalau merk-nya Cina itu masalahnya bank tidak mau. Seperti kalau Combain dan lain-lain karena di

daerah kita itu sudah sangat cukup banyak. Untuk itu mempertahankan itu saya kira perlu.

Apa yang menjadi harapan kita semua maupun Kementerian kita harap agar negara ini lebih baik, tapi kunci keberhasilan juga ada pada dana. Kalau tidak ada dana apa yang kita mau nyanyi, tidak ada kita yang bisa nyanyi. Seperti kita lihat soal daging, daging inikan perkapita, kalau perkapita itu pertahun per orang butuh sekitar 683 ribu kurang lebih ton. Sedangkan produksi nasional cuman 4.509 ton ada defisit. Saya harapkan agar coba ada satu program, artinya program dari kementerian yang tidak akan mungkin kita langsung surplus tapi mudah-mudahan kita ada program yang jelas terarah. Sehingga di 2021 itu dengan kebutuhan 683 ribu ton kita nanti akan mendapatkan defisit sekitar 1,24 juta kurang lebih. Diharapkan seperti apa kita mengurangi dengan program-program yang jelas. Itu yang satu saya kira untuk tadi untuk beras.

Ini ada pengalaman saya Bapak Menteri, kemarin waktu reses itu dari Pemerintah Daerah melarang masyarakat untuk menjual. Artinya, menjual beras di antar kabupaten kota. Sehingga dengan komitmen para pelaku pedagang yang ada di sana tadi gabah yang 4.500 dia jadinya 3.800. Disana kita tidak lihat ada peranan Bulog dan lain-lain, sehingga saya mencoba mengintervensi sebagai wakil Dapil dari sana saya mencoba mengintervensi dengan uang 358 juta, itu uang pribadi saya. 3 hari itu Rp3.800 itu dia bisa naik jadi Rp4.300 per kilo. Setelah itu saya mundur dengan uang Rp300 juta lebih itu kita bisa mampu mengendalikan. Nah, itu saya dengar informasi dari untuk itu saya juga mengharapakan itu dia harus lebih berpedn di daerah kita.

Seterusnya bahwa ini ada soal kedelai, kedelai ini kita juga masih defisit. Saya kira ini data BPS, itu konsumsi nasional kurang lebih sekitar 2,05 juat ton. Sedangkan rencana produksi itu 3.627 ton maka defisit kurang lebih sekitar 2.048 ton. Proyeksi konsumsi untuk nasional 2021 itu kurang lebih sekitar 3,05 juta ton. Defisit dengan perencanaan target 480 ton itu maka akan terjadi defisit kurang lebih 2,63 juta ton. Padahal kita tahu bahwa lahan kita ini sangat cukup banyak. Tapi saya yakin bahwa kementerian juga tidak mungkin buat apa-apa kalau dananya cuman 18 triliun. Saya juga sebagai Anggota DPR RI Dapil Maluku itu juga saya paham ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua untuk kita sama-sama agar bisa meningkatkan 18 triliun ini bisa menjadi berapa triliun. Dengan kurang lebih 17 sekian triliun kemarin saja kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kita belum tahu bahwa virus ini bisa selesai bulan apa.

Apa yang kita rencanakan inikan adalah kondisi normal, kalau kondisi tidak normal kita juga mau nyanyi apa. Untuk Bapak Menteri saya kira buat saya itu kunci uang ada sekarang itu Litbang juga harus diperjelas dananya, dibantu jangan sampai hilang, kalau hilang kedepan mau seperti apa. Virus ini akan berlalu, kita akan ada pada normal tapi tidak tahu bulan apa, tahun berapa kita belum tahu.

Tapi yang penting buat saya itu adalah perencanaannya, strategi kita, lahan kita ada berapa, Alsintan alat-alat juga seperti apa. Dan jangan kita

tinggalkan atau kita abaikan irigasi, karena irigasi ini sangat cukup penting. Untuk itu, kita juga dengan Komisi V DPR RI Pak, kalau kita cuman dengan Kementerian Pertanian saya kira juga untuk mencapai hasil khususnya pertanian juga mungkin kita tidak akan mungkin kita capai.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak?

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Ya, siap Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Interupsi Ketua, saya tambah setengah menit saja.

Boleh Ketua?

KETUA RAPAT:

Kalau senior boleh lah.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Bapak Menteri, saya dengan gambarnya Pertani di kemas kerja ini, ini ada gambar drone untuk menyemprot padi. Tahun anggaran 2021 ini saya mohon untuk pengenalan kepada petani kita itu dianggarkan bantuan drone supaya mereka mengenal. Dan nanti kalau sudah mengenal dan bisa silakan bantuan itu diperbanyak, karena ini inspiratif sekali.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Bapak Ono Surono.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Yang saya hormati Bapak Menteri beserta seluruh jajarannya,

Kawan-kawan Anggota Komisi IV DPR RI.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang pertama Bapak Menteri, terkait dengan tadi disampaikan pembukaan lahan pertanian baru atau cetak sawah. Mungkin 3 bulan yang lalu kita mendengar ada rencana pembukaan 500 ribu hektar di lahan rawa dan lahan gambut. Dan saya sih berpikir sebelum Bapak Menteri juga sudah ada program itu. Dan pada akhirnya saya yakin bahwa pendekatannya ini cuman pendekatan proyek saja, hasilnya tidak maksimal. Dan apakah sudah dipikirkan pada saat kita mempunyai program pembukaan cetak sawah baru di saat juga ada alih fungsi lahan pertanian yang setiap tahunnya itu kurang lebih 100 ribu hektar. Nah, kita kan sebelum berpikir untuk membuat sawah yang baru yang kita tidak tahu irigasinya bagaimana, hasilnya bagaimana, karena kadar PH-nya juga mungkin harus ada padi uang khusus. Kenapa kita tidak focus bagaimana menahan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian yang cukup besar setiap tahunnya. Dengan apa? Dengan bagaimana memastikan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan itu berjalan. Bukan hanya sekedar Undang-Undang tapi harus terintegrasi melalui Perda, baik Perda terkait dengan perlindungan lahan tersebut sekaligus juga Perda terkait dengan RT, RW-nya. Sehingga sebenarnya kan Pemerintah tidak harus pusing menurut saya.

Yang kedua, 500 ribu hektar tahun ini yang di beberapa lokasi tadi Bapak Menteri menyampaikan jenis benih padinya adalah Inpara. Saya cek Pak, ke balai besar benih padi yang di Sukamandi. Stock untuk yang sampai dengan Bulan April tahun 2020 itu hanya 30 ton benih padi yang untuk di lahan rawa. Nah, tentunya apakah memang ini mencukupi kebutuhan 500 ribu hektar yang nanti akan dilaksanakan pada tahun ini.

Yang ketiga, terkait dengan anggaran. Tadi teman-teman menyampaikan terkait dengan anggaran yang jangan dipotong dengan target yang lebih besar dengan anggaran yang lebih kecil, kemungkinan tidak akan terealisasi. Nah, saya tadi tertarik Bapak Andi Akmal yang dari awal ini di Banggar. Pada saat 2014 Bapak Menteri Bapak Amran itu menjabat anggarannya itu baru kalau tidak salah Rp15,9 triliun. Tiba-tiba ada refocusing terkait dengan dana migas kalau tidak salah pada saat itu akhirnya menjadi Rp31,8 triliun. Nah, dengan kenaikan anggaran yang cukup besar targetnya apa sih. Apa memang produksi padi, produksi semua yang terkait dengan pertanian itu naik. Pada saat itu menterinya mengklaim bahwa stock beras cukup toh pada akhirnya juga impor-impor juga. Sehingga anggaran yang besar tidak menjamin juga targetnya akan tercapai. Tapi bagaimana ada efisiensi, efektifitas terkait dengan anggaran. Nah, sekarang saya tantang Bapak Menteri dengan anggaran yang turun seperti itu, dengan target yang besar seperti itu ya kalau bisa ya benar-benar bisa diwujudkan bukan hanya pada ruang rapat sekarang saja.

Yang keempat Pak, ini terkait dengan anggaran saya lihat disini ada kegiatan untuk lembaga distribusi pangan. Disini volumenya 850 jumlahnya Rp68 miliar, disaat yang sama ada laporan bahwa realisasinya ini hanya 60

miliar. Nah, tadi ada penjelasan bahwa Rp8 miliar itu digunakan untuk kegiatan di provinsi dan kabupaten, nah mohon penjelasan kegiatan yang diprovinsi dan kabupaten itu apa yang Rp8 miliar.

Yang terakhir, terkait dengan stock beras. Tadi Bapak Andi Akmal menyampaikan percaya pada data BPS. Selama ini kita juga percaya data BPS pada akhirnya juga tidak pernah data itu juga benar. Sekarang saja misalnya ada proyeksi sampai dengan Desember tetap aman, tapi ada data sandingan Pak, ada data sandingan yang saya dapat dari beberapa analis. Jadi kalau sekarang dengan situasi cuaca yang sekarang, ada proyeksi per kapita itu 111,58 kilo ini aka nada defisit di bulan Desember itu 0,68 juta ton. Kalau proyeksinya 110,55 22 per kapitanya ini aka nada defisit 0,66 juta ton. Nah, sehingga ini perlu perhatian dari Bapak Menteri, bukan hanya pada saat Ratas ngomong aman segala macam toh pada akhirnya impor-impor juga. Sehingga mohon saya penjelasan tadi, mohon bisa disampaikan dan saya yakin Bapak Menteri figure yang kita percaya untuk membawa perubahan di dunia pertanian tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin ngomongnya doang yang banyak, kerjanya tidak ada. Sehingga ya saya pikir dari beberapa kali ganti Menteri polanya tetap seperti itu saya harap ini polanya harus rubah. Menterinya ganti tapi ya seperti itu juga, sehingga inilah saatnya kita dorong bersama-sama, kita dukung Bapak Menteri untuk melakukan perubahan di Kementerian Pertanian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua, bisa setengah menit Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Jadi ini supaya public tidak salah pertanyaan saya, jadi impor daging itu diputuskan di Menko Perekonomian. Sebetulnya bukan domainnya Menteri Pertanian, karena operatirnya Bulog dan Berdikari. Maksud saya mungkin tadi Bapak Menteri bisa menjadi acuan kedepannya bagaimana supaya data daging kita dalam negeri ini betul-betul valid Pak, menjadi dasar kita untuk yes or no untuk impor itu. Jangan karena kepentingan politis atau kepentingan bisnis, inikan yang terjadi selama ini. Kalau yang terjadi ya sampai kapan pun peternakan rakyat tidak akan bisa maju Pak.

Jadi saya berharap semangat Bapak Menteri ini, betul-betul kita punya data yang kuat dan kita punya sentra sebenarnya peternakan rakyat yang

memang bisa dibanggakan. Bapak Menteri kemarin semangat di Lampung katanya ada 300 ribu ton bisa disuplai, saya kira ini semangat yang bagus ya Bapak Ketua. Cuman jangan hanya pengusahanya Pak, tapi peternakan rakyat yang penting kalau pengusahanya mereka sudah bisa hidup Pak.

Bapak Ketua, jadi saya berharap impor daging ini ya keputusannya di Menko Perekonomian jangan jadi lahan bisnis yang merugikan petani kita. Tugasnya Bapak Menteri Pertanian bagaimana memperbanyak bakalan sapi atau kerbau di dalam negeri kita Bapak Ketua.

Demikian Bapak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Andi dan Bapak Ono.

Tapi Bapak Ono yang dikatakan tadi Menterinya ngomong doang, Eselon I nya masih disini semua ini. Ini saya jelaskan Bapak Menteri, banyak omong kinerjanya tidak ada, Eselon I masih disini semua. Dan saya juga menyesalkan Kepala Badan Ketahanan Pangan waktu itu saya realokasikan Rp80 miliar sesuai permintaan Presiden untuk padat karya, untuk rakyat, untuk rumah pangan lestari tetapi yang dikondisikan kok seperti tawar menawar. Sudah diputuskan di Rapat Kerja ini, Rp80 miliar sebagian untuk rumah pangan lestari. Tapi katanya sudah dialokasikan ke bantuan untuk angkut di wilayah yang surplus. Saya minta datanya 3 minggu sampai hari ini tidak pernah dapat datanya dengan alasan inilah, itulah, inilah, ini mau jadi apa begini. Kalau sudah diputuskan disini ya kita laksanakan.

Dan saya ingatkan Bapak Momon selaku Sekjen, saya tidak pernah menghambat tandatangan Dipa. Dipa sampai di depan saya 5 menit saya tandatangan, saya kembalikan. Saya sebagai Pimpinan harus konsekuen, cuman saya lihat nampanya anak buah Bapak Menteri ini ada yang tidak konsekuen. Tadi loh permintaan Presiden untuk padat karya, bagaimana menghidupkan rakyat di daerah-daerah kantong-kantong yang agak kurang baik ekonominya. Tapi malah dipotong lagi, dipotong lagi, saya minta kalau besok belum ada laporannya mengenai distribusi oleh Badan Ketahanan Pangan ya nanti untuk RDP yang akan datang kita pending saja terus.

Selanjutnya Bapak Charles, silakan.

F-NASDEM (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, kemudian juga Menteri Pertanian dan jajarannya.

Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yang pertama tentang isu ketahanan pangan. Yang pertama, kita ketahui data yang terakhir dari ABB

menyatakan penyusutan lahan pertanian hingga 44% dan tentu ini akan mengancam produksi pangan di Asia termasuk di Indonesia Bapak Menteri. Dan kemudian data yang terakhir juga menyebutkan ada 88 kabupaten kota yang rentan pangan dan ini masalah ini semakin serius dengan adanya pandemic COVID-19 yang mengancam perekonomian termasuk masalah pertanian di Indonesia. Nah, langkah strategis harus dilakukan untuk memastikan daerah-daerah rawan pangan itu bisa melewati masa pandemic ini dengan keadaan yang baik tanpa ada permasalahan di sector pangan.

Pimpinan dan Bapak Menteri.

Permasalahan ketahanan pangan ini semakin sulit akibat penyusutan lahan pertanian khususnya lahan sawah yang semakin massif terjadi. Sudah tentu solusi pencetakan lahan sawah baru itu memang menjadi salah satu solusi yang bisa ditempuh, namun solusi tersebut juga harus mempertimbangkan aspek kestabilan lingkungan hidup, aspek social dan budaya masyarakat serta aspek ekonomi.

Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Menteri, yang pertama adalah bagaimana langkah Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan pangan di daerah-daerah rentan pangan selama masa pandemic COVID-19 ini berlangsung serta bagaimana hasilnya hingga saat pertemuan kita ini Pak. Kemudian bagaimana langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk menjaga dan meningkatkan lahan persawahan itu sendiri.

Setelah itu point yang kedua Pak, soal produksi kedelai Pak. Kedelai merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat tahu dan tempe. Pemerintah pada tahun 2008 mencanangkan di tahun 2020 itu bisa swasembada kedelai Pak, namun hingga saat ini cita-cita tersebut bagaikan panggah masih jauh panggah dari apinya Pak, impor lagi kalau kayak gini. Tahun 2018 impor kedelai mencapai 2,6 juta ton dengan mencapai nilai 1,1 miliar Dolar. 2017 naik lagi 2,7 ton dengan nilai 1,2 miliar Dolar Pak. Pada tahun 2021 sebagaimana paparan dari Kementerian tadi saya baca dengan tim mencanangkan target produksi sebesar 0,48 juta ton. Tentu angka ini masih sangat jauh memenuhi kebutuhan nasional.

Pertanyaan kami mengapa Kementerian Pertanian hanya menargetkan 0,48 juta ton produksi kedelai pada tahun 2021. Yang kedua, bagaimana visi Panjang strategis dari Kementerian Pertanian dengan pengembangan produksi kedelai nasional.

Terakhir saya mohon ijin Ketua, tadi ada titipan pertanyaan dari Bapak Ahmad M. Ali yang kebetulan juga pada agenda yang lain. Menurut yang disampaikan dia tadi banyak target-target optimis yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian tapi kita lihat bahwa perang data ini selalu ada antara Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya. Bisa kita ketahui ada Kementerian Perdagangan dan lain-lain.

Nah, menurut saya, menurut Bapak Ali maksudnya target-target Mentan itu lebih baik dikonsolidasikan dulu secara internal Pak, menyambung yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi kami sepakat bahwa konsolidasi di internal Bapak jauh lebih penting daripada kemudian pencapaian-pencapaian strategis itu disampaikan ke public tapi kemudian dari hasil dengan kemudian apa yang menjadi sebuah kenyataan berbeda Pak. Jadi itu titipan pesanan dari Bapak Ahmad M Ali yang kebetulan tadi juga menyampaikan hal tersebut.

Dan yang terakhir, saya mau menyampaikan tentang realisasi anggaran 2019 yang menjadi sebuah evaluasi. Terkait dengan realisasi tahun 2019 serapan anggaran Kementerian Pertanian menurut saya masih belum optimal Bapak Menteri. Realisasi anggaran hanya mencapai 88,97% dari total anggaran. Dan dari pagu tersebut jika detail maka dilihat kinerja dari Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian masih sangat rendah, yaitu 79,24% dan 86,27%.

Pada tahun 2020 tahun ini serapan anggaran dari Kementerian Pertanian secara umum bisa dioptimalkan dan penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan. Bapak Mentan, ini pertanyaannya mengapa serapan anggaran kementerian tahun 2019 lalu masih belum optimal, apa ada kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana langkah solusinya. Kemudian serapan anggaran dari dua Dirjen tadi adalah yang terendah padahal kedua Ditjen tersebut adalah Ditjen dengan pagu anggaran terbesar di Kementerian Pertanian. Mengapa serapan anggaran Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen PSP masih belum optimal. Serta langkah apa yang dijadikan pembelajaran untuk 2020 berjalan ini.

Itu Bapak Ketua yang perlu saya sampaikan.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Charles.

Selanjutnya yang terakhir seara fisik Bapak Salim Fakhry dari Fraksi Golkar, masih Fraksi Golkar ya Pak?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri dan jajaran yang kami hormati,

Bapak Sudin sebelum masuk tadi Bapak Menteri mungkin setelah ketemu sama Bapak tadi senyumnya luar biasa memimpin rapat, walaupun akhirnya agak naik sedikit.

Yang pertama Bapak Menteri, saya Bapak Ketua, melihat cara Bapak Menteri menghadapi Raker ini kita yakin Pak, kesungguhan beliau untuk memajukan pertanian di Republik ini sangat luar biasa. Namun, harapan kita kepada yang membantu beliau khususnya Eselon I dan seterusnya bagaimana system Bapak Menteri ini harus diikuti. Bapak Menteri mau kencang yang di bawah juga harus kencang Pak.

Masalah bibit jagung Pak, saya kira sepakat dengan Pak Ketua tadi sekedar sumbang saran. Bibit jagung ini merk Pertiwi, merk Garuda bilang Bapak Ketua tadi ada Bisi, ada Pioner, menurut pandangan saya disesuaikan dengan lokasi Pak, daerah. Cuman, ini biasanya kalau bisi hanya ada bisi Bapak Ketua, sementara di daerah kita tidak cocok bisi, contohnya daerah pegunungan. Jadi saran apa salahnya Pak Menteri beberapa perusahaan yang disesuaikan dengan lokasi memang agak sulit Pak, ini yang pertama Pak.

Sudah itu beberapa waktu sama Bapak Charles kami di Banggar, Rapat Banggar dengan Menteri Keuangan memang Bapak Ketua, Bapak Menteri, Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan dalam Ratas dengan Presiden. Presiden mencanangkan cetak sawah baru Pak, itu menurut Ibu Menteri Sri Mulyani. Namun, cetak sawah baru inipun kita harus berhati-hati Bapak Menteri, cetak sawah baru bukan cetak orang baru. Sudah itu masalah program tumpang tindih Bapak Menteri, yang dimaksud tadi saya ini hanya mengulas apa saya sima dari tadi Bapak Sudin tumpang tindih. Ada di Litbang, ada disini, Bapak Sudin ini yang Namanya urusan ayam, bebek, sapi memang semangat beliau ini, walaupun Bapak Ketut senyum-senyum dari belakang Bapak Sudin. Maksud kita begini Pak Menteri, jangan ada tumpang tindih, jangan ada di Litbang program ini ada juga di program lain. Saya kira ini sangat bagus.

Terakhir Pak Menteri, masalah yang Bapak minta anggaran Rp10 triliun untuk tambahan. Saya kira ini Bapak Ketua, kita harus serius kalau memang mau menambah. Tadi Bapak Ketua, selalu bebaskan disini ada Banggar, betul kami ada Banggar Bapak Ketua. Kalau ini bukan harus dikoordinasikan dengan Kementerian Bapak Ketua, apa yang mau ditambah, makanya kita serius Bapak Momon. Disinilah tugas kami nanti Pak Menteri, membantu Kementerian Pertanian dalam Rapat Banggar untuk menyuarakan. Bapak Menteri katakan sangat butuh suara dari Komisi IV DPR RI. Disinilah kami mengadakan pembelaan terhadap mitra kami. Ini apa yang mau ditambah kita tidak tahu Bapak Ketua, apa salahnya dalam pertemuan ini habis apa kan sudah apa ini Bapak Charles. Bapak Charles ini Bapak Ketua, walaupun pertama di Banggar bintang di Banggar, walaupun saya sudah 4,5 tahun di Banggar saya salut sama Bapak Charles ini. Mungkin karena partai beliau ini, cuman jangan lupa Bapak Charles kami sudah senior disitu.

Terakhir masalah temuan BPK, ada kegiatan perluasan lahan sawah yang bekerja sama dengan Kementan dengan TNI. Banyak peraturan yang dianggap menyalahi Pak, karena dalam hal ini banyak peraturan yang dilanggar hanya karena ingin mendapat status swasembada beras. Akibatnya adalah kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar lebih kurang kalau saya tidak salah Rp400 miliar Pak. Bukan kita tidak setuju bermitra dengan TNI cuman ini sudah ada temuan BPK. Mohon penjelasan Bapak Menteri terhadap penyelesaian permasalahan tersebut.

KETUA RAPAT:

Pak Salim cukup?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Cukup Pak, sudah pas 3 menit.
Terima kasih Bapak Sudin.

KETUA RAPAT:

Karena kita targetkan pukul 13.00 WIB sudah harus kita break dulu makan siang.

Selanjutnya yang virtual Ibu Endang.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bapak Ketua, sedikit Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak Slamet bagaimana?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Yang terlupa mumpung ini giliran yang ada di ruangan. Sedikit saja Pak Ketua untuk pertanyaan walaupun tidak kebetulan saya melihat ke kanan ada Direktur Pupuk Indonesia. Yang beredar dalam rangka penanganan COVID kan mendapatkan gelontoran dana Rp6 triliun. Nah, mungkin nanti bisa juga dijelaskan disini Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Slamet.

Selanjutnya yang virtual pertama Ibu Endang, singkat dan jelas Ibu. Bicara yang focus permasalahan anggaran dan isu-isu actual lainnya.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Baik, terima kasih.

Bapak Ketua yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri yang saya banggakan mohon maaf karena saya ini termasuk usia rentan jadi tidak ikut hadir fisik.

Jadi Bapak Menteri, saya ingin Bapak Menteri ini membuat suatu grand strategi untuk political will yang kuat, karena kalau ada grand strategi gant Menteri siapapun akan ada dorongan untuk kedaulatan ini. Nah, kemudian Bapak Menteri yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan, yaitu tentang Badan Litbang dan SDM. Jadi saya ingin berharap sekali karena Indonesia menuju emas tahun 2045 itu sangat penting Pak Menteri untuk menggerakkan ekonomi dan yang berbasis pangan tentu saja. Nah, Badan Litbang Pertanian ini punya Balai Biogen dan banyak sekali teman-teman peneliti yang sudah menghasilkan bio teknologi yang bisa diaplikasikan untuk masyarakat. Tapi tadi SDM kita Badan SDM juga sulit untuk mengaplikasikan atau memberikan penyuluhan karena anggarannya kurang.

Nah, kemudian yang kedua untuk karena Indonesia inikan terkenal dengan keaneka ragam hayatnya yang nomor dua di dunia. Jadi saya mohon produk-produk lokal terutama ayam-ayam lokal yang sudah dihasilkan oleh Balai Penelitian Peternakan yang ada di Ciawi itu harus didorong Pak, kemudian ada lagi ayam-ayam lokal yang ada di beberapa daerah. Nah, karena peneliti-peneliti kita ini tidak pernah diberikan fasilitas yang memadai sehingga akhirnya hasil-hasil penelitian itu hanya untuk umum saja, padahal masyarakat kita memerlukan.

Kemudian panduan-panduan dari Sekjen harus didorong supaya panduan-panduan itu bisa diaplikasikan untuk uji multi lokasi kepada masyarakat. Kemudian ada lagi Pak, untuk hortikultura jeruk di daerah Sumatera Selatan ini daerahnya bukit ini ternyata bagus sekali Pak, kayak jeruk suwe. Nah, ini mohon difasilitasi karena petani disana banyak yang mengeluh dan sekarang saya mengumpulkan teman-teman untuk membeli harganya Rp35 ribu karena jeruknya bagus. Nah, jadi Bapak tolong potensi-potensi lokal yang sudah berkembang dengan baik itu harus didorong untuk bisa diaplikasikan kepada masyarakat dan juga biaya-biaya untuk menghasilkan isu culture ataupun varitas-varitas yang baru harus mulai dirintis Pak, karena seperti kita ketahui ini mohon maaf Pak, ini saya mewakili perempuan. Di Balai-Balai Penelitian teman-teman perempuan itu lebih teliti tapi ternyata di Balai Penelitian Hias saja Pak, yang ada di daerah saya di Cipanas itu penelitinya tinggal satu dan tidak ada rekrutmen untuk ASN berikutnya. Jadi mohon diperhatikan untuk peneliti-peneliti yang berbasis bio teknologi, karena ini penting sekali Pak.

Yang kedua, tentang sawit. Sawit inikan ada anggaran urunan Pak, nah itu ternyata untuk bio diesel yang akan digunakan oleh pengusaha besar lagi Pak. Nah, jadi mohon Bapak memperhatikan untuk rakyat. Yang kedua Pak, untuk kopi juga perlu difasilitasi dengan sistem tunda jual. Kemudian yang terakhir ini bidang saya Pak, yaitu tentang pembiayaan. Jadi Pak, kalau melalui KUR itu sulit Pak, karena tadi harus ada agunan, harus ada kolateral. Nah, perlu Bapak memikirkan Bank Pertanian yang berbasis koperasi Pak. Jadi saya punya pengalaman untuk dapat grand dari Bank ... yang bisa saya aplikasikan di Indonesia.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Endang.
Selanjutnya Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati,
Bapak Menteri dan jajaran yang juga saya hormati.

Salam sehat untuk semuanya.

Yang pertama, saya terkesan tadi dengan opening dari Bapak Menteri semangatnya mudah-mudahan bisa menular kepada jajarannya. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pimpinan bahwa satu orang itu tidak cukup tetapi ini harus menjadi semangat dari satu lembaga. Dan itu turunnya sampai ke bawah Bapak Menteri. Jadi saya langsung saja juga pada temuan, bahwa selama saya 3 bulan setengah di Dapil ini luar biasa karena menemukan banyak hal yang saya lihat termasuk sepihnya kehadiran para penyuluh pertanian kita. Nah, saya tidak tahu ada dimana mereka semuanya ini, termasuk pada saat dimana petani kita membutuhkan dukungan, pendampingan, tetapi nyaris raya-rata yang saya temukan mereka belum pernah ketemu dengan para penyuluh pertanian. Apakah penyuluhnya yang kurang atau memang sistem kerja mereka yang tidak menyesuaikan dengan cara kerjanya petani. Jadi kalau petani itu ya di sawah, kalau rapat itu ya malam hari. Jadi kalau nyari petani di dua.

KETUA RAPAT:

Mbak Luluk kalau bisa tolong fokus apa yang mau ditanyakan.

Terima kasih.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Iya Ketua, terima kasih.

Terus yang kedua, terkait dengan tadi soal jagung ya Bapak Menteri. Jadi selama ini jagung ini terkait banyak juga dengan para peternak kita, tempo hari kita sudah punya drama yang luar biasa ketika harga jatuh dan 70% dari biaya produksi itu kan habis untuk pakan. Dan pakan itu terutama berbahan bakunya dari jagung. Nah, bagaimana komitmen dari Kementerian kita untuk tidak mengandalkan impor karena bahan bakunya saja impor. Kemudian kalau pakannya impor pasti kemudian tidak kompetitif untuk para peternak kita. Nah, belajar dari pengalaman yang kemarin untuk rencana yang berikutnya apa yang kemudian dilakukan oleh Bapak Menteri.

Yang berikutnya ini yang terakhir Bapak Ketua, jadi tidak banyak yang mau saya sampaikan. Yang kedua adalah dukungan untuk para BUMN kita yang terkait dengan benih Bapak Menteri. Jadi kayak benih padi kemudian terutama yang jagung karena sekarang hampir mau masuk di musim tanam jagung. Rata-rata yang dikenal mereka inikan kayak pioneer sama bisi. Tetapi kalau kemudian mengingat itu dari mana inikan sebenarnya juga benih yang bukan diproduksi oleh kita. Apakah kita tidak cukup punya confident atau kepercayaan kepada benih yang dihasilkan oleh kita sendiri. Itu saja sih, jadi kalau memang kita punya benih bagus ini harus dijadikan komitmen politik dan juga political will dari Bapak Menteri untuk mendorong bahwa bantuan itu ya kita utamakan dari benih yang bisa kita produksi tetapi tentu syaratnya harus bagus dan cocok dengan lokasi yang mau ditanam.

Terima kasih Bapak Menteri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Bapak Panggah, silakan Bapak Panggah. Habis Bapak Panggah, Bapak Dedi Mulyadi.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Terima kasih Bapak Ketua atas kesempatannya.

Saya menyambung dari apa yang disampaikan rekan-rekan sebelumnya terkait dengan pagu anggaran. Nah, ini memang besar kecilnya relatif, kalau Rp18,4 triliun kalau dibandingkan dengan anggaran dulu di Kementerian Perindustrian cuman Rp2,5 triliun ini besar sekali. Namun demikian, saya kira kalau kita lihat dari scoop Kementerian Pertanian yang begitu luas anggaran Rp18,4 triliun itu juga relatif kecil. Jadi kalau maju ditambahkan tadi minta tambahan Rp10 triliun itu juga wajar-wajar saja. Pertanyaannya seberapa efektif sebenarnya pemakaian anggaran itu dapat diimplementasikan di dalam program-program yang valid, program-program yang konkrit. Karena saya lihat ini Kementerian Pertanian ini scoop-nya sangat luas Bapak Ketua, Bapak Menteri. Mulai dari pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, betapa luasnya scoop dari Kementerian ini.

Sementara banyak direktorat jenderal atau sektor yang masih tidak tertangani. Saya ambil contoh misalnya di sektor perkebunan Pak, perkebunan ini di kopi saja kita produksinya itu tidak lebih dari 700 atau 800 kilo gram per hektar biji kopi, best practice-nya itu 2 ton. Kemudian juga kakao kita itu juga produktifitasnya masih sangat rendah sekitar 700-800 kilo gram per hektar. Kopi kita nomor 4 di dunia, kakao kita nomor 3, sekarang saya lihat data malah merosot jadi nomor 5 disalip oleh Kamerun, Equador, Liberia, negara-negara yang baru muncul, teh lebih parah lagi. Teh kita merosot dari nomor 3 menjadi nomor 7 di dunia, meskipun lahannya kita rangking nomor 6 di dunia. Nah, ini gambaran-gambaran yang sebenarnya potensi sangat besar tetapi terlantar. Ini yang saya agak miris terus terang, saya ngomong agak miris ini karena kemerosotan yang terus terjadi di komoditi perkebunan yang sementara tadi disampaikan oleh Bapak Menteri, ekspor kita meningkat saya kira ini dari sektor perkebunan kebanyakan terutama mungkin juga sawit, baru sawit saja yang jawara. Itupun saya kira berkat dari masa lalu yang mendapatkan privilege banyak sekali dan juga pemain-pemain besar yang punya kontribusi. Kita jujur itu memberikan kontribusi yang sangat besar.

Nah, ini saya kira kita tidak keberatan atas anggaran yang besar atau perjuangan untuk meningkatkan anggaran. Tapi kita jadi ragu apakah betul-betul efektif peningkatan anggaran tersebut. Sementara masih banyak soal terkait dengan pangan misalnya impor jagung, impor gula, impor beras, kemudian impor daging. Dan saya juga menekankan satu hal tadi disampaikan oleh Ibu Alien masalah bawang putih. Nah, ini juga menjadi soal lagi kebetulan ini memang menjadi potensi di Dapil saya, di daerah Temanggung dan Wonosobo. Ini betul-betul mohon ini bisa di-address atau diperhatikan bagaimana solusinya. Karena memang panennya memang betul Bapak Ketua, itu kecil-kecil gitu apakah itu sebab bibitnya, apa sebab pupuknya, apa sebab tanahnya itu harus dicari apa sebabnya, faktanya memang kecil-kecil. Sementara bawang impor ini memang besar-besar, apakah kita tidak bisa produksi bawang seperti itu. Nah, ini apakah kebijakannya betul kalau harus ada wajib tanam bagi para importir dan lain-lain. Apa masalah bibit itu, tolong itu diperhatikan apa ini masalah bibit apa masalah pupuk.

Saya kira saya tidak bisa panjang karena memang waktu yang terbatas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, kalau bisa apa perkebunan ini mungkin gagasan besarnya apa perkebunan jadikan kementerian tersendiri. Seperti di Malaysia itu jelas, saya waktu dulu di Kementerian Perindustrian ketemunya ya Dirjen Sawit bahkan ada Dirjen Kakao hanya produksi sedikit itu ada Dirjennya, itu juga mengherankan juga. Itu artinya memang secara kelembagaan mereka lebih fokus kepada komoditi-komoditi yang memang menjadi potensi kita.

Saya kira itu Bapak Ketua, yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Saya berharap ada Kementerian Perkebunan dan Menteriya Bapak Panggah dari Fraksi Golkar.

Selanjutnya Bapak Dedi Mulyadi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih.

Bapak Ketua, Bapak Menteri yang saya hormati.

Yang pertama, persoalan area tanah pertanian. Sekuat apapun kita berteriak tentang penyusutan areal tanah pertanian tidak akan niat kalau tidak ada kebijakan yang kita komitmen. RUTR-RUTR di setiap daerah itu sudah mengkavling wilayahnya masing-masih dan merubah lahan produksi yang paling berat itu untuk property karena sekali ngambil itu luas-luas, 100 hektar, 200 hektar, 300 hektar, 1000 hektar dan itu ada pada lahan-lahan subur. Dampaknya adalah bukan hanya tanah yang diambil untuk properti tapi terpotongnya aliran irigasi karena irigasi tidak mungkin melewati areal perumahan, maka sawah di hilirnya menjadi mati. Sehingga menurut saya adalah Bapak Menteri segera berkoordinasi di Ratas agar Presiden mengeluarkan Perpres yang mengatur pada semua daerah tidak lagi memberikan ijin terhadap berbagai areal pertanian strategis yang produktif untuk kepentingan diluar kepentingan pertanian. Karena kalau ngomong pakai logika apapun itu tidak akan berjalan. Dan karena apa? karena kita menghadapi darurat pangan dan itu juga berhasil kan kemarin, misalnya di daerah-daerah diatur anggarannya untuk COVID sekian persen kan bisa ditaati, inipun bisa ditaati kalau kita katakan bahwa ini pangan kita darurat dan caranya adalah didorong produksi yang baik dengan menyelematkan areal pertanian. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah bahwa sebelum kita bermimpi membangun sawah baru apakah di Kalimantan atau di tempat manapun lebih baik segera Kementerian Pertanian bikin rapat dengan Kementerian Kehutanan, kan ada Dirjen Perkebunan untuk dengan PTPN, BUMN untuk memanfaatkan ruang perhutani-perhutani PTPN yang hari ini terbuka ditebangin pohonnya tetapi tidak ditanamin lagi karena tidak ada modal, perusahaannya kehabisan biaya produksi. Kita arahkan untuk segera pada bulan November nanti untuk ditanami secara bersama-sama dan itu jumlahnya sangat kalau menurut saya lebih 100 ribu hektar. Dengan nilai produksi sangat tinggi kan Kementerian Pertanian sudah punya Litbang.

Kemudian yang fokus berikutnya adalah kalau kita ingin mengejar target produksi maka anggarannya fokus terhadap produksi. Anggaran kita fokuskan saja pada produksi, kalau peternakan ya pada produksi peternakan dengan mencari bibit-bibit unggul, harganya yang memadai dan kompetitif,

kemudian segera didistribusikan kepada peternak, atur alur penjualannya dengan baik. Karena saya juga sama peternak lokal, jadi yang dialami kami peternak lokal itu domba, sapi dan sejenisnya itu kami itu bisa untung dengan baik kalau musim qurban karena bisa menjual dengan uangnya cash langsung dibeli oleh pembeli yang akan berqurban. Tapi kalau di hari-hari biasa dijualnya sama bandar itu dianjuk, kadang-kadang tidak dibayar itu yang dialami oleh para petani lokal karena mereka tidak menguasai pasar karena hampir semua pasar daging dikuasai oleh pengusaha besar. Sehingga kenapa tidak berminat untuk memelihara karena memang rugi kalau bicara tentang pasar, ini segera benahi oleh Dirjen Peternakan, para petani-petani lokal itu kesulitan pasar. Dia hanya mengandalkan jual kerbau itu di pasar hewan harganya murah, ini yang harus kita pahami secara benar.

Kemudian yang berikutnya adalah pada produksi pangan, kita fokuskan saja fokus kebutuhan pangan adalah bibit, pupuk, jaringan irigasi yang memadai, kemudian juga peralatan yang memadai dari mulai peralatan penanaman sampai pasca panen. Yang di pasca panen itu nanti di musim panen musim hujan itu petaninya repot, maka Bapak Ketua pernah menyarankan agar belilah alat untuk memanaskan panen itu, saya tidak tahu apa namanya itu agar petani memiliki, sehingga hasil panenanya sesuai dengan standarisasi kebutuhan Bulog atau kebutuhan-kebutuhan pasar lainnya. Petani tidak mengandalkan matahari, ini yang penting.

Yang sekarang ini prinsip penanaman sekarang petani akan kesulitan air. Nah, jaringan irigasi tidak bisa lagi diharapkan karena tidak semua jaringan itu dekat dengan jaringan sungai kecilnya, maka yang dibutuhkan oleh petani hari ini adalah mesin sedot untuk menyedot airnya yang di sungai ke bawah yang sawahnya yang di atas. Nah, ini mereka kesulitan rata-rata tidak punya alatnya nyewa lagi, kalau yang punya uang bisa nyewa, kalau yang tidak punya uang pinjam lagi. Sehingga belilah peralatan yang banyak untuk merekasin sedot yang dibutuhkan hari ini.

Nah, ini yang fokus-fokus kita sekarang sehingga anggaran-anggaran di Kementerian Pertanian yang bukan peruntukan produksi karena kita anggarannya terbatas ya kita arahkan untuk produksi, yang tidak punya produksi ya mohon maaf anggarannya diarahkan untuk produksi. Ini yang menjadi fokus usulan saya sehingga produksi yang diharapkan bisa tercapai walaupun anggarannya terbatas. Syukur-syukur anggarannya bisa diperjuangkan untuk ditambah.

Itu saja, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Dedi yang mulia Pimpinan Komisi IV DPR RI.

Selanjutnya Bapak Ansy Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Selamat siang,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian, Bapak Sekjen dan Jajaran Eselon I.

Saya sudah baca materinya, materi ini secara umum ada dua, pertama evaluasi program pelaksanaan yang sudah berlangsung dan yang kedua adalah proyeksi mengenai kegiatan kedepan. Point pertama mengenai menyangkut evaluasi program pelaksanaan APBN Tahun 2019 penyerapannya hampir 90% bagi saya it's oke, tetapi yang saya ingin tegaskan adalah bahwa yang harus diukur dan dievaluasi itu adalah soal efektifitas Pak. Sejauhmana program-program yang sudah berjalan itu memang tepat sasaran dan tepat guna, sehingga kemudian tidak hanya melihat berapa persen anggaran yang sudah diserap akan tetapi apa korelasinya terhadap kesejahteraan petani, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan produktifitas.

Yang kedua, terkait dengan realokasi dan refocusing yang kita bicarakan kemarin saya mohon penjelasan atau rinciannya terutama terkait dengan realisasi anggaran setidaknya sampai bulan Juni, terutama terkait dengan penggunaan anggaran untuk pandemic COVID-19 ini. Saya ingin mendapatkan gambaran soal itu.

Selanjutnya terkait dengan hasil pemeriksaan BPK ada beberapa rekomendasi yang tampaknya belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian. Saya ingin mendapatkan penjelasan juga lebih jelas soal itu.

Yang berikutnya terkait dengan rencana kerja kedepan Pak. Konkrit saja Pak, anggaran mau besar atau kecil dasar yang utama itu adalah pada paradigma kebijakan Kementerian Pertanian. Kalau paradigmanya benar alokasi anggaran yang besar pun tidak masalah. Selama ini yang saya lihat itu adalah kita ini masih menyandarkan menjadikan penopang untuk memenuhi kebutuhan pangan atau produksi kita itu dari impor, dari produk dari luar.

Nah, menurut saya hari ini mainset atau arah kebijakan itu harus berubah. Momentum pandemi COVID-19 ini harusnya memutar arah dan orientasi visi besar kita yang diperkuat harusnya produksi. Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Kang Dedi Mulyadi sebelumnya, karena itu dalam menerjemahkan anggaran di Kementerian Pertanian itu harusnya yang produksi inilah yang mendapatkan anggaran lebih besar. Saya kasih contoh saja disini anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Rp1,1 triliun dan Hortikultura yang urus buah-buahan, sayur dan lain-lain yang mayoritas kita impor itu Rp900 miliar, ketahanan pangan Rp800 sekian miliar. Bandingkan dengan balitbangtan yang angkanya sampai Rp1,7 triliun dan

BPSDM Rp1,3 triliun. Nah, menurut saya ini ada problem dalam paradigma orientasi menyusun kira-kira kofadis Kementerian Pertanian kita. Menurut saya yang harus mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar itu adalah pada Ditjen yang berurusan dengan sektor-sektor produksi.

Yang berikut, kita tahu bahwa dalam pandemic ini FAO (Food Agriculture Organization) itu sudah bicara bahwa akan terjadi katakanlah kebijakan banyak negara melakukan politik otarkis. Mereka akan berorientasi kedalam negara kita memenuhi produk-produk domestic mereka. Negara-negara produsen atau eksportir itu akan menahan produk-produk mereka. Saya ingin tahu dengan adanya pembatasan ekspor seperti ini apa kebijakan dan langkah konkrit yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian kita pada saat negara-negara eksportir itu menahan produk mereka.

Yang berikut, disitu disebutkan akan ada impor 3 komoditas penting, bawang putih, daging sapi dan daging kerbau dan juga gula pasir. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan pembatasan ekspor, kita kaitkan dengan ketergantungan impor kita yang terlalu besar selama ini kepada pangan-pangan dari luar negeri dan kita bicara soal kemandirian pangan kita ini bagaimana Kementerian Pertanian ini melihat hal ini dan kemudian kebijakan kedepannya seperti apa.

Terakhir, saya melihat ada prioritas di berbagai Kementerian termasuk Kementerian Pertanian menyangkut pengembangan wilayah untuk mengurangi tingkat kesenjangan, menjamin pemerataan dan peran terhadap kemiskinan. Tetapi terkait dengan program ini jujur saya belum melihat ada sebuah kebijakan turunan atau agenda kerja konkrit dari Kementerian Pertanian. Yang muncul dalam Kementerian Pertanian itu adalah fokus percepatan tanam padi di 8 provinsi. Saya ingin katakan kalau kita buka indeks pembangunan manusia dalam berbagai indikator ataupun baru saja dikeluarkannya Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal itu kesimpulannya kemiskinan Indonesia itu kemiskinan petani, kemiskinan Indonesia itu adalah kemiskinan di sektor pertanian. Dan mayoritas daerah miskin itu ada di timur Indonesia, Papua, Nusa Tenggara Timur dan sebagainya. Saya ingin mendengarkan penjelasan dari Kementerian Pertanian terkait dengan kebijakan mengurangi angka kemiskinan, kesenjangan dan pemerataan pembangunan dalam upaya ini kira-kira langkah konkritnya itu apa. Tadi sempat disinggung soal diversifikasi pangan, saya konkrit saja dari 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur ada 13 kabupaten yang mengalami yang masuk dalam daerah tertinggal. Kira-kira Kementerian Pertanian ini punya program apa konkrit dalam hal ini. Kalau belum ada saya usulkan Pak, kencangkan jagung seperti yang sudah dilakukan Gubernur kami Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, sorgum juga dikembangkan. Dan salah satu yang juga bisa dikembangkan itu adalah sentra peternakan babi Pak.

Nah, ini kira-kira beberapa usulan konkrit yang bisa saya sampaikan Pak, kalau mau membantu mengurangi kemiskinan, mau mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan ini.

KETUA RAPAT:

Cukup Bapak Ansy Lema?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Yang harus dibenarkan ini adalah paradigma dasarnya dulu.

Terima kasih Bapak Sudin.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Bapak Daniel Johan Pimpinan Komisi IV DPR RI yang mulia.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-KB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Terima kasih Ketua.

Yang kita hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI segenap Anggota,
Yang kita hormati Bapak Menteri Pertanian dan seluruh jajaran Dirjen.

Bapak Menteri, dari bahan yang kita terima saya khawatir produksi pangan kita sampai Desember itu mengalami penurunan yang cukup besar meskipun data yang Bapak Menteri sampaikan kita aman bahkan untuk beras masih surplus cukup besar. Kenapa? Pertama adalah pengurangan anggaran yang cukup besar sehingga mencapai hampir Rp4 triliun. Nah, apakah itu dari pihak Kementerian sudah menghitung dampak dari berkurangnya Rp4 triliun terhadap produksi Indonesia sebesar apa.

Yang kedua adalah saya mendapat dua laporan bukan hanya dari Dapil saja Kalimantan Barat tetapi juga dari banyak daerah. Yang pertama adalah di mana-mana semua berteriak, petani berteriak masalah kekurangan pupuk. di Kalimantan Barat saja dari IRDKK yang disampaikan meskipun IRDKK itupun hanya 50% dari jumlah petani tetapi yang 50% dari jumlah petani IRDKK disampaikan yang direalisasikan hanya 30%, berarti 70% IRDKK petani kita itu tidak mendapat pupuk dan mereka sangat kesulitan. Sementara mulai bulan depan mereka mulai menanam. Dan ini juga teriakan yang sama dari berbagai daerah di Indonesia. Dan tentu sangat langkanya pupuk ini tentu akan berakibat terhadap produksi.

Yang ketiga, juga banyak laporan yang kemarin itu selain harga jual yang anjlok tetapi juga hama, hama yang cukup massif membuat petani mengalami kerugian. Kalau dari data yang ada selama 10 tahun ini rata-rata yang terserang ham itu mencapai lebih dari 400 ribu hektar. Kalau per hektra 2ton saja itu sudah merugikan nilainya Rp3,2 triliun petani kehilangan pendapatannya. Contoh yang besar misalkan di Lampung bahkan hama itu mencapai 10% dari luas lahan yang ada. Terus saya pikir ini benar-benar harus diperhatikan, seperti yang sudah disampaikan kita jangan terlalu mikir buka lahan baru, lahan yang ada saja kita selamatkan. Setelah lahan yang

ada diselamatkan baru kita pikirkan bagaimana mengembangkan lahan yang baru.

Saya ingin usul Pak, ini saya khawatir ini semakin kedepan persoalan semangat Pemerintah untuk memberikan subsidi kepada petani semakin hilang, seakan-akan subsidi itu sesuatu yang jahat, sementara bagi kami subsidi sesuatu yang wajib menjadi kewajiban konstitusi yang dilimpahkan negara kepada Pemerintah. Nah, kita harus mengantisipasi agar ada program seperti entah kabupaten pupuk mandiri atau apa. Saya rasa ini bisa menjadi salah satu program strategis Kementerian Pertanian yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kita bikin pilot project masing-masing di provinsi bagaimana mengolah sampah menjadi pupuk. Nanti para petani bisa menukarkan hal-hal yang bisa dijadikan pupuk sehingga dia tidak harus membeli tinggal sistem tukar dan sampahnya itu diolah.

KETUA RAPAT:

Cukup Bapak Daniel?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-KB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Subsidi semakin berkurang produksi petani semakin berteriak semakin kasihan.

Terakhir Pak, di Kementerian tahun ini salah satu fokusnya adalah sumber daya air, menyelematkan sumber daya air untuk produksi. Tetapi saya lihat tidak ada itu terefleksi di dalam program. Apa konkrit program dari menyelematkan air untuk produksi, entah irigasi atau pompa air atau sumur sampai saat ini saya belum melihat. Jadi itu saja sementara.

Terima kasih Ketua, terima kasih Bapak Menteri.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Daniel.

Selanjutnya Bapak Sutrisno, tinggal saja.

Selanjutnya Ibu Ema, silakan.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang kami hormati,
Bapak Menteri beserta jajaran.

Langsung saja ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, yang pertama terkait saat ini kita akan memasuki semester II Tahun 2020. Kami berharap rencana program tahun 2020 yang telah disepakati ini dapat terealisasi secara optimal, sehingga mampu mendukung peran Kementan untuk menjamin stok pangan dalam negeri tetap aman. Berkait dengan stok pangan dalam negeri saat ini telah mulai musim kemarau, mungkin ada beberapa daerah yang masih mengalami musim hujan. Kami berharap Pemerintah mampu mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri terutama terhadap komoditi yang tergantung kepada impor dari luar negeri yang saat ini masih sulit dilakukan akibat pandemi COVID-19. Apakah langkah-langkah untuk menjawab persoalan tersebut.

Yang kedua, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan Pemerintah berencana melakukan ekstensifikasi pembuatan sawah di lahan gambut di Kalimantan Tengah. Program kegiatan tersebut akan dilakukan pengkajian lebih mendalam lagi terutama untuk pembukaan sawah di lahan-lahan rawa. Karena resiko lingkungannya lebih besar dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan terlebih di lahan gambut. Di sisi Pemerintah juga perlu meyakinkan apakah SDM-nya sudah siap, menurut kami kurang efisien dari segi pembiayaan dan teknisnya. Tidak sedikit anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini. Menurut kami lebih efisien jika besaran anggaran tersebut dioptimalkan untuk intensifikasi lahan yang sudah ada dengan pengembangan bibit unggul, perbaikan saluran irigasi sehingga produktifitas meningkat. Hal ini juga melihat pengalaman program-program sebelumnya seperti program cetak sawah yang kurang optimal bahkan sampai ada temuan BPK. Saran kami sebaiknya Pemerintah hati-hati jangan sampai kondisi kegentingan stok pangan di masa pandemi COVID-19 ini dijadikan dasar untuk melaksanakan program yang tanpa kajian terlebih dahulu. Mohon penjelasan Bapak Menteri.

Yang ketiga, dalam upaya peningkatan pelayanan kepada petani telah diterbitkan program kartu tani. Hasil temuan dilapangan banyak kendala yang dihadapi antara lain ketersediaan infrastruktur dan jaringan komunikasi, alat untuk memindai kartu dan ketersediaan jaringan internet. Berdasarkan regulasi dari Permentan bahwa pembagian pupuk dibagikan pada kelompok yang sudah mengajukan RDKK-nya. Dengan terbitnya kartu tani maka distribusi pupuk akan langsung kepada pemegang kartu taninya. Apakah ini tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, mohon penjelasan.

Dan yang terakhir Bapak Menteri, mohon juga ini diperhatikan dari awal kami sudah sering menyampaikan ini dan mungkin belum ada perhatian baik dari Dinas Pertanian, baik dari kabupaten, provinsi maupun dari kementerian Pemerintah Pusat terutama pada Kementerian Pertanian terkait dengan keluhan-keluhan petani yang waktu selama kami melaksanakan reses di daerah. Yang pertama, terkait hama tikus hal ini juga belum ada solusi dari pihak Kementan bagaimana bisa para petani ini dibantu untuk pengendalian hama tikus. Yang kedua, terkait dengan infrastruktur pertanian, utamanya untuk pembangunan irigasi tersier yang mana tadi sudah disampaikan oleh Bapak-bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang lain, pembangunan embung dan sebagainya. Juga yang terakhir masalah pupuk subsidi yang jumlahnya

berkurang sehingga para petani juga berharap untuk Kementan di anggaran 2021 nanti untuk menganggarkan tentang pupuk organik cair yang bisa dibagikan kepada para petani dan mereka sangat membutuhkan.

Itu mungkin Bapak Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya Bapak Sutrisno singkat Pak, karena waktunya sudah mepet juga.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Langsung saja yang pertama, evaluasi pelaksanaan APBN ini sangat penting dan strategis dalam mengukur keberhasilan Pemerintah memberikan pelayanan kepada rakyat. Mengukur bagaimana produksi yang dicapai untuk memenuhi kecukupan pangan. Permasalahannya keberhasilannya itu bukan hanya diukur besarnya anggaran tetapi dari segi anggaran. Bukan hanya diukur dengan realisasi program tapi yang paling penting adalah bagaimana capaian-capaian hasilnya. Bapak Menteri, di dalam dokumen yang Bapak sampaikan ternyata hanya menyampaikan realisasi anggaran dan realisasi program, sedangkan capaian hasil itu tidak disampaikan. Karena ini sangat penting untuk mengukur sampai seberapa jauh hasil yang dicapai selama ini dalam rangka mengukur juga bagaimana rencana kedepan. Oleh karena itu, karena dokumen ini sangat penting mohon untuk dilengkapi capaian hasilnya.

Yang kedua, tadi sudah disinggung oleh rekan dari Nasdem, penurunan capaian realisasi anggaran di 2019 yang disebabkan oleh menurunnya Dirjen PSP dan Dirjen Tanaman Pangan. Permasalahannya adalah realisasi Dirjen PSP Rp4 triliun di tahun 2019 hanya saja pagu yang di 2021 itu hanya diberikan Rp3 triliun, tahun 2019 Rp4 triliun tapi pagu indikatif di tahun 2021 hanya Rp3 triliun. Kemudian Tanaman Pangan 2019 Rp4,69 triliun di tahun 2021 Rp4,5 triliun. Padahal kedua Dirjen ini adalah penentu utama keberhasilan pangan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin peningkatan ketersediaan pangan bisa dicapai, bagaimana mungkinantisipasi terjadinya krisis pangan pasca COVID bisa tercapai manakala anggaran kedua Dirjen itu seperti itu. Usulannya adalah kaji kembali Bapak Menteri, berikan tambahan kepada dua Dirjen itu.

Kemudian yang ketiga, tentang kehevanan anggarannya paling stabil dari tahun ke tahun. Kemudian realisasinya sebagaimana disampaikan Bapak Ketua, diatas 110% ada yang 119%. Tapi ini paradog, target capaian

dagingnya dari 0,75 juta ton hanya 0,51 ton. Kemudian impor naik terus dari tahun ke tahun. Dan lebih paradog lagi di rencana di tahun 2021 halaman 15 Kementerian Pertanian menargetkan 5,51 juta ton, ini dari mana ini. terlepas dari data itu benar atau tidak benar, usul saya adalah Bapak Menteri perlu kaji kembali perlu ada strategi perubahan bagaimana menjalankan program di era otonomi daerah ini yang dulunya menggerakkan sekarang mendorong. Memanfaatkan kepala daerah, saya meyakini kedepan kita bisa swasembada daging manakala daerah diberdayakan.

Terakhir Bapak Ketua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani. Sesuai Pasal 3 huruf D perlindungan petani itu adalah melindungi petani dari fluktuasi harga. Sampai hari ini belum ada kebijakan dari Pemerintah bagaimana melindungi para petani di saat harga berfluktuasi sehingga terjadi sayur dibuang seperti di Malang. Sayur-sayur pada busuk tidak ada yang beli....

KETUA RAPAT:

Bapak Sutrisno cukup ya.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Jadi Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat, Kementerian, ini sudah waktunya kita Ishoma. Kita break kembali keruangan ini pukul 13.30 WIB, karena saya berharap jam 17.00 WIB sudah bisa selesai semua kalau bisa jam 16.00 WIB lebih bagus karena inikan baru pembahasan awal. Saya skorsing dulu nanti kembali lagi pukul 13.30 WIB.

(RAPAT DISKORS)

(SKORS DICABUT)

Pak Guntur, kalau tidak ada Pak Guntur Bapak Bagus Adi.

F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Ada.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Guntur dulu, silakan.

F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Ketua Komisi, Pimpinan dan para Anggota semuanya yang saya hormati,
Bapak Menteri dan segenap jajarannya.

Sudah banyak disampaikan teman-teman, saya hanya ingin sedikit menambahi saja Pimpinan. Mengenai masalah-masalah keberhasilan 2019 saya menyampaikan terima kasih yang ini semuanya justru membuahkan hal-hal yang baik untuk persiapan kita pada akhir tahun 2020. Hanya satu yang saya pertanyakan sesuai dengan Bapak Panggah tadi saya agak terheran kalau toh bawang putih ini masih bisa dipaksakan untuk impor, padahal kondisi-kondisi sekarang kalau toh bisa masala-masalah impor ini sebanyak mungkin dikurangi. Saya melihat dataran tinggi musim seperti di Temanggung ini banyak sekali di Indonesia, Temanggung ini sudah 25% penghasil bawang putih di Indonesia, apakah ini tidak mungkin untuk kita bagaimana membuat para petani ini mandiri di dalam mengurangi impor ini.

Yang kedua Ketua, masalah-masalah yang berkaitan dengan program perluasan hektar, 500 kalau tidak salah dari BNI. Saya melihat dari pengalaman di Riau itu harusnya panen 3 kali tetapi akhirnya juga hanya panen sekali dan habis itu juga lahannya sudah hilang sama sekali. Akibat tidak adanya keterlibatan Pemerintah Daerah di dalam rangka ikut membangun irigasi dan segala macam pasang air laut, sehingga begitu selesai panen sekali sudah kembali seperti asal panen pasang air laut masuk ke dalam. Menurut saya prioritas-prioritas yang seperti ini Ketua, perlu di dalam rangka kita mendekati kepada pandemi ini lebih diberdayakan kepada bagaimana kita mengatasi COVID ini.

Yang ketiga Ketua, terkait program tadi Bapak Menteri menyampaikan ini bukan program tapi ini sasaran yang betul-betul kondisinya sangat darurat. Tetapi menurut saya Bapak Menteri, program ini adalah suatu ukuran keberhasilan. Apapun juga keberhasilan terukur daripada sasaran-sasaran program itu sendiri. Bapak sering berbicara kepada kami-kami sering berbicara langsung dengan Bapak Presiden bahwa ketahanan pangan petani ini sangat penting di dalam rangka menyangga kehidupan bangsa Indonesia. Tetapi Bapak Menteri proses-proses penganggaran ini memang haknya ada di DPR RI hak bugeting, tetapi proses awalnya kan juga tetap lewat kordinator Kementerian sehingga apa yang Bapak sampaikan kepada kami-kami yang bicara langsung dengan Presiden kelihatannya Pemerintah kok belum konsisten untuk mendekati penanganan masalah-masalah pandemik ini antara kebijakan petani dan kebijakan Pemerintah.

Itu saja Ketua sebagaimana.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih senior.

Selanjutnya Bapak Bagus Adhi, silakan Bapak Bagus.

Bapak Bagus sudah nyambung belum?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Selamat siang Pimpinan.

Jadi mencermati anggaran yang sudah terlaksana pada prinsipnya serapannya sudah bisa kita terima. Namun, menurut saya tadi serapan yang terlaksana tersebut kita belum melihat dampak yang diakibatkan oleh salah satunya adalah tersebut. Jadi sebenarnya dari anggaran yang sudah terlaksana tersebut banyak hal yang bisa dilaksanakan, banyak hal yang sudah bisa kita kaji. Oleh sebab itu, menurut saya kepada Bapak Menteri bagaimana kita mewujudkan badan evaluasi terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan. Tadi Ibu Endang juga sudah sampaikan bahwa pentingnya badan pengkajian. Dan pada kesempatan ini saya berpendapat bahwasanya pemberdayaan terhadap badan pengkajian itu harus kita berikan pengkajian yang lebih, sehingga Bapak Menteri dapat hasil kajian dan tidak hanya menerima dari Dirjen-dirjen terkait namun cukup mendapat laporan dari SDM. Jadi dari kajian itu tentang bagaimana Alsintan, bagaimana tentang bibit dan sebagainya. Karena temuan di lapangan pada saat ini di masa COVID ini saya sangat menyayangkan sekali BPTP. BPTP yang mempunyai teknologi, yang mempunyai ilmu saat ini harus berdiam diri karena tidak ada anggaran. Bahkan di Bali ada satu yang sudah dilaksanakan oleh BPTP, yaitu bagaimana membuat bisa, karena tidak ada anggaran terus terbengkalai bahkan terhenti di tengah jalan. Nah, ini perlu sekali mendapat kajian dari teman-teman, yaitu Bapak Menteri bagaimana Bapak Menteri cukup kepada satu lembaga memberikan kajian atau laporan-laporan yang memaparkan terkait dengan keberhasilan dari masing-masing bidang tersebut. Apalagi saya mendengar Bapak Menteri, semangat sekali dengan ekspor ini. Nah, ekspor ini bisa kita lakukan dengan lebih baik bilaman kajian ini jelas dan bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah.

Nah, untuk itu saya juga memberikan saran terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Penting sekali Bapak Menteri membangun lab di setiap desa, sehingga teman-teman di badan kajian ini bisa melaksanakan kajiannya membuat skala desa tersebut. Desa A apa dia sudah swasembada pangan, apa hasil jagungnya, apa hasil panenya, apa hasil benihnya. Ini Bapak Menteri ini tidak akan sibuk akan hal itu yang pada kesempatan ini terkait dengan situasi yang terjadi dalam krisis pangan ini, pada COVID ini Bapak Menteri juga harus bisa mendapatkan laporan yang detail terkait dengan mana daerah-daerah yang rawan pangan, agar Bapak Menteri bisa cepat laporan yang detail yang sesuai dengan lapangan kalau badan pengkajian ini ada di setiap desa ataupun secara maksimal berjalan. Dan untuk itu, saya memberikan suatu catatan bahwa langkah, gerak dan pemikiran yang kita sudah laksanakan dengan menggulirkan setiap banyak anggaran kepada masyarakat penting kita lakukan kajian secara menyeluruh. Dan untuk itu kita percayakan kepada badan kajian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini.

Dan terkait dengan subsidi pupuk Bapak Dirjen dan teman-teman di Komisi IV DPR RI, menurut saya perlu kita kaji lebih dalam lagi apakah

subsidi pupuk ini tetap kita laksanakan. Apakah tidak sebaiknya subsidi pupuk ini kita ganti kepada subsidi pasca panen. Nah, kalau kita melakukan subsidi pasca panen ini jelas-jelas kalau menurut pengamatan saya secara pribadi itu kesejahteraan masyarakat itu langsung tersentuh. Kepastian daripada petani itu sudah di depan.

KETUA RAPAT:

Bapak Bagus Adhi cukup?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Pemerintah terhadap kinerja-kinerja yang sudah dilaksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Menteri dan kepada Pimpinan yang saya hormati, mudah-mudahan kalau kita berdayakan badan kajian ini dengan baik maka saya yakin pertanian di Indonesia akan lebih baik dan ekspor bisa kita tingkatkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak Bagus Adhi semangat sekali dengan Labnya, yang dipikirkan dari awal yang lebih penting adalah satu desa satu penyuluh itu yang lebih penting lagi.

Silakan Bapak Bambang Purwanto.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Langsung saja biar singkat, rencana pembukaan lahan sawah di Kalimantan Tengah. Saya selaku Dapil Kalimantan Tengah memberikan apresiasi kepada Kementerian dan Pemerintah. Namun, perlu kami sampaikan barangkali ini sebagai reperensi bahwa kami dulu pernah melakukan program sejuta hektar itu juga atas perintah Presiden. Kemudian transmigrasi melakukan kajian dan penelitian setelah itu kita lakukan implementasi di lapangan dan itu kami lakukan secara terpadu. Namun, hasilnya juga tidak terlalu menggembirakan. Oleh karena itu, saran saya Bapak Menteri dan jajarannya untuk mengambil data lama untuk melengkapi program yang baru ini. Kira-kira apa yang belum dilaksanakan atau kelemahan apa pada saat itu bhisa ditutupi program yang baru ini sehingga hasilnya dapat dirasakan. Kemudian saya juga titipkan bahwa program satu juta hektar itu dulu sudah membuka 45 desa. Dan ini sudah mulai mereka tanam cuman tidak terlalu intensif karena terkait dengan modal. Barangkali itu juga dimasukkan program yang 45 desa itu. Saya kira itu tingkat keberhasilan lebih dapat diharapkan.

Kemudian yang kedua, ini isu yang sangat strategis dan barangkali nanti dugaan saya ini akan mencuat. Terkait dengan petani-petani kita yang sampai saat ini tingkat pentahapannya baru sampai tebas, terbang, bakar, tanam. Nah, selama ini kurang lebih 4 tahun mereka sudah tidak bisa menanam. Pas kemarin reses saya sempatkan berkunjung ke desa-desa, pada petani yang kami maksud lumbung mereka sudah kosong semu, yang dulu mereka tiap KK itu punya lumbung padi. Nah, saya khawatir kalau ini dilarang terus sementara mereka stock makannya sudah tidak ada, mereka nekad ketimbang mati kelapangan lebih baik kami nekad bakar lahan. Untuk itu, kami berharap agar Bapak Menteri mengantisipasi jangan sampai ini kita terlambat untuk melakukan penanganan walaupun sebenarnya sudah ada alat yang dititipkan di dinas kabupaten dan alat yang lainnya. Tetapi petani diminta untuk membawa dengan lambat kedesaanya, bayar operator sendiri, solar sendiri, nah ini mereka tidak mampu, sehingga jadi masalah.

Kemudian yang ketiga, terakhir ini Bapak Pimpinan, alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini sebenarnya sangat marak karena para petani ini sebenarnya sederhana, ketika mereka menggeluti tanaman pangan yang sebenarnya hasilnya lebih baik daripada sawit, karena saya pernah mencoba itu, tetapi mereka tetap alih fungsi lahan, karena apa? karena biaya produksinya sangat mahal. Pupuk subsidi ada tetapi pestisida ini mahal sekali sehingga hasil produksinya dibandingkan dengan biaya produksi itu ada harga gabah tidak seimbang, sehingga mereka memilih alih fungsi lahan.

Saya kira itu Pimpinan yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak Bambang, minta tolong data tadi yang disebutkan di berikan kepada Kementerian Pertanian untuk memperkaya data. Tapi saya jelaskan disini, ini bukan buka lahan Bapak Bambang, tadi Bapak Menteri sudah menjelaskan itu lahannya sudah ada cuman aliran airnya tersier, sekundernya yang macet. Ini yang akan diperbaiki bukan buka lahan baru.

Selanjutnya Bapak Azikin Solthan silakan.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Bapak Menteri beserta rombongan yang sangat kami hormati.

Setelah kami membaca hasil pelaksanaan APBN tahun 2019 dan pembahasan isu-isu actual yang disampaikan oleh Bapak Menteri, maka pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa target Bapak Menteri untuk

masa tanam kedua 12,5 sampai dengan 15 juta ton beras. Kondisi di Sulawesi Selatan Pak, yang merupakan penyanggah beras di Indonesia ini terjadi bencana banjir di beberapa daerah yang potensial untuk tanaman padi. Oleh sebab itu Bapak Menteri, ingin saya sampaikan bahwa perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar segera melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka pengamanan pangan pada musim tanam kedua 2019. Ada beberapa indikasi tersier dan sekunder yang rusak tapi yang sekunder ini mungkin bisa dilakukan penanganan-penanganan secara cepat sehingga petani bisa menanam kembali. Banjir ini menghantam beberapa areal sawah yang baru saja ditanami oleh petani.

Yang kedua, saya dari awal saya katakan bahwa sektor pertanian, perikanan dan kehutanan adalah salah satu basic ekonomi masyarakat yang ada di daerah. Ini berbanding lurus dengan penerimaan asli daerah yang banyak memberikan kontribusi adalah sektor pertanian. Oleh sebab itu, kami mendukung untuk penambahan anggaran dalam rangka memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani.

Demikian penyampaian singkat kami Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Azikin.

Selanjutnya Bapak Safrudin dari NTB.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua dan Bapak Menteri.

Saya ingin menyampaikan Bapak Menteri, bahwa mungkin saya ingin mendorong percepatan sertifikasi beberapa benih atau beberapa tanaman yang sekarang sedang sangat dikenal di Indonesia seperti Porang dan lain-lain. Ini agak susah mendapatkan karena belum mendapatkan sertifikasi dari Pemerintah dalam hal ini pertanian, mungkin bisa dipercepat sehingga ini bisa digeluti oleh masyarakat dalam rangka pembudidayaan dan lain-lain.

Dan yang kedua tadi saya setuju juga bahwa masalah benih, benih itu disesuaikan dengan lokasi, seperti di Nusa Tenggara Barat ini di Pulau Sumbawa itu Bisi 18 dan Pioner dan lain-lain. Dan yang terakhir, Bapak Menteri mungkin bisa didiskusikan di internal Departemen Pertanian bahwa masalah nasib dari TKHL (Tenaga Kerja Harian Lepas), baik yang swadaya maupun yang sukarela. Jadi bisa tidak seperti dengan perikanan itu ditarik ke pusat, kalau kehutanan itu ditarik ke provinsi. Kalau saya cek dilapangan bahwa PPL kita itu seperti orang yang tidak punya induk, ini mungkin menjadi

catatan buat Bapak Menteri untuk menjadi respon bagi orang-orang yang bekerja buat kita dilapangan.

Saya kira itu saja Bapak Ketua.

Terima kasih Bapak Menteri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Selanjutnya Bapak T.A. Khalid dari Aceh.

Silakan.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua Sudin yang saya muliakan, sudah rindu sekali sama anda Ketua ini,

Kemudian para Pimpinan yang saya rindukan,

Dan juga Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang kami hormati,
Teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI yang kami rindukan.

Mengingat waktu beberapa teman tadi telah menyampaikan memang, malah sebagaimana yang telah disampaikan sebagian besar teman-teman Anggota Komisi sangat terkagumi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri di pembukaan awal dan malah saya sendiri juga sangat terkesima dengan semangat juang Bapak Menteri yang luar biasa, sehingga butuh anggaran yang luar biasa.

Saya Anggota Komisi IV DPR RI A-60 juga sangat mendukung semangat juang Bapak Menteri tersebut agar realisasi atau anggaran kedepan semakin besar. Apalagi Bapak Menteri tadi menyampaikan bahwa target perjuangan kita bukan hanya sekedar untuk realisasi program atau proyek yang berorientasi kepada Maka pada kesempatan ini saya secara pribadi dan Anggota Komisi IV DPR RI mendukung penuh keinginan Bapak Menteri tersebut bagaimana optimalisasi anggaran dan lain sebagainya dapat maksimal dan juga dengan harapan sebagaimana yang telah teman-teman sampaikan tentang program. Karena yang paling penting bagaimana output sehingga keinginan Bapak Menteri menyampaikan bahwa ini bukan hanya sekedar program yang berorientasi kepada proyek tapi itu harus mampu dilaksanakan dengan konkrit dengan agenda-agenda yang konkrit, dengan yang terukur sehingga jelas outputnya ada di setiap Rupiah yang kita keluarkan. Karena saya melihat sampai hari ini semangat Bapak Menteri luar biasa tetapi tidak paralel dengan kondisi di Kementerian, di teman-teman kesekjenan sehingga banyak hal, yang program yang selama ini misalnya seperti di hortikultura. Program kita bagi-bagi bibit, output bagi-bagi bibit

dapat, ada yang mau dikasih kepada Anggota Dewan anggaran sekitar 300 bagi-bagi bibit, hanya sekedar bagi-bagi bibit saja.

Kalau dia tidak kita tumpang, kita bantu dengan yang lain mungkin bibit itu kita, ini perlu perhatian Bapak Menteri agar semangat Bapak Menteri itu terimplementasi dengan baik di tingkat Kementerian. Misalnya tidak usah jauh Pak Menteri mengejar target target produksi yang tinggi dan harapan kita kemarin pasca corona kita tidak boleh berhenti, maka saya sebagai Anggota Komisi IV DPR RI yang kebetulan sudah 3 bulan di Aceh ada satu kawasan ini sebagai contoh Bapak Menteri untuk menjadi perhatian saja, ada satu kawasan yang di kabupaten di Aceh Jaya Dapilnya Bapak Salim Fahri disitu sedang replanting sawit. Setelah di bersihin punya lahan sekitar 200 hektar kita mau tanam jagung saya ajak masyarakat disitu yang tidak imbas corona, kelompok tani kita ajak mereka bersedia kemudian mereka katanya tidak ada pupuk, saya. Mereka bantu pupuk, kemudian saya telepon Bapak Suhandi saya minta bibit sampai hari ini dua bulan ini bibit tidak masuk-masuk Pak. Jadikan semangat juang yang tidak paralel. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi kita tahu tidak mungkin seorang Menteri mampu membuat Indonesia ini makmur dari segi pertanian tanpa dibarengi teman-teman kedirjenan.

Yang kedua mengingat waktu, saya juga ingin menagih Bapak Menteri ini sebagaimana janji 100 hari jatah pertanian sehingga muncul pertanyaan saya menyangkut dengan apa yang pernah disampaikan, maka perlu saya sedikit penjelasan tentang stimulus untuk petani yang sekarang 600 yang itu jumlahnya 2,4 juta petani miskin, yang katanya Rp300 ribu dalam bentuk uang dan Rp300 ribu dalam bentuk Saprotakan. Ini saya di Aceh sudah 3 bulan Bapak Menteri, tidak mendengar isu ada realisasi itu, entah mungkin saya yang tidak dapat itu atau mungkin penyalurannya yang begitu senyap. Ini mohon Bapak Menteri.

Yang ketiga, menyangkut dengan apa yang disampaikan saya juga ingin menyampaikan sedikit masalah cetak sawah. Kalau memang tadi dari laporan BPK saya tidak melihat Aceh, tapi jujur saya ingin sampaikan di Aceh hampir semua daerah cetak sawah bermasalah. Ini menjadi perhatian Bapak Menteri karena apapun saya melihat teman-teman Komisi IV DPR RI sangat sependapat bagaimana kita optimalisasi pertanian, tapi mari benar-benar sebagaimana yang disampaikan Bapak Menteri satu Rupiah pun harus kita perhitungkan output hasil produksinya.

Terima kasih Bapak Ketua, mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Pak Khalid dan teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI disini saya menjelaskan sedikit, bahwa yang 2,7 itu belum disalurkan karena masih

diverifikasi di Kementerian Sosial. Jadi Bapak Menteri ini hanya menyajikan data dicek ulang disana apakah terjadi tumpang tindih dengan Kementerian Sosial baik itu Bansos maupun kartu belanjanya. Belum ada satupun yang diberikan, supaya teman-teman tahu jangan sampai informasinya salah.

Selanjutnya Bapak Hasan Pimpinan yang mulia masih di kampung Pak Hasan ya. Bapak Budi silakan Pak Budi, Hasan dulu deh karena lebih duluan Bapak Hasan yang daftar ini.

Silakan Bapak Hasan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-KB (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI,
Bapak Menteri dan jajarannya.

Yang pertama, saya mengapresiasi pada Kementan ini yang telah mampu membuat optimis rakyat Indonesia terhadap paparan bahwa Indonesia mampu memproduksi beras dan mampu mensuplay kebutuhan rakyatnya, itulah yang pertama apresiasinya.

Yang kedua, saya mengusulkan dan mohon ada rekomendasi Komisi IV DPR RI nanti agar supaya kita ada data pembandingan sebagaimana yang disampaikan oleh para Bapak dan Ibu sekalian Komisi IV DPR RI. Data bukan hanya dari BPS, data internal dari Kementan yang mungkin tidak akan terlalu lama karena pasukan Kementerian Pertanian ini cukup banyak sampai dengan Kecamatan. Coba manfaatkan PPL itu untuk mendata sekali lagi lahan produktif dan tidak produktif untuk meyakinkan Komisi IV DPR RI dan rakyat pada umumnya agar supaya datanya tidak BPS saja. tentunya BPS ini datanya cukup lama belum terupdate dengan baik saat Bapak Menteri Syahrul Yasin Limpo ini diberi amanah menjadi Menteri. Itu yang kedua.

Yang ketiga, konsolidasi internal. Jadi bagaimana data milik Kementan sendiri. Yang ketiga, tentunya saya ingin membangun pro kerakyatan tentang politik anggaran Kementan tahun 2021. Sebagaimana tadi telah banyak dipersoalkan oleh seluruh Anggota Komisi IV DPR RI tentang cetak sawah baru. saya lebih tertarik bagaimana memanfaatkan lahan yang sudah ada agar supaya seluruh target tanaman yang menjadi keinginan dan cita-cita Bapak Menteri ini di halaman 15. Di halaman 15 inikan cukup banyak, yang saya inginkan bagaimana mengurangi impor dari sekian kebutuhan rakyat yang sering impor adalah beras kan istiqomah padahal hamparan lahan produksi beras cukup luas dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana memobilisasi rakyat Indonesia khususnya para petani yang kata Doktor Hansi Lema itu identik dengan orang miskin saya berharap dengan pandemic dan pasca pandemi ini rakyat Indonesia sekali lagi petaninya sudah tidak akan miskin. Ambil beras bagaimana mempertahankan beras, ini dari generasi minimal generasi sayalah, saya tidak ingin mendengar kembali Indonesia

mengimpor beras dari Vietnam dan negara lain. sehingga dari perasaan optimis hari ini sampai dengan Desember tidak akan impor beras bagaimana? dicek kembali oleh Kementerian melalui PPL di seluruh Republik Indonesia. Modalnya tidak akan besar cukup mungkin PPL itu diberikan laptop tiap kecamatan, Insya Allah itu akan menjadi surprice tersendiri bagi petugas dilapangan.

Yang kedua kopi, selain padi saya ingin bagaimana dari target sekian tanaman itu hanya mengambil 3, kopi karena banyak sekali lagi lahan produktif nilai negara itu yang cocok untuk ditanami kopi. Yang ketiga kelapa, inikan masih hanya ribuan ton padahal hamparan untuk cocok ditanam kelapa ini akan mampu mengangkat Indonesia panen menjadi juta ton. Dalam draft rancangan target produksi 2021 ini masih bunyi ribu ton, saya masih berharap bagaimana sudah menjadi juta ton saat Pak Yasin Limpo ini menjadi Menteri.

Yang terakhir, daging kambing. Bapak Ketua, ini menarik sebenarnya kalau kita mampu memberikan bantuan kambing kepada seluruh rakyat Indonesia, maka kambing ini akan menjadi primadona selain mencukup kebutuhan rakyat di Republik Indonesia kambing ini karena usaha rakyat kecil. Kita akan mampu mengimpor, mengeksport ke negara-negara Timur Tengah khususnya manfaatnya untuk rakyat Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji kita bawa kambing dari Republik Indonesia kita sembelih sebagai DAM bagi seluruh umat Islam yang sedang akan menunaikan ibadah haji. Minimal 250 ribu kambing yang akan kita bawa ke Timur Tengah.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya Bapak Budi Pimpinan Komisi IV DPR RI.

Bapak Budi silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Menteri yang saya hormati beserta jajaran,
Dan juga teman-teman Komisi IV DPR RI yang saya banggakan.

Langsung saja tadi beberapa rekan kita sudah mengemukakan permasalahan-permasalahan yang ada khususnya tadi mulai dari Bapak Dedi dan Bapak Hansi Lema yang menyoroti beberapa pentingnya untuk kita segera memikirkan produksi dalam negeri. Dan saya sambut baik kalau

memang tujuan Bapak Menteri ini kedepannya kita ingin mengekspor daripada komoditi-komoditi pangan kita. Tapi saya ingatkan kepada Bapak Menteri ini faktanya saja dan saya menggunakan data karena beberapa terakhir kita meeting saya sering mendengar Bapak Menteri ini menggunakan data dari BPS. Jadi saya dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan Bapak Menteri akan data sajian dari BPS. Faktanya adalah dari sekian komoditi pangan yang ada di Indonesia, beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, gula, tepung terigu, daging kerbau, itu rata-rata dari 2015 sampai dengan 2019 itu kita masih impor semua Pak. Benar-benar komoditi pangan yang kita masih ekspor itu hanya minyak goreng dan hanya ikan segar yang lainnya itu kita masih impor.

Kalau kita bicara bawang putih, gula, beras juga angkanya sungguh luar biasa. Dengan status pandemic COVID 2019 yang sama-sama kita hadapi tentunya ini menjadi tantangan cukup besar. Tadi kita sudah lihat dari data yang atau dari presentasi yang disiapkan, tahun ini saja rencana impor itu begitu besar untuk komoditas-komoditas seperti gula dan juga bawang putih dan masih ada beberapa lainnya. Tadi saya ingin tanyakan ini dalam mengantisipasi kegiatan negara nanti ini menutup keran ekspor mereka ke negara lain. Langkah-langkah apa yang sudah benar-benar secara konkrit kita siapkan kedepan. Dengan pemotongan-pemotongan anggaran tahun ini dan tahun depan juga apakah mungkin, apakah realistis untuk kedepannya jangan kita mengekspor dulu, kita bicara bisa tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri. Faktanya seperti saya katakan hampir semua komoditas inti pangan itu kita masih impor. Kalau tahun ini kita sudah dikurangi anggarannya sebesar Rp7 triliun, tahun ini Rp14 triliun anggaran Kementerian Pertanian. Tahun depan rencananya Rp18 triliun, apakah ini nanti akan mencukupi langkah-langkah strategis kita kedepannya. Tolong saya minta Bapak Menteri ini nanti bisa menjabarkan ini untuk menunjang kami seperti dikatakan Bapak Dedi, Bapak Hansi untuk menunjang produksi kita ini, ini realistis atau tidak kedepannya untuk kita mau ekspor. Saya bingung kok orang itu dari tahun ke tahun bilang kita ekspor, jagung saja kita masih impor ini data dari BPS. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya mulai memperhatikan dari media-media banyak sekali pasar-pasar kita dan juga pasar induk kita mulai terdampak COVID-19. Banyak sekali pedagang pasar yang ditemukan reaktif maupun positif COVID-19. Ini tentunya kedepannya ini bisa menjadi suatu hal yang sangat mengkhawatirkan untuk kita semua. Pak Menteri, yang saya tahu sudah merencanakan program-program seperti pasar tani, toko tani dan sebagainya. Ini saya ingin coba konkritnya ini nanti seperti apa Pak, ini bisa tidak dalam waktu dekat bisa menjadi salah satu solusi dimana kalau sampai terjadi kita mau membuat skenarionya, kalau sampai terjadi pasar induk kita terpaksa tertutup satu minggu, dua minggu karena pedagang-pedagangnya itu banyak yang terdampak oleh COVID-19 ini terus bagaimana, apa yang bisa kita lakukan.

Ini yang ingin saya sampaikan, atas waktu dan perhatiannya saya terima kasih Bapak Ketua dan Bapak Menteri. Salam sehat dari saya, semoga sukses kedepan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Budi.

Selanjutnya Pimpinan bayangan Bapak Slamet Ariyadi.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Terima kasih Bapak Sudin sebagai Ketua Komisi IV DPR RI.

Yang kami hormati Bapak Menteri Pertanian beserta Sekjen dan jajarannya.

Yang pertama, menyikapi dengan adanya rencana kerja Pemerintah pada tahun 2021 ini Kementerian Pertanian berkontribusi pada prioritas nasional yang pertama, yaitu pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Cuma saya ingin menyarankan karena memang dalam apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri pada prioritas nasional yang kedua ini dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan ini belum ada uraian. Karena memang kita lihat bagaimana untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas ini tentunya butuh, artinya bagaimana pemerataan serta dalam mengurangi kesenjangan. Artinya, kita butuh uraian juga bagaimana Kementerian Pertanian ini melihat prioritas nasional yang kedua.

Yang kedua, kami menyarankan kepada Kementerian perlu mendorong pengembangan pertanian skala rumah tangga untuk program swasembada sayur dan pengembangan pertanian perkotaan atau yang disebut urban farming.

Yang ketiga, kami perlu juga untuk mendorong bagaimana kerja sama pengembangan bahan pangan lokal skala industri seperti moka, tepung, pisang untuk mampu mengakselerasi penggunaan bahan pangan non beras. Tentunya ini perlu digenjut dan dijadikan pertimbangan oleh Kementerian.

Yang keempat, kemarin kami juga melakukan reses sampai kepulau yang kami tempuh hingga 32 jam dengan transportasi laut di wilayah Madura. Ini sangat miris karena memang apa yang pernah saya sampaikan pada Rapat Kerja sebelumnya dengan Bapak Menteri, kami langsung kunjungi Kepulauan Kangean di sana da 40 ribu hektar lahan pertanian yang sangat produktif, namun hari ini yang baru digarap masih 9 ribu hektar. Tentunya ini butuh uluran tangan dari Bapak Menteri, dari Bapak Dirjen yang menjadi kebutuhan khusus wilayah kepulauan ini kami harapkan bagaimana menjadi prioritas selain daratan. Karena memang jangkauannya hari ini sangat tidak memungkinkan karena dengan transportasi laut. Tentunya di sana kemarin kami sudah membantu masyarakat dengan membuka jalan produksi pertanian bukan jalan usaha tani. Jalan produksi pertanian dengan kami sewakan alat berat semacam eskavator. Tentunya mungkin nanti bagaimana di Kementerian ini perlu dianggarkan oleh Bapak Menteri untuk bisa membuka jalan produksi pertanian ini dalam menuju sawah, bukan hanya

untuk mencetakan sawah. Tentunya sudah banyak lahan yang sudah produktif Bapak Menteri yang perlu kami laporkan, cuman akses jalan yang memang untuk menuju jalan produksi pertanian.

Yang kelima, saran dari kami terkait RKA 2021 perlu adanya rasionalisasi pagu anggaran bagi Dirjen yang tidak dapat melaksanakan capaian realisasi anggaran di bawah 90%. Agar apa? kita dengan adanya pagu anggaran yang 18 triliun hari ini perlu dimaksimalkan. Kalau kiranya tidak bisa memaksimalkan capainnya hingga 90% lebih buat apa kita menganggarkan untuk mendapatkan tambahan anggaran. Tentunya perencanaan dan tujuan selanjutnya ini perlu ditata dengan baik sehingga RKA selanjutnya ini bisa mencapai target.

Yang terakhir, juga berbicara tentang RKA 2021 kita lihat disini tetap konvensional dimana pendekatan input masih menjadi arus utama kegiatan Kementan. Hal ini tidak dibarengi dengan serapan yang baik dengan dua Ditjen, penyediaan input yakni Dirjen PSP dan TP serapannya sangat rendah di bawah 90%. Serta belum ada kajian yang benar-benar membuktikan kalau pendekatan input sangat berhasil untuk mendonkrak produksi komoditas pertanian negara kita ini. Tentunya kita harapkan pendekatan output dengan cara memperluas industrialisasi produk pertanian ataupun pembukaan toko tani hari ini sudah gencar dilakukan oleh Menteri Pertanian yang sudah tersebar. Cuman kita inginkan bagaimana toko tani ini bisa merata di tingkat kabupaten Bapak Menteri. Tentunya dengan kita menggandeng Kemendag, juga kita menggandeng kementerian-kementerian terkait untuk menjadi uji coba alternative di dalam melakukan suatu pendekatan baru oleh Kementerian pertanian.

Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

*Wallahu Muwafiq Illa Aqwamit Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Slamet ini waktu virtual mengatakan “Pak Menteri, ke kampung saya, saya siapkan pesawat”, tapi dia sendiri kesana naik kapal 32 jam.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Bukan Ketua, kita perlu klarifikasi. Kalau dengan Menteri saya siap tanggung semuanya Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh, disiapkan pesawat Bapak Menteri.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Siap, kami tunggu Bapak Menteri untuk hadir di Madura.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Emang luar biasa orang Madura tidak ada duanya.
Selanjutnya Bapak Ichsan.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya singkat saja karena takut dibatasi waktu, saya minta tolong slide halaman 18 boleh Pak, kalau boleh berkenan. Saya mau tanya terkait dengan tadi Bapak Budi dan Bapak Hasan sudah menyampaikan Pimpinan, kekhawatiran terkait dengan kemungkinan dari impor beras. Kita lihat di halaman 18 Bapak dan Ibu semua, boleh ditampilkan.

Saya ingin klarifikasi terkait dengan data beras dan jagung Pak, ini ada perkiraan kebutuhan sekitar 20 juta ton, kemudian stock akhir April itu 7,4 juta ton. Nah, ini perkiraan kebutuhan apakah jumlah produksi itu sekitar 26 juta ton artinya ada perkiraan kita surplus sekitar 6 juta ton. Saya termasuk juga jagung, saya agak khawatir dengan data ini Pak, karena jumlah 26 juta ton ini, ini apakah stock apa perkiraan jumlah stock dari Januari sampai Desember atau boleh ditampilkan. Pak saya mau tanya stock beras inikan 26 juta, perkiraan stock di akhir tahun itu 26 juta ton, sedangkan perkiraan kebutuhan 20 juta ton. Perkiraan kebutuhan ini apakah sejak dari Januari sampai Desember atau sejak dari Mei sampai Desember, karena menurut data BPS bahwa kebutuhan kita itu 29 juta ton Pak, tepatnya 29,6 juta ton. Data BPS mengatakan kebutuhan beras kita itu 29,6 juta ton. Kalau kemudian kita perkirakan ada jumlah 26 juta ton, maka kemungkinan kita punya defisit beras sekitar 3 juta ton, kita perkirakan itu saja Pak. Jadi kalau kemudian ada perkiraan neraca sampai di Desember 2020 ada surplus 6 juta ton saya ragu Pak Menteri. Ini harus di dan apalagi kemudian di halaman 19 mengatakan bahwa stock beras akhir Juni itu 7,49 juta ton. Sedangkan stock di akhir April itu 7,409 berarti ada dua bulan kita hanya memproduksi 10 ribu ton. Artinya apa Bapak dan Ibu semua, saya hanya ingin bertanya, saya khawatir apakah ini kita impor atau tidak. Kalau perkiraan jumlahnya konsumsi 29 juta ton sedangkan stock kita perkiraan sekali lagi itu ada 26,2 juta ton berarti ada kemungkinan kita defisit beras sekitar 3,4 juta ton, hanya beras.

Yang kedua, saya ingin halaman 18 lagi boleh. Halaman 18 saya ingin tanya tentang kondisi misalnya ambil contoh, ini bagaimana data bermasalah di Kementerian Pertanian. Cabai besar dan cabai rawit, tidak ada daa stock akhir April 2020 tetapi perkiraan produksi sekitar 762.692 ton. Kalau kita cek di halaman 15, rancangan target produksi tahun 2021 di halaman 15 itu cabai besar itu perkiraan target produksinya 1,45 juta ton. Bayangkan tahun 2020 kita hanya mampu memproduksi sekitar 762 ribu ton tapi tahun 2021 dua kali

lipat Pak, dengan anggaran yang sama. Anggaran kita Rp14 triliun tahun 2020, tahun 2021 Rp18 triliun tapi target cabai besar dan cabai rawit dua kali lipat. Bagaimana caranya itu Pak, diproduksi. Boleh bandingkan antara halaman 18 dengan halaman 15, cabai besar 1,45 juta ton target produksi tahun 2021. Cabai besar perkiraan produksi tahun 2020 762 ribu, dua kali lipat Pak. Bagaimana dengan anggaran yang terbatas tapi produksi bisa naik dua kali lipat di tahun 2021.

Bapak Menteri dan para Dirjen, eselon I dan eselon II dan pejabat Kementerian.

Apakah ini realistis atau tidak Pak, target produksi begitu besar anggarannya terbatas tapi perkiraan produksi tahun 2020 hanya setengahnya. Ini yang menjadi masalah Pak, sekali lagi Pak Menteri punya keinginan untuk menyempurnakan data pertanian dengan menggandeng BPS tetapi kemudian target produksinya gila-gilaan Pak, dua kali lipat Pak. Hanya cabai besar dan cabai rawit saja, sedangkan perkiraan produksi 2020 hanya setengahnya, dengan anggaran yang hampir sama. Belum kita bicara jagung Pak, saya ingat jagung tahun 2020 bantuan benih jagung itu hanya 2,2 juta hektar. Apakah bisa surplus tahun 2020 untuk jagung sedangkan di tahun 2019 saja ada 3,6 juta hektar itu kita masih impor 1 juta ton jagung dan itu saya tahu sendiri Pak, karena waktu itu Bapak Menteri sudah menyampaikan.

Dengan bantuan benih 2,2 juta hektar bisa kita surplus. Saya agak aneh Pak, terkait dengan kebutuhan ini, makanya kemudian kita harus samakan persepsi data kebutuhan. Kebutuhannya dari mana, apakah dari Kementerian Pertanian atau dari data BPS Pak. Nah, kesalahan bagaimana menganalisis data ini Pak, khawatirnya kita akan muncul krisis Pak. Ini persoalan yang harusnya kita perbaiki sama-sama. Ini saya hanya ingin membuka sedikit saja terkait dengan bagaimana perkiraan data produksi dan bagaimana kemudian pencapaian target produksi ketika kita bicara anggaran produksinya hanya sekitar 700 ribu tapi target produksi tahun 2021 hampir dua kali lipat dengan anggaran yang sama. Kita sempurnakan Pak, ini semua. Bapak Menteri tolong dikoreksi ini semua, jangan sampai datanya itu data yang mohon maaf ABS target produksi tetapi kemampuan kita terbatas. Kalau kata bahasanya Ibu Kiki itu Edi Tansil (Ejakulasi Dini Tanpa Hasil), mohon maaf sekali lagi. Artinya, 765 ribu tahun 2020 anggarannya sama 1,57 target produksi. Dari mana caranya Pak, luas lahan kita berapa Pak, berapa anggarannya, bagaimana mendorong produksi dua kali lipat dalam jangka waktu 1 tahun.

Terima kasih Bapak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Ibu Riezky Aprilia, silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mohon maaf lahir bathin bagi Pak Menteri beserta jajaran.

Langsung pada intinya saya ingin membahas tadi paparan Bapak, dihalaman 5 terkait realisasi kegiatan utama tahun 2019. Terkait pertama, pengembangan karet pada sub sektor perkebunan pencapaian realisasi pengembangan tanaman karet itu 99,06%. Tapi seperti kita sadari harga karet kan hari ini sangat terpuruk. Produsen karet tidak usah internasional yang nasional saja cukup mengalami keterpurukan hari ini dan bahkan Malaysia sepakat untuk tidak melakukan areal perluasan karet. Jadi prinsipnya begini Pak, kita cukup paham dengan keadaan karet hari ini tapi apa kira-kira, ini dari awal kita rapat Pak Sekjen saya selalu mempertanyakan kira-kira program apa terkait yang bisa kita bantu untuk para petani karet, karena harus disadari bahwa wilayah Sumatera dari ujung Aceh sampai ujung Lampung itu rata-rata karet dan tidak jauh juga dari sawit. Itu yang pertama.

Kemudian terkait juga masih dihalaman 5 ini hanya ingin mempertanyakan pengembangan sapi melalui IB itu over target ya kalau saya perhatikan kalimatnya Pak. Kalau over target harapan saya berarti kita mempertegas teman-teman tadi menyatakan berarti kita harapannya Bapak Menteri bisa swasembada sapi tanpa perlu impor sapi, impor kerbau dari luar negeri, karena disitu angkanya tinggi. Tapi mohon saya dikoreksi karena bisa saja saya salah membacanya, tapi saya yakin itu optimisme dari peternakan bahwa kita over target berarti kedepan kita sudah swasembada.

Kemudian terkait juga bicara masalah Alsintan, saya mohon bahwa dipahami oleh Kementerian setiap wilayah itu berbeda-beda konturnya. Jadi jangan sampai tadi Dirjen TP dan Dirjen PSP mungkin mendapat koreksi dari rekan-rekan. Jadi terkadang adjusting dengan daerah-daerah tersebut penting. Kayak daerah saya Pak, itu semai jadi rice transplanter itu tidak mau dijejalin bagaimana mereka pasti tolak.

Kemudian kemarin saya juga bertemu dengan beberapa petani bahwa tadi espektasi tadi juga teman-teman sudah sampaikan bibit yang diberikan kalau bisa jangan tanggung Pak. Kalau memang mau ekspor, mau jualan di mana-mana kita jual barang bagus bukan barang jelek. Nah, kemudian juga saya ingin penjelasan terkait saya ditanya masalah kartu tani Pak. Saya mohon penjelasannya saja karena saya paham ini adalah salah satu bentuk pelayanan Kementerian Pertanian kepada para petani. Akan tetapi harap dipahami Pak, kami saja di wilayah Sumatera apalagi wilayah Indonesia Timur mungkin fasilitas internet itu tidak sebagus wilayah Jawa. Nah, bagaimana teknisnya, regulasinya inikan juga bias Pak, dalam arti kata kami butuh ketegasan disini, apakah bisa direct atau ke Poktan atau seperti apa, karena kalau saya lihat kan antara teknis hari ini dan realisasinya agak sedikit berbeda.

Nah, tadi saya menekan juga mengulangi oleh para senior-senior saya kita butuh peta, peta yang clear dari awal juga di rapat pertama saya

sampaikan peta, karena ini apa? terkait juga dengan kebijakan nanti Bapak-bapak juga harap membaca RUU Cipta Kerja. Jangan sampai nanti Bapak-bapak tidak paham apa yang Bapak-bapak harus lakukan kedepan, kami pun juga mempelajari itu. Jadi jangan nanti sudah kejadian baru bingung Pak, karena apa? kita butuh masukan.

Nah, kemudian terkait tadi masalah anggaran. Anggaran kalau memang anggaran Bapak minta penambahan anggaran apabila itu usulan clear dan itu untuk hulunya, hulu dalam arti produksi saya yakin teman-teman sepakat. Bahwa setelah pasca COVID ini yang paling memungkinkan diselamatkan hanya sektor pertanian Pak, tidak ada yang lain mutlak itu. Dan kami Komisi IV DPR RI yakin kalau memang Bapak serius menjadi Menteri Pertanian saya yakin Bapak serius tapi tidak tahu yang lain ya. Kalau Bapak serius menjadi Menteri Pertanian tidak akan ada permasalahan bagi petani dan lainnya di Indonesia Raya yang kata Bapak Merah Putih. Insya Allah serius ya, jadi saya harap Bapak Menteri yang saya sayangi dan saya duduk disini sebagai wakil dari rakyat bahwa Indonesia hari ini yang paling memungkinkan diselamatkan adalah sektor pertanian.

Dan sekali lagi Pak, lahan gambut atau lahan rawa yang Bapak Presiden canangkan tapi kan mungkin ada usulan tapi lebih baik hidupkan kembali lahan tidur saja. Banyak Pak, lahan tidur itu makanya kuncinya kembali tadi oleh Bapak Hasan disampaikan intinya pemetaan Bapak tepat atau tidak. Don't wise the money for nothing Pak, bahwa masyarakat hari ini menunggu Bapak menjadi Menteri Pertanian yang betul-betul bekerja untuk petani. Itu saja dari saya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Emang tidak ada duanya.

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Pertanian untuk menyampaikan jawabannya, kalau yang tidak ada mohon dijawab secara tertulis yang ada dijawab langsung.

MENTERI PERTANIAN:

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang kami sangat muliakan dan hormati, baik yang physical maupun virtual di tempat masing-masing di seluruh Indonesia yang sama-sama kami hormati, Bapak Sekjen dan segenap jajaran Kementan dan hadirin sekalian.

Kurang lebih 29 pertanyaan dan tanggapan dan mulai dari Bapak Hermanto, Bapak Darori, Bapak Slamet, Bapak Ibnu Multazam, Bapak Haerudin, Bapak Andi Akmal, Ibu Alin Mus, Bapak Abdullah, Bapak Ono Surono, Bapak Charles, ini saya sebutkan satu per satu karena saya berharap Dirjen dan Eselon I dan Eselon II yang hadir bisa mencatat. Dan kita

pulang dari sini dan semua pertanyaan itu harus dijawab dan saya akan pimpin langsung.

Kemudian dari Bapak Charles panjang sekali, Bapak Salim Fahri, ada dari Ibu Endang, dari Bapak Pagah, dari Bapak Dedi Mulyadi, dari Bapak Hansi Lema, Bapak Daniel, ada Bapak Sutrisno, ada Ibu Ema, Bapak Guntur, Bapak Bagus Adi, Bapak Purwanto, Bapak Azikin Solthan, Bapak Rudi dari atas mobil, Bapak Teuku Khalid dari Aceh yang tidak bisa pulang, Bapak Hasan, Bapak Budi terima kasih, Bapak Slamet Ariyadi dari PAN, dan Ichsan Firdaus yang terakhir Ibu Kiki yang baik hati, Ibu Luluk yang kami cintai.

Ijinkan saya yang pertama Bapak Ketua Komisi, Pimpinan, saya merasa sangat cerah pertemuan kali ini. Saya berharap setiap pertemuan seperti ini Bapak, kami siap dan selama ini tidak ada catatan menurut pikiran saya yang kami tidak ikuti, karena kami yakin catatan-catatan dan tanggapan itu sudah tergodok dalam pemikiran dan sudah melakukan sebuah antitesa dari perjalanan yang Anggota DPR RI lakukan. Saya hitung-hitung Pak, yang mana yang belum, kecuali memang hal-hal yang prinsip yang saya ya mungkin melalui suatu proses. Tidak semua berakhir dari Kementan Pak, contohnya saya Bapak Ketua, kalau kita bicara impor kami cuma input sistem yang menentukan impor Rakor.

Kemudian yang kedua, ijin impornya bukan dari kami Pak, ini juga harus dipahami. Tetapi menurut pikiran saya beras itu tidak diimpor lagi, jagung juga tidak, yang ada itu jagung itu yang bersubsitusi kepada industri untuk pemanis dan lain-lain. Tapi what ever catatan-catatan ini akan kami jawab secara tertulis dan yang hadir disini nanti Bapak Sekjen nanti tolong ditambahin karena tentu ada yang teknis yang bisa menjadi catatan.

Aku mencatat ada 5 masalah yang harus mendapat pendekatan dari Kementerian dari hari ini Bapak Ketua yang berkait dengan beberapa kebijakan. Mungkin akan kami pertegas seperti apa kebijakan-kebijakan besok yang lebih tajam sesuai dengan apa-apa yang telah mendapatkan penelaah dari Anggota Dewan pada Komisi IV DPR RI pada hari ini. Ada berkait dengan kelembagaan-kelembagaan yang memang harus menjadi sesuatu yang kami perhatikan kedepan termasuk katakanlah pupuk itu sebenarnya kami cuma membuat RDKK, distribusinya juga ada di teman-teman BUMN, kemudian uangnya langsung dari Menteri Keuangan. Inikan susah banget saya kendalikannya ijin, tetapi besok saya akan kendalikan Ketua. Dan saya akan minta tentu saja Kepolisian dan Kejaksaan ikut main, ijin Ketua maaf ini bahasa yang tidak sopan.

Saya tidak main-main, di saat COVID seperti ini kalau masih ada yang main kita habisin sajalah. Dan saya masih berharap saya punya Dirjen ini masih ikut sama saya, kalau badan saya Eselon II saya seperti apa yang saya mau, kalau tidak berhadapan sama saya, minta ijin Ketua. Tapi kasih saya waktu, saya kan baru 5 bulan, yang tidak bisa ikut sama Insya Allah saya habisin Pak. Saya sudah lama ini, maafkan saya Ketua kalau Bapak merasa saya tidak bermaksud apa-apa. Saya ingin menyampaikan apa sih keinginan Komisi IV DPR RI dan saya yakin keinginan itu benar dan harus saya bisa

jalankan, tapi tidak bisa seperti membalikkan tangan langsung begitu, kasih saya waktu.

Kemudian ada hal-hal berkait dengan action plan baik 2019 maupun apa yang akan kita capai di tahun 2020 ini dan menuju 2021. Ini harus semakin dipertegas, makin tajam, mungkin saja ada pembahasan-pembahasan lanjutan yang kami butuhkan dari Anggota DPR RI sesuai dengan saran yang ada 29 tadi Pak.

Saya lebih mengutamakan memang pendekatan yang ada terutama pada waktu yang lewat 2019 pada output. Saya tidak melihat yang hanya 90%, yang 100% tetapi outputnya apa. Dan ukuran dari output itu apa, kalau misalnya ketahanan pangan dan lain-lain berapa sebenarnya kapasitas output yang ada. Masih ada over stock berapa memasuki Desember ke Maret, kan seperti itu Ketua. Musim tanam satu bagaimana musim tanam dua, siapa yang tanggungjawab. Sekarang ter-carry over 2020 itu masih ada berapa, kalau itu boleh pencapaian 89 tetapi outputnya seperti itu. Walaupun dia 1.150% insiminasi dan lain-lain tetapi hasilnya saya tidak lihat ini juga bersoal memang. Harus bisa kita jelaskan dimana hasilnya itu dan saya kira ini menjadi bagian-bagian yang terus kami akan lakukan evaluasi. Oleh karena itu, saya melihat bahwa program-program yang 2020 ini akselerasinya lebih baik.

Ijin Ketua, Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI. keberhasilan kemarin dalam mempersiapkan kesiapan pangan pada saat Ramadhan dan Idul Fitri itu pekerjaan besar Pak, kalau kami biarkan itu kemungkinan akan terjadi terkontaminasi pada stabilitas harga, pasti.

Tugas utama Kementerian Pertanian adalah produktifitas tapi kalau saya tidak sampai ke hulu ini akan menjadi persoalan karena harga jatuh Pak. Sama dengan orang yang suka impor pada saat kita bilang bahwa masih cukup 80 ribu ton, oleh karena itu daya tahan sampai 3 bulan masih cukup. Kemudian daging daya tahannya sampai tiba-tiba di pasar hilang, tidak tahu input yang harusnya masuk di pasar setelah kita cek 40 ton per hari dikasih cuman 15 ton perhati oleh karena itu harga naik. Ini kendala-kendala dilapangan yang kadang-kadang orang lain tidak bisa menghitungnya Bapak Ketua dan Pimpinan. Oleh karena itu Toko Tani juga menjadi solusi untuk melakukan penyeimbangan bukan membuat Toko-Toko Tani untuk menjadi pasar untuk kita tidak alasannya itu. Dia harus menjadi input sistem kepada pasar informasi komoditas harus ada sehingga apa-apa yang menjadi komoditas yang ada pada satu daerah informasi dari Pasar Tani bisa masuk sehingga retail juga bisa menjadikan patokan-patokan stabilisasi yang ada.

Evaluasi-evaluasi yang disampaikan pada 29 tanggapan dan pertanyaan ini saya kira secara bertahap kami akan laporkan lebih detail. Mohon maaf Bapak Ichsan tadi koreksinya benar sekali, tetapi ingin saya sampaikan bahwa yang kami sampaikan itu adalah Mei, data yang ada Mei ke Desember, setengah perjalanan Pak. Sementara data yang dihalaman 19 itu satu tahun, jadi memang dua kali lipat, jadi seperti itu datanya Bapak. Kenapa kita pakai data BPS? data BPS lah yang ditunjuk menjadi data negara. Kalau

pakai data pertanian kan selalu dicurigai lebih tinggi. Dan termasuk bagaimana menkonsolidasi lahan itu adalah kajian dari 4 kementerian, 4 lembaga. Jadi ada BPN ATR, ada BPS, ada Kementerian Pertanian dan satu lagi BIG. Dan itulah yang kita dapat, sebenarnya kalau mau data yang sebenarnya dengan Kementerian Pertanian tapi ini diputuskan dalam Rakor tidak boleh dipakai, kita lebih tinggi sebenarnya dari data yang ada.

Oleh karena itu, saya ingin sampaikan coba halaman 4. Ijin Ketua sedikit, oleh karena itu ter-carry over dari 2019 adalah sampai Desember 5,9 juta ton ini termasuk beras impor yang ada di Bulog jumlahnya 2 juta ton yang ter-carry over dari kita 3 juta lebih, oleh karena itu, tersisa 5,9. Perkiraan produksi kita untuk dari Desember ke April itu ada 11 juta ton lebih, perkiraan kebutuhan sesuai dengan data BPS 9,9 juta ton sehingga stock akhir April ada 7,4 juta ton. Kemudian stock akhir April 7,4 juta ton kita perkiraan produksi akan main dari April ke Agustus itu adalah 11 juta ton. Oleh karena itu, perkiraan kebutuhan kita adalah 10,1 juta ton dan stock akhir Agustus itu masih kurang lebih 8 juta ton. Ini prognosa yang kita pakai dan ini terbagi habis sampai provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sampai ke desa.

Kemudian prognosa ini berlanjut pada stock akhir Agustus 8,7 juta perkiraan produksi yang ada adalah 7,3 juta maka dia akan kemudian perkiraan kebutuhan kurang lebih 9 sampai 10 juta. Stock akhir kita memasuki Desember masuk Februari, Maret, karena biasa musim tanam ketiga masuk sampai Februari Maret masih tersisa kurang lebih 6 juta ton.

Saya ingin masuk sedikit pada halaman 19, MT1 itu dari luas tanah Oktober ke Maret ini 2019 6,7 kemudian luas panen 5,83 juta hektar dan hasilnya 29 juta ton setara dengan beras adalah 16,65 juta ton. Kemudian diperkirakan stock akhir 6,1 juta ton sudah termasuk disitu. Perkiraan kebutuhan kita 15 juta sehingga masih tersisa 6. Ini kerja MT1 kita Pak, musim tanam hujan rendengan.

Kemudian menghadapi MT2, itu Musim Tanam 2 kita perkiraan kita akan mengintervensi 5,6 juta hektar. Jadi kita punya 7,4 juta tetapi kita bisa intervensi 5,6 dengan perkiraan adalah provinsi-provinsi dan daerah-daerah yang masih punya air karena punya irigasi primer, sekunder yang masih bisa kita pertahankan sampai musim tanam. Ini juga untuk mengantisipasi warning FAO atas kekeringan yang ada, kita menggunakan dana BMKG dan ternyata mulai Juni akhir Mei ke Juni sudah tidak ada air tinggal sisa hujan, kemudian Juli itu sudah tidak ada hujan. Saya keliling daeran ini Pak, dari Papua sampai ke Aceh ternyata hujan masih ada dan di atas Jawa ini hampir semua masih hujan. Oleh karena itu, kita masih optimis. Dari kurang lebih DAM yang ada berapa, 94 DAM yang airnya masih maksimal berapa? 38 DAM itu masih di atas rata-rata, masih sangat baik termasuk yang di Jawa Barat Jati Luhur dan lain-lain masih penuh air, padahal perkiraan BMKG sudah turun. Kemudian ada beberapa yang di bawah target 49, tetapi belum kosong. Oleh karena itu, ini masih bisa melakukan pengairan termasuk di daerah-daerah di luar Jawa yang ada.

Oleh karena itu, kita berharap di musim tanam 2 ini 5,6 mungkin lebih Ketua, tapi optimisme kita kurang lebih antara 12,5 juta ton sampai dengan 15 juta ton kita sudah uji di lapangan ini dan sekarang ini hasilnya hampir 40% sudah tertanam dan tinggal intervensi. Mungkin belum sampai di Aceh karena bibitnya dan lain-lain belum sampai kesana. Oleh karena itu, kalau dihitung dari kurang lebih 11 sampai tau 15 juta ton ditambah dengan 6 koma yang tersisa adalah 7 koma....

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ijin Bapak Menteri, karena sebentar lagi kami harus bergeser saya hanya ingin memastikan apakah Bapak bisa menjamin tidak akan ada impor untuk bahan pokok strategis.

MENTERI PERTANIAN:

Sebenarnya begini, ada 11 komoditi dasar yang memang dijaga karena itu adalah bagian unsur-unsur dari kedaulatan dan ketahanan pangan kita. Tetapi ada 3 komoditas yang totally kita belum bisa penuhi, ada bawang putih, ada daging dan ada gula, terutama gula konsumsi. Gula konsumsi kita itu di sekitar 2,8 kemampuan kita cuman 2,1 kurang lebih 600 ribu ton masih bersoal seperti itu. Tahun ini kami coba intervensi untuk menyelesaikan gula konsumsi itu, ini membutuhkan dana Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, saya potong.

Kekurangannya cuman 600 ribu ton untuk gula konsumsi, gula rafinasi?

MENTERI PERTANIAN:

Tidak termasuk, itu 3 juta.

KETUA RAPAT:

3 juta atau 4 juta lebih.

MENTERI PERTANIAN:

3,1.

KETUA RAPAT:

3,1.

MENTERI PERTANIAN:

Itu masih tidak bisa diintervensi Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi begini maksud saya Bapak Menteri, Bapak kan Menteri Pertanian jangan juga apa yang diusulkan oleh Menko Ekuin di Rakortas di iyakan, janganlah Bapak kan bukan anak buah dia, Bapak ini anak buahnya Presiden. Menteri yang lalu selalu melawan kok, kalau kebijakannya dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pertanian silakan. Jangan apa yang diitukan, inikan kemauan Rakortas, janganlah Pak, seolah-olah Bapak tidak punya legitimasi sebagai Menteri. Ini saya punya kebijakan, terserah kebijakan anda apa. Dan saya menjakin kebijakan ini baik dan benar untuk bangsa dan negara Indonesia. Itu Pak, sekali-kali dong bikin action Pak.

Ya lanjutkan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan, maaf Bapak Menteri, sekedar penegasan Pimpinan. Bahwa kita tidak tabu terhadap impor Pak, seperti yang Bapak sampaikan tetapi ada jaminan dari Bapak sebagai jenderal nya para petani, bahwa tidak akan impor untuk bahan pokok strategis.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Bapak Ketua, Hermanto Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya Bapak Hermanto satu menit.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Boleh Ketua, jangankan satu menit setengah menit juga boleh.

Begini Bapak Menteri, apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri sebagai leading sector dalam pangan termasuk juga Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seperti yang tadi saya

sudah minta ijin kepada Bapak Ketua, saya tadi dan rekan-rekan termasuk Bapak Suhardi dan Bapak Haerudin itu kita sudah kompak tadi rapat di Banggar. Jadi kita minta juga supaya ada penguatan anggaran untuk bidang pangan ini, jadi kita juga sudah mendesak kesana. Nah, kami berharap juga Bapak Menteri juga harus berjuang disitu jangan seolah-olah suara ini hanya dari Komisi tetapi dari Banggar juga kita sudah suarakan Pak. Tadi Bapak Suhardi, Bapak Haerudin tadi kita sudah serius di sana Pak. Tinggal nanti apa yang diamanatkan oleh Bapak Sudin Bapak Ketua, beliau minta sebab Bapak Menteri ini adalah leading sector di pangan harus keras disitu. Jangan nanti dikurangi ini enjeh, dikurangi enjeh jangan.

MENTERI PERTANIAN:

Tidak Pak, pasti tidak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Nah, gitu.

Terus yang terakhir Bapak Menteri....

MENTERI PERTANIAN:

Saya pernah dikeluarkan dari Ratas Pak, saya bilang saya tidak ikut tanggungjawab Bapak Presiden kalau ini seperti ini.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Oke, berarti itu integritas Bapak Menteri, saya berikan applause untuk itu.

MENTERI PERTANIAN:

Saya melawan Menko Pak, 3 Menko. Tidak Pak, Insya Allah.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Oh itu, Menteri Komisi IV DPR RI kalau gitu.

KETUA RAPAT:

Cukup Bapak Hermanto, silakan Bapak Menteri.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Satu lagi Bapak Ketua, sedikit saja.

Bapak Menteri, di waktu Komisi IV DPR RI berkunjung ada satu DAM yang di Kota Padang itu alhamdulillah DAM itu sudah selesai, itukan hasil

aspirasi kita di Komisi IV DPR RI. Tinggal nanti bagaimana air yang sudah mengalir ini kita optimalkan.

Demikian Bapak Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Boleh interupsi sedikit Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Menteri, tadi sedikit saja mengenai apa yang Bapak Menteri kemukakan tadi mengenai contoh saja masalah gula rafinasi. Tadi Bapak Menteri mengemukakan bahwa kebutuhan untuk gula konsumsi itu kita kurangnya itu kira-kira 6000 ribu ton per tahun, mohon koreksi kalau salah. Dan kebutuhan untuk gula industry itu 3 juta lebih. Okelah kita tidak bisa mencukupi semua paham, tapi kita setiap tahunnya kita itu masih mengimpor lebih dari rata-rata 2 juta ton per tahun untuk gula bahkan lebih. Apa langkah-langkah konkrit dari Bapak Menteri bisa tidak kita menutupi yang gula konsumsinya saja dulu 600 ribu. Apakah ada langkah untuk itu, begitu juga dengan bawang putih kita sudah dari tahun 2001 tidak pernah mengimpor kurang dari 200 ribu ton per tahun. Ini maksud saya ini langkah kedepannya kita cicil per tahun bisa tidak kita tutupi kalau tiap tahun kita masih impor 600 ribu ton untuk gula konsumsi bisa tidak tiap tahunnya kita tutupi sampai gula untuk konsumsi itu kita benar-benar tidak impor lagi.

Itu saja Bapak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Ichsan singkat.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Oke, singkat.

Bapak Menteri saya agak worry jujur dengan data produksi beras Bapak Menteri. Coba ditampilkan ada data dari Dirjen Tanaman Pangan bahwa stock akhir Mei kita itu diperkirakan sekitar 8 koma, sorry saya bacakan ini datanya. Bapak Menteri, kita lihat stock akhir Mei 8,35 juta ton

dan akhir Juni itu 8,1 sedangkan di halaman 19 kita yang ditampilkan oleh Bapak Menteri di dalam materi saya ini 7,49. Artinya, ada hampir selisih 1 juta ton Pak, dari data yang dikeluarkan sama-sama dari Kementerian Pertanian Pak. Ini data yang saya dapat Pak, itu kalau tidak salah waktu pada saat Rapat Dengar Pendapat ini 7,49 ini Juni 2020 8,146 Pak. Nah, ini ada perbedaan yang cukup signifikan 1 juta ton Pak, antara data di halaman 19 yang sekarang saya pegang yang sama-sama kita pegang semua dengan data yang ditampilkan oleh Kementerian Pertanian. Ini jelas pertanyaan ini Pak, saya hanya ingin menampilkan sesuatu bahwa ada persoalan kita terkait dengan data produksi. Jadi hati-hati Pak, kita mengambil keputusan. Saya setuju dengan Bapak Menteri bahwa kita menghindari impor tapi bagaimana kita menghindari impor kalau data kita sendiri saja bermasalah Pak.

Di halaman 19 sekali lagi saya ulangi Bapak Menteri mengatakan stock beras akhir Juni 2019 7,49 juta ton. Di dalam data itu perkiraan prognosa produksi dan kebutuhan beras nasional itu ada perkiraan surplusnya itu sekitar 8,146 kira-kira hampir 1 juta ton. Saya tidak tahu lagi seperti apa, artinya saya khawatir dengan data itu Pak, termasuk juga data produksi, target produksi yang muluk-muluk tahun 2021 itu Pak, tolong dikoreksi nanti kedepan. Jadi saya hanya ingin kita sama-sama satu data yang sama, jangan kemudian kita satu kementerian berbeda lagi data produksinya Pak. Nah, ini data produksi saja sudah berbeda antara di internal kementerian apalagi kemudian kita mengambil keputusan di dalam Ratas.

Jadi setiap Ratas selalu persoalannya adalah betul tidak data produksi kita, betul tidak dengan data yang ada. Sehingga ketidakpercayaan kita terhadap data ini kita hindari Pak, begitu. Termasuk saya juga minta tolong di dalam pagu indikatif kita itu data produksi kita tolong dikoreksi dengan baik serealistis mungkin Pak, sehingga kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup Bapak Ichsan, Bapak Menteri lanjutkan.

MENTERI PERTANIAN:

Ya, akan kami sesuaikan Bapak Ichsan mungkin kami salah, akan kita sesuaikan kita cari pembenarannya.

KETUA RAPAT:

Bapak Menteri berani mengatakan kalau salah dikoreksi, tapi Eselon I belum tentu berani mengatakan data yang saya sajikan itu salah harus dikoreksi tidak ada yang berani itu.

Silakan Bapak Menteri.

MENTERI PERTANIAN:

Mungkin saya jawab singkat saja beberapa hal lebih khusus yang berkaitan dengan tidak ada cetak sawah, yang kami pahami tidak ada cetak sawah. Dan yang ada itu ada arah kebijakan Bapak Presiden dalam rangka COVID dan lain-lain sebagainya. Peringatan FAO akan kekeringan dan krisis untuk kita lari untuk mempersiapkan cadangan. Dan cadangan yang paling siap itu karena luas lahan rawa yang ada bukan lahan gambut tapi rawa mineral. Artinya di bawah 1 meter air yang ada. Dan dari 700 hektar yang dianggap memungkinkan intervensi yang bisa dilakukan adalah 164 ribu hektar. Dari 164 ribu hektar itu 84 ribu sudah eksisting, sayaudah 2-3 kali kita panen disana. Kita sudah datang kesana tinggal itu diintensifikasi atau dioptimasi. Selebihnya yang 7,4 karena disitu sudah ada pengairan primer dan sekunder tinggal kita rehabilitasi dan melakukan pengirangan pada lahan yang ada dan kemungkinan intervensinya nanti di 2021 Ketua. Jadi yang ada itu hanya 30.000 hektar yang sekarang yang terintervensi disitu. Selebihnya kita akan masuk sebenarnya optimalisasi lahan-lahan yang termasuk lahan-lahan yang marginal itu ada di 5,6 ditambah kurang lebih 200-300 ribu hektar tetapi kita tidak masukkan dalam prioritas, kita berharap ini menjadi tambahan. Termasuk sebenarnya intervensi rawa kita di Sumatera Selatan Ibu Kiki, ada kurang lebih 200 itu. Kita belum masukkan ini karena kita masih mencarikan anggaran yang sesuai.

Ijin Pimpinan dan seluruh Anggota, pada saat kami sangat keras menghadapi pemotongan anggaran. Anggaran pertama kita dikejutkan dipotong Rp3 triliun tiba-tiba dipotong lagi Rp7 triliun. Belum bernafas saya disuruh menurunkan target, saya tidak mau Pak. Ijin Pimpinan, kenapa? Saya berharap kita kemudian tentu saya mengharapkan teriakan Komisi IV DPR RI juga sama, karena Bapak Sudin sudah terus teriak. Saya suka juga sebenarnya, karena itu sebenarnya juga menjadi strategi kita. Dan kemudian dari itu, di dalam Ratas, di dalam beberapa kali pertemuan Sri Mulyani mengatakan bahwa akan memperhatikan itu. Suaranya DPR RI dan suaranya Kementerian sudah sama, kita akan coba carikan solusi-solusi dari anggaran yang ada. Tetapi inikan tinggal 4 bulan Ketua, oleh karena itu yang 4 bulan ini kita akan pilah yang mana yang strategis utama yang harus kita intervensi dan yang mana yang harus tersisa pada satu.

Aspek lain yang terkait dengan petani miskin tadi ada beberapa hal. Petani miskin itu terdiri atas dua, petani penggarap dan buruh tani jumlahnya 2,7 juta. Kita berharap dampak COVID ini sebenarnya memukul pertanian cukup besar terutama pada petani-petani miskin kita, istilah kita petani miskin atau petani penggarap dan buruh tani itu. Dan oleh karena itu, kita tidak membagi BLT, kita membagi Saprodi. Saprodi itu terdiri atas bibit, pupuk, dan obat-obatan Rp300 ribu. Ini dalam Ratas sudah diterima Bapak Pimpinan, tetapi kemudian bersoal kepada persiapan anggaran dan kemungkinan overlap dengan bantuan-bantuan yang Presiden sudah gulirkan melalui Kementerian Sosial. Oleh karena itu, dilakukanlah cleansing data, karena kami by name, by address. 2,7 juta itu by name, by address dan tidak ada uang yang mengalir melalui Kementerian Pertanian. Kita berharap memang langsung di desa melalui PPL kita dibantu Babinsa dan Babin Kantibnas.

Dan dari kondisi itu disepakati bahwa Rp300 ribu digulirkan atas kebijakan Mentan, Rp300 ribu nya tetap digulirkan melalui Bansos yang secara terus menerus. Cleansing data yang ada, klarifikasi data 80% dari data Kementan itu tidak tumpang tindih dengan data bantuan lain 20% terdiri atas 18% adalah membutuhkan klarifikasi dan hanya kurang lebih, 12% klarifikasi dan 8% itu memang overlap, jadi seperti itu. Sekarang sudah dalam proses-proses untuk katakanlah menyelesaikan. Dengan demikian tentu ini anggarannya cukup besar, karena hampir Rp4,1 triliun total. Kalau 2,1 khusus untuk Saprodi dan sisanya adalah biaya hidup dan biaya tanam itu 300 sehingga total 4,1.

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati.

Saya kira sekali lagi ada tanggapan menyangkut impor sayur besar-besaran yang dimaksud sayur itu bawang Pak, bukan sayur yang kayak kita yang makan tiap hari bukan itu. Justru kita lebih besar mengirim sayur keluar kalau sayur biasa, yang diitu ini bawang dan lain-lain. Termasuk kedelai impor dan lain sebagainya bukan di Kementerian Pertanian karena terkait dengan subsidi industri yang ada. Jadi seperti itu, ini yang menjadi catatan saya untuk kita benahi kedepan atau mengkomplain agar betul-betul Kementerian teknis harus sepenuhnya bertanggungjawab kepada semua bentuk-bentuk yang terkait dengan impor yang ada.

Saya kira itulah yang dari saya, saya ijin mungkin beberapa menit kalau masih ada tambahan dari Sekjen yang perlu klarifikasi. Ijin Bapak Ketua, silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan, interupsi sebentar sebelum Bapak Sekjen.

KETUA RAPAT:

Bapak Menteri sudah cukup?

Ya, silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Sebentar Bapak Ketua.

Terima kasih Pimpinan.

Seiring dengan pertanyaan Bapak Menteri tadi tentang perjuangan kita dari sisi pemotongan anggaran. Sebetulnya tadi Rapat Banggar dengan para Menko adalah bagaimana memusatkan perhatian terhadap pangan salah satunya. Dan itu mudah-mudahan menjadi ruang masuk kita bertahan atau bahkan meningkat anggaran kita dari apa yang hari ini kita rencanakan untuk tahun 2021.

Terima kasih Bapak Menteri.

Terima kasih Pimpinan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Interupsi Pimpinan, sedikit Pimpinan sebelah kanan.

KETUA RAPAT:

Iya Bapak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Menteri yang saya hormati dan seluruh jajaranya.

Jadi yang pertama, mengingatkan kalau saya salah dikoreksi Bapak Menteri tadi menyampaikan baru bekerja 5 bulan, ternyata kalau tidak salah dilantik itu kan Oktober, sehingga kerjanya kira-kira sudah 8 bulan. Jangan sampai kemudian sudah bekerja 8 bulan masih merasa 5 bulan, sehingga ini perlu kita ingatkan. Bahwa sudah hampir setahun sehingga yang....

KETUA RAPAT:

Bapak Slamet, karena dipotong COVID 3 bulan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

COVID tidak berarti berhenti bekerja, karena anggaran terus berjalan. Itu yang pertama.

Yang kedua, menanggapi juga apa yang disampaikan Bapak Menteri terkait dengan banyak kewenangan yang tidak bisa dilakukan atau diintervensi oleh Kementan dalam hal termasuk impor dan lain-lain. Oleh karena itu, saya dari ruangan ini sebagai Komisi IV DPR RI menyerukan kembali kepada Bapak Presiden karena ini bukan kewenangan kementerian, terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 terkait Undang-Undang Pangan. Dimana Undang-Undang ini mengamanahkan kepada Presiden untuk segera membentuk badan pangan, sehingga harapannya seluruh tumpang tindih terkait dengan pengadaan pangan di negara kita segera terjembatani dan sampai hari ini belum dilaksanakan. Oleh karena itu, sekali lagi kepada Presiden untuk segera menjalankan amanah ini melalui Kementerian Pertanian saya sampaikan di forum ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Tadi Bapak Slamet kalau tidak salah ada nanya dengan PT Pupuk Indonesia mengenai hal Rp6 triliun. Bapak Dirut coba dijelaskan.

DIRUT PT PUPUK INDONESIA:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan,
Dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Ini yang terkait tadi yang ditanyakan yang Rp6 triliun sebetulnya Rp5,7 triliun itu bukan untuk COVID Pak. Tapi adalah perencanaan Pemerintah untuk melakukan pembayaran subsidi yang masih terutang kepada Pupuk Indonesia, bukan untuk COVID.

KETUA RAPAT:

Bukan kurang bayar, tapi?

DIRUT PT PUPUK INDONESIA:

Kurang bayar Pak.

KETUA RAPAT:

Kurang bayar kan?

DIRUT PT PUPUK INDONESIA:

Iya.

KETUA RAPAT:

Tadi saya tanya katanya bukan.

DIRUT PT PUPUK INDONESIA:

Dari sejumlah kurang lebih sekitar 13,7. Nah, di tahun ini direncanakan Pemerintah akan melakukan pembayaran sebesar 5,7 yang disampaikan oleh Pupuk Indonesia untuk bayar hutangnya. Mungkin itu saja Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Jadi Pak Dirjen BUN disini ada masalah mengenai dana BPDPKS. Bapak sebagai Ketua Tim Rekomendasi Teknis, betul? Saya lihat inikan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan ini. Ada NIK-nya tidak valid, NIK-nya beda dengan lokasi, NIK-nya tidak sama dengan jumlah lahan. Saya minta dibuatkan laporannya secara tertulis, karena ini anda inikan sebagai pengawas dan memberikan rekomendasi teknis kepada BPDPKS.

Teman-teman lagi itu kita ada keputusan membuat Panja BPDPKS, yang mana yang kepakai untuk petani sesuai dengan Undang-Undang itu Rp2 triliun sekian. Yang Bersatu rasanya biaya jalan-jalan, biaya promosi, biaya gaji direksi dan yang lebih besar lagi adalah untuk B20 Rp29 triliun koma sekian. Inikan berbagai pihak belum kita panggil, tolong segera buat laporan nanti Panja tetap kita buat dan harus dijalankan.

Kemudian saya dapat laporan juga saya minta penjelasan saudara Dirjen Hortikultura perihal beberapa importir tidak memakai RIPH tetapi bawang putihnya bisa lolos ke Indonesia. Apakah Kepala Badan Karantina tidak menjaga di pelabuhan karena takut COVID atau karena anggarannya dipotong, jadi setelah Dirjen Hortikultura, Kepala Badan Karantina menyampaikan juga menjelaskan. Karena ini menjadi polemik diluar, dimana wewenang Kementerian Pertanian, dimana tugasnya Badan Karantina mengawasi.

Silakan dijawab dulu.

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA:

Mohon ijin Bapak Menteri, Mohon ijin Bapak Ketua.

Jadi terkait dengan importase yang tanpa RIPH kami sudah melaporkan ke Satgas Pangan Pak. Memang ada kuran lebih sekitar 34 importir yang tidak ada RIPH memasukkan bawang putih dan itu sudah kami laporkan semuanya ke Satgas Pangan.

Demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya minta besok harus ada di Sekretariat Komisi IV DPR RI, 34 perusahaan itu beserta volumenya. Sekarang Kepala Badan Karantina jelaskan.

KEPALA BADAN KARANTINA:

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mohon ijin Bapak Menteri, kami jelaskan Pak.

Bapak Ketua, Bapak dan Ibu semua para Anggota Komisi IV DPR RI yang hadir pada Rapat Kerja kita ini.

Terkait dengan importasi bawang putih yang seperti dipertanyakan Bapak Ketua tadi. Kita di Badan Karantina Pak Ketua, kami jelaskan telah mencatat, kami telah mencatat dan ada catatan semua bagi semua yang teman-teman importir tidak punya dokumen itu. Dan pada saat Ramadhan waktu itu, itu sempat rapat dengan yang dipimpin oleh Menko Perekonomian terkait dengan tugas pengawasan ini Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Menko atau Deputi? Harus jawab dengan jelas.

KEPALA BADAN KARANTINA:

Iya, Deputi yang memimpin.

KETUA RAPAT:

Bilang dong jangan Menko, bilang yang memimpin Deputi atas perintah Menko Perekonomian.

KEPALA BADAN KARANTINA:

Siap Bapak Ketua.

Ibu Mus yang memimpin rapat waktu itu, dan kami waktu itu meminta termasuk ada hadir Bapak Ketua Satgas Pangan waktu itu untuk menidakan jalan. Karena sesungguhnya Badan Karantina Pertanian tidak punya tugas untuk menahan itu Bapak Ketua. Sesuai dengan Undang-Undang kami di Badan Karantina Pertanian menjaga Kesehatan. Dokumen kesehatannya dilengkapi, dokumen COA dilengkapi. Begitu itu lengkap tetapi semuanya kami tetap mencatat seluruhnya. Di kami ada catatannya dan itu terkoneksi dengan Satgas Pangan Bapak Ketua.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi Bapak Menteri lain kali tidak perlu pakai RIPH cuman atas saran Deputi apapun boleh masuk.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ketua, interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu Pak, ini belum selesai Pak.

Jadi saya sangat kecewa sekali, cuman dicatat tetapi rekomendasi ijin hortikultura tidak ada. Saran saya lebih baik kenapa tidak dicabut semuanya tidak perlu ada RIPH, tidak perlu ada kuota, tidak perlu ada apa, itu lebih baik. Inikan sama saja dualism, ada yang harus menyertakan RIPH ada yang tidak.

Kemudian masalah wajib tanam saya juga masih bingung, wajib tanamnya nanti bagaimana. Sebelum impor wajib tanam pun banyak yang tidak tanam apalagi setelah impor. Inilah jadi catatannya. Saya kadang-kadang bingung bagaimana regulasinya. Saya minta tolong juga Bapak Menteri ditertibkan masalah ini, harus firm apakah pakai RIPH atau tidak, kalau tidak ya bebaskan semua. Ini yang terjadi saya sungguh tidak nyaman, kok kenapa jadi begini

Kemudian tanggapan saya yang terakhir adalah masalah impor daging kerbau. Daging kerbau itu dibutuhkan untuk stock pada saat Idul Fitri, tapi nyatanya pada saat Idul Fitri tidak ada dijual. Setelah Idul Fitri baru daging kerbau masuk, yang baru masuk itu PT. Berdikari sedangkan Bulog belum. Sekarang kita bayangkan setelah Idul Fitri daya beli dimana, apakah rakyat masih mampu beli daging. Kalau harganya dijual murah otomatis yang hancur siapa? Ya, peternak sapi lokal.

Bapak Menteri dan para Eselon I yang saya hormati.

Kalau kita punya niat baik, nawaitu tanpa embel-embel yakin kita bisa swasembada daging. Ya, kalau punya embel-embel, kalau swasembada saya tidak dapat apa-apa, inikan yang susah. Saya kalau ditanya oleh Ketua Fraksi saya, ini bagaimana? Ya, saya juga bingung menjelaskannya. Tadi ada Anggota yang mengatakan kenapa tidak masukkan sapi betina sebanyak-banyaknya, agar 2-3 tahun yang akan datang tidak perlu ada impor lagi, impor daging kerbau. Tadi ada yang mau ngomong, siapa tadi ngomong masalah daging kerbau ada PMK-nya. Orang India mengatakan 30 negara termasuk Arab Saudi, Malaysia makan daging kerbau tidak mati katanya. Inilah yang terjadi, jadi bukan masalah PMK atau tidak.

Sudahlah Bapak Menteri, saya berharap tidak ada lagi daging impor kerbau, karena saya tahu itu menguntungkan. Harga daging kerbau berapapun beli saya tahu di India, suplay sama siapa saya tahu. Kalau daging kerbau masuk Indonesia dijual Rp80 ribu kenapa tidak kita suruh makan daging segar saja Rp100 ribu kan sama juga.

Jadi saya minta tolong kepada Bapak Menteri koordinasikan masalah yang tadi saya katakan, jangan sampai terulang lagi dualisme. Kementerian Pertanian punya badan tersendiri, punya peraturan, punya Undang-Undang, yang disana juga begitu, silakan. Supaya kita punya marwah, punya harga diri, bahwa Menteri Pertanian pengambil kebijakan 1, 2, 3.

Bapak Suhardi Duka, silakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua, Bapak Menteri bersama seluruh jajaran dan Anggota Dewan yang terhormat.

Mohon maaf baru bisa ikut pada tahap kedua, karena saya tugas di Banggar tadi.

Saya kira kita ketahui bersama bahwa akibat COVID ini harga komoditas turun, NTP petani juga turun, artinya bahwa kemampuan petani kita menurun. Oleh karena itu, kalau ada alokasi subsidi pupuk tahun ini Bapak Ketua, dan itu pasti ada hanya jumlahnya saja belum, pagu indikatifnya belum diputuskan. Saya meminta supaya ini diperluas dan jangan terlalu sempit harga antara pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi. Mepet tidak apa-apa yang penting luas cakupannya sehingga petani kita bisa lebih banyak memanfaatkan pupuk bersubsidi itu. Kalau sekarang ini hampir bagi dua, pupuk subsidi harganya hanya Rp95 ribu sedangkan pupuk non subsidi sekitar Rp200 ribu. Nah, ini sangat terbatas cakupan daripada pupuk bersubsidi ini, karena NTP kita memang lagi turun. Petani kita tidak mampu beli pupuk, itu yang pertama.

Yang kedua, kita tahu memang anggaran sektor pertanian ini kalau kita lihat dengan PDB kita itu hanya 0,1% saya kira dengan anggaran kurang lebih Rp18 triliun ini untuk kita berharap banyak pada pangan dan pertanian saya kira kita juga tidak adil kalau memaksakan dengan kondisi Rp18 triliun. Oleh karena itu, sejak 2 hari kami berusaha untuk meyakinkan baik itu Menteri Keuangan, Menteri Koordinator tadi termasuk Bapak Menko Ekuin meyakinkan bahwa persoalan pangan di tengah COVID ini adalah second way bukan COVID yang menjadi second way tetapi pangan yang menjadi second way. Kalau terjadi kekurangan pangan kita ini akan bahaya Indonesia, sehingga itu memang apa yang dikatakan Bapak Ketua tadi kita harus punya kekuatan di Kementerian Pertanian. Dan saya yakin bahwa Komisi IV DPR RI akan mensupport penuh apabila kita betul-betul bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan kita. Kita kurangi ketimpangan-ketimpangan yang ada.

Tadi juga saya sampaikan bahwa RIPH tidak seluruhnya keluar dari Kementerian Pertanian. Artinya, ada impor yang masuk tanpa melalui RIPH, ini tidak memproteksi petani kita. Dan juga saya kira yang paling penting adalah pada saat panen itu katakanlah petani bawang sementara dia panen jangan kita lakukan impor supaya ada proteksi terhadap petani kita. Yang selama ini kita lihat saat panen juga masuk berlebihan, maka yang tadinya harapan angan-angan untuk mendapatkan harga yang cukup bagus menjadi tidak ada harapan. Nah, saya kira akibatnya petani bawang putih kita atau bawang putih kita selalu kekurangan tidak mencapai target yang kita

tetapkan. Hanya 5% sampai 10% dari kebutuhan dalam negeri, sedangkan sesungguhnya potensi kita bisa sampai 20%-30% kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi oleh petani kita kalau ada jaminan bahwa akan dibeli dengan harga yang cukup menguntungkan, tetapi kalau tidak kompak antara importir, kebijakan pertanian dan kebijakan perdagangan tidak sejalan saya yakin akan begini terus komoditas-komoditas yang menjadi bagian yang kita impor.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih kepada Menteri Pertanian yang telah menyampaikan jawabannya. Saya tanyakan apakah dari Badan Usaha Milik Negara, baik Sang Hyang Seri atau Berdikari ada yang mau disampaikan.

Silakan.

DIRUT PT BERDIKARI:

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Dan para Anggota Dewan yang kami muliakan,
Serta Bapak Menteri Pertanian beserta jajaran yang kami hormati.

Ijinkan Pak, kami dari Berdikari ingin meluruskan saja Pak, bahwa tadi di depan Bapak menyampaikan bahwa kontrak daging kerbau yang telah tiba di Indonesia memang kami sudah tiba Pak, sejak bulan Mei. Dan totalnya itu sejumlah 67 kontainer. Dan kalau disebut bahwa barang yang masuk itu daging kerbau itu khususnya adalah untuk negara lain mungkin kalau secara dikatakan tujuannya kami tidak tahu, tapi yang jelas daging itu memang baru kami ambil langsung dari supplier dan di-packaging sesuai dengan keinginan dari kita dan aturan yang ada termasuk dengan branding dan juga data-data mengenai kapan diproduksi dan lain-lain Pak. Dan tentunya kalau itu barang sebenarnya adalah buat negara lain dan lebelnya negara lain pasti di Badan Karantina kami tidak akan bisa masuk Pak, ijin seperti itu.

Dan memang kami di PT Berdikari menerima penugasan dari Kementerian BUMN berdasarkan hasil Ratas Pak, itu untuk daging kerbau 50 ribu ton dan sapi Brasil 10 ribu ton Pak. Dan sampai saat ini dari kami total itu yang sudah dibeli dari supplier adalah sebanyak 3 ribu ton. Itu Pak, dari kami.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sebentar, baru 3 ribu ton?

DIRUT PT BERDIKARI:

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, sedikit sekali ya, rekomendasinya 70 ribu ton, penugasannya.

DIRUT PT BERDIKARI:

Kerbau 50 ribu dari India, sapi dari Brasil 10 ribu ton.

KETUA RAPAT:

60 ribu?

DIRUT PT BERDIKARI:

Total 60 ribu Pak.

KETUA RAPAT:

Oke.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Dari dialog, diskusi, saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI sebelum acara ini kami akhiri akan kami bacakan rancangan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini, tampilkan. Saya bacakan.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif Kementerian Pertanian dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 sebesar Rp18.432.578.590.000,00 (Delapan Belas Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Tahun Anggaran 2021 antara Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor: S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020, dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.764.543.174.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);
- b. Inspektorat Jenderal,

Ini tidak kekecilan Inspektorat Jenderal, cukup? Ya, nanti dirubah kalau sudah jadi pagunya.

- b. Inspektorat Jenderal, Rp99.581.831.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Jadi Pak Menteri, kalau Inspektorat Jenderal ke daerah dijemput, dikasih makan, dibayarin hotel, dikasih oleh-oleh ya sudah wassalam, tidak ada yang diperiksa lagi.

- c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Rp4.538.936.274.000,00 (Empat Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);
- d. Direktorat Jenderal Hortikultura, Rp956.146.411.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah);
- e. Direktorat Jenderal Perkebunan, Rp1.192.670.698.000,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Rp1.919.759.789.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- g. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Rp3.032.440.445.000,00 (Tiga Triliun Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Rp1.707.118.372.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Miliar Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
- i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Rp1.379.187.543.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- j. Badan Ketahanan Pangan, Rp875.903.216.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
- k. Badan Karantina Pertanian, Rp966.290.837.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menelaah RKA dan RKP Tahun 2021 Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota?

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Catatan saja Ketua, bukan menerima penjelasan itu berarti kan baru kita mendapatkan penjelasan saja, belum menyetujui. Membuka ruang bagi penambahan ataupun pengurangan.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau menerima penjelasan tidak boleh ada pengurangan dong Pak Ichsan. Anda ini bagaimana, anda bukan bela Komisi IV DPR RI hanya menerima penjelasan wajib ditambah, gitu maksudnya.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Ya, kira-kira begitu.

KETUA RAPAT:

Anggota setuju?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI mengapresiasi komitmen Menteri Pertanian untuk menjamin tidak melakukan impor terhadap komoditas strategis yang dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri.

Anggota?

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Jelaskan dulu Ketua, komoditas strategis itu apa saja.

KETUA RAPAT:

Tadikan sudah dijelaskan Pak Ichsan, yang strategis itu yang dapat diproduksi secara optimal, contohnya beras, jagung kan tidak perlu impor.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Ya tambahkan saja.

KETUA RAPAT:

Apa yang mau ditambahkan.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Terutama jagung dan beras.

KETUA RAPAT:

Tidak usahlah.

Pemerintah?

MENTERI PERTANIAN:

Ya, karena secara optimal dalam negeri berarti yang tidak optimal saja, yang tentu masih tetap ada ruang. Saya tentu sangat sependapat dengan pikiran itu, cuman telah diputuskan dalam sidang kabinet bahwa semua masalah impor harus diputuskan dalam Rakor lengkap. Rakor lengkap itu termasuk didalamnya beberapa Menko. Jadi saya sependapat ini kita setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian agar segera menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II TA. 2019, terutama terkait dengan fungsi pengawasan dalam kepatuhan pelaku usaha perkebunan untuk memiliki izin usaha perkebunan dan melaksanakan kewajibannya memfasilitasi pembangunan kebun plasma masyarakat sebesar 20%.

Anggota?

Pak Kasdi, jangan setuju-setuju saja tapi yang tidak ada plasmanya diberi peringatan dong, selama inikan diam saja Bapak Kasdi. Pemerintah setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merevisi target-target eksportnya sehubungan dengan perkembangan ekonomi dunia pasca COVID-19 dan kemudian memperhatikan kondisi produksi dan harga komoditas di dalam negeri. Hal ini sehubungan dengan terjadinya kasus produksi yang tidak diserap pasar dan mengalami penurunan harga yang sangat tajam.

Anggota setuju?

Pemerintah setuju ya, jadi komoditi salah satunya yang harganya hancur di Dirjen Perkebunan tolong diperhatikan harga kopi hari ini hanya Rp17 ribu per kilo.

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian mempertimbangkan dengan lebih cermat sehubungan dengan rencana pembukaan lahan baru yang akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan tata ruang dan ekosistem lingkungan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menyarakan agar memanfaatkan lahan-lahan milik Pemerintah, seperti lahan milik BUMN Pertanian dan Kehutanan yang dapat dioptimalkan penggunaannya.

Anggota?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan mitigasi dan adaptasi resiko kebakaran dan kekeringan serta ancaman gangguan organisme pengganggu tanaman, yang akan menjadi dasar dalam menyusun RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021.

Anggota?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam upaya peningkatan produksi dilakukan pemetaan berdasarkan potensi lokal dan kesesuaian agro ekosistem pertanian, sebagai basis dalam menyusun RKAK/L dan RKP-K/L Tahun 2021 agar tepat sasaran.

Anggota?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun RKAK/L dan RKP-K/L Tahun 2021 fokus pada program padat karya dan upaya peningkatan produksi pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar melakukan realokasi anggaran yang lebih mengakomodasi peningkatan produksi pada Direktorat Jenderal teknis,

melalui penguatan dalam kegiatan pendukung produksi, antara lain perbaikan irigasi, embung, bantuan alat dan mesin pertanian yang tepat guna, Unit Pengolahan Pupuk Organik, dan unit pengolahan pascapanen komoditas pertanian.

Anggota?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

Cukup.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, usul Pimpinan, sebelah kanan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pimpinan.

Sebagaimana tadi saya menyampaikan diawal bahwa petani kita hari ini nampaknya terus berkurang. Dan itu data Kementan juga menunjukkan begitu, karena memang tidak ada jaminan terkait dengan kesejahteraan khususnya kepada saat kemudian mereka panen. Harga dengan dalih terserap pasar sehingga harusnya hancur, sehingga saya mengusulkan pada kesimpulan ini agar Pemerintah dalam RKA ini membuat kajian terkait dengan subsidi pasca panen Bapak Ketua. Jadi intinya bagaimana kemudian kajian ini segera dimulai kalau kemudian memang memungkinkan kenapa kemudian tidak diterapkan. Saya tidak melihat itu dari awal di Komisi ini kita sampaikan.

Itu saja Pimpinan, mohon kalau itu dimasukkan dalam kesimpulan.

KETUA RAPAT:

Coba Pak Slamet redaksinya tolong dibacakan, supaya bisa dimasukkan, apakah Pemerintah menerima atau tidak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Sebelum ada redaksional mungkin Pemerintah bisa.

KETUA RAPAT:

Apa masalahnya tadi Bapak Slamet, supaya Bapak Menteri jelas.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Jadi berharap ada subsidi pasca panen terhadap hasil yang bisa oleh petani yang selama ini subsidiya adalah subsidi pupuk. Yang sebagaimana saya sampaikan petani pada hari ini sebenarnya lebih kepada ingin jaminan pasca penennya Pak, itu saja.

MENTERI PERTANIAN:

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI.

Jadi memang prioritas Pemerintah pendekatan-pendekatan atau intervensi subsidi itu hanya pada produktifitas. Jadi memang itu karena kalau on farm-nya atau sesudah pasca maka itu sudah terdiri atas lintas Kementerian. Khusus untuk katakanlah stabilisasi harga sebenarnya bukan di kita Pak, ada di Kementerian Perdagangan, suplay dan demand kan menentukan harga, ini yang kami tetap jaga. Kami sependapat dalam kondisi COVID ini Ketua, memang ada pelonggaran-pelonggaran untuk bisa memberikan stimulan kepada kita untuk membeli. Sebenarnya bukan dari harganya yang jatuh, lebih banyak adalah serapan dari produksi itu yang harus kita. Sampai hari ini data kami sesuai dengan HPP yang ada masih dalam kondisi terkendali. Kurang lebih seperti itu.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Mohon maaf Bapak Ketua, boleh menanggapi.

Jadi inikan kejadian yang berulang setiap panen kemudian harga jatuh dan kemudian intervensi Pemerintah tidak hadir disitu. Sementara ketika kita bicara petani leading sector-nya adalah Kementan. Bagaimana kemudian pelaksanaan Undang-Undang terkait dengan perlindungan petani ini yang barangkali kemudian bisa di itu. Sekedar kemudian masuk kesimpulan inikan belum pernah dilakukan, bagaimana kemudian petani kita, kita jamin kesejahteraannya sehingga jumlah petani kita dari tahun ke tahun tidak terus menurun, karena memang ada kepastian dari hasil itu.

Saya hidup di tengah-tengah petani Pak, jadi saya hidup di tengah-tengah petani, hidup di Dapil, sehingga apa yang disampaikan Bapak Menteri tidak sepenuhnya betul bahwa ketika kemudian harga HPP mereka masih stabil. Karena fakta dilapangan mereka sangat-sangat jauh dari HPP itu mereka. Itu yang kita harapkan sehingga kalau tidak keberatan dimasukkan agar Kementerian Pertanian dalam tahun ini membuat kajian bagaimana kemungkinan-kemungkinan untuk dilakukan subsidi pasca panen.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Begini Pak Slamet, kalau dimasukkan kesimpulan rapat harus jelas gimana subsidiya itu, baru bisa masukkan kesimpulan rapat. Tetapi Bapak

Slamet bisa memberikan catatan kepada Kementerian untuk mengkaji pemberian subsidi pasca panen, begitu Bapak Slamet ya. Oke, sebelum kami menutup Rapat Kerja ini kami persilakan Menteri Pertanian untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini.

MENTERI PERTANIAN:

Pimpinan Komisi IV DPR RI dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI, Pejabat Pemerintah Kementerian Pertanian yang saya hormati.

Dengan rasa penuh percaya diri hari ini kami merasa bahwa Kementerian Pertanian memang tidak sendiri. Ada Komisi IV DPR RI yang terus memberi energi dan ini menjadi sangat positif bagi kami hari ini. Jujur saya katakan di saat-saat teratas tertentu kami berhadapan dengan berbagai tantangan. Di lapangan kami berhadapan dengan tantangan, dan terakhir seperti dikatakan Bapak Slamet juga seperti itu Pak. Kami merasakan kalau produksi menurun Mentan yang salah, produksi berlimpah tidak diserap Mentan lagi yang salah dan seperti itulah nasib kami yang ada.

Jujur ingin saya katakan Bapak Ketua, seandainya ini pikiran dari Kementerian Pertanian. Di saat COVID seperti ini tidak ada produktifitas yang tidak dibeli, ini saatnya hadir Pemerintah. Sebenarnya kami menyampaikan itu Pak, dalam Ratas. Bahwa ini saatnya Pemerintah menyanggah semua agar semangat petani tetap ada Bapak Pimpinan dan ini bukan retorika. Kami percaya kita ini bisa menikmati nasi hari ini, bisa berada di restoran itu atas semangat yang masih ada di lapangan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa hormat saya hari ini merasakan ada kekuatan yang kuat untuk melihat dan menata apa yang ada. Termasuk diantaranya masalah RIPH itu sebenarnya bukan masalah ijin impor. Kita tidak mau impor-impor yang masuk itu merusak Kesehatan kita yang ada disini, lebih banyak itu pikiran yang ada dan tidak segampang apa yang kami ucapkan. Pikiran yang ada di Komisi IV DPR RI hari ini sebenarnya itulah pikiran yang ada di Kementerian Pertanian, tapi bagaimana mewujudkan dalam pendekatan yang holistik dari sebuah negara dan Pemerintahan, ini menjadi tantangan tersendiri. Mohon tetap kami dienergi, *insya allah* kami akan tetap bersama Komisi IV DPR RI dalam situasi apapun.

Terima kasih Ketua, mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan akan kami jawab dalam pendekatan kerja yang ada.

Sekian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja hari ini, atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini kekurangan dan kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillah* Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001